

p-ISSN 2089-0338
e-ISSN 2502-7921

Vol. 13 No. 01 (2023)

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial



Nomor : 200/M/KPT/2020



Diterbitkan oleh :
Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
Kementerian Sosial RI

Vol 13, No. 01 (2023)

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Sebuah Jurnal yang menyajikan Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk hasil penelitian bidang kesejahteraan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember. SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari “Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial” yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 menggunakan Open Journal System (OJS). Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di jurnal ini harus melakukan pengiriman naskah melalui Open Journal System (OJS). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 21/E/KPT/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I tahun 2018 ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah **Terakreditasi Peringkat 2** (Volume 6 Nomor 1 tahun 2016 sampai Volume 10 Nomor 1 tahun 2020). Pada Tahun 2020 kembali mengajukan akreditasi dan berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia No. 200/M/KPT/2020 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III tahun 2020 ditetapkan kembali sebagai sebagai Jurnal Ilmiah **Terakreditasi Peringkat 2**. Pada tahun 2022 dilakukan pengalihan pengolahan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial ke Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada tahun 2023 dilakukan perubahan website dari <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia> ke <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk>

Alamat :

Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI
Radio Dalam, 11, Jl. Margaguna Raya No.1, RT.11/RW.1, Gandaria Sel., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12420

e-mail : sosiokonsepsia@gmail.com

e-journal: <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk>

Editorial Team

Penanggungjawab

Afrizon Tanjung, M.Si, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Manajer Jurnal

Dr. Toton Witoni, ST, MA, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Pimpinan Editor

Agus Wahyudi, S.ST, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta

Editor Bagian

Dr. Sri Tjahjo Rini, M.Si, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Nyi R. Irmayani, SH., M.Si, Scopus ID [57956596800](#) Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Dr. Ferry Rhendra Pananda Putra Sitorus, A.Ks, M.Si, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Jazak Akbar Hidayat, S.H, MA., Ph.D Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, Indonesia

Drs. Indro Widi Handoko, M.Si, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Noor Anggorowati, SIP, MPA, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia.

Siti Rohmanatin Fitriani, S.Th, MA, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, Indonesia

Lasarus Jehamat, S.Sos, MA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Sri Widayanti, S.PdI, MA, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Proofreader

Bina Adi Prakasa, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta

Layout Editor

Zaenal, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta

Sekretariat

Baiq Endang Dwi Handayani M.Si, Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Jakarta

Anisa Retno Febrianti, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Jakarta

Prof. Adi Fahrudin, Ph.D, Scopus ID: [35261484600](#), Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Raya, Jakarta, Indonesia.

Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D, Scopus ID: [57210976685](#), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmmono, M.Sc, Scopus ID: [25823852000](#), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

Prof. Irwanto, Ph.D, Scopus ID: [7409586829](#), Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Atmayaja, Jakarta, Indonesia.

Agus Fanar Syukri, Ph.D, Scopus ID: [56516912500](#), Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Binahayati Rusyidi, Ph.D, Scopus ID: [55778489900](#), Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia.

Dr. Bambang Rudito, Scopus ID: [36632972600](#), Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung, Indonesia.

Nurhadi, S.Sos. M.Si. Ph.D, Scopus ID: [57209449684](#), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Dr. Santoso Tri Raharjo, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

Dede Rahmat Hidayat, M.Psi, Ph.D, Scopus ID: [57210163446](#), Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Tauhid Komara Yudha, S.Sos. M.PD, Scopus ID: [57201631933](#), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Mu'man Nuryana, M.Sc., Ph.D. Scopus ID: [57223229321](#), Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Dr. Hari Harjanto Setiawan, M.Si Scopus ID: [57225011816](#) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Badrun Susantyo, Ph.D. Scopus ID: [57223215291](#) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Yanuar Farida Wismayanti, SST., MA., Ph.D. Scopus ID: [57202466692](#) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Habibullah, S.Sos., M.Kesos. Scopus ID: [57732733900](#) Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Daftar isi

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung <i>Yudhistira Anugerah Pratama</i>	1 - 20
Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar <i>Muhammad Rizaldy Nugraha</i>	21 - 30
Kapabilitas Human Agency Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) Foundation Dalam Menangani Permasalahan Pendidikan di Pedalaman Banten <i>Meilanny Budiarti Santoso, R. Nunung Nurwati, Azlinda Azman, Budhi Gunawan</i>	31 - 42
Proses Praktik Prostitusi Mahasiswa “Ayam Kampus” di Kota Malang <i>Fitara Grasella, Oman Sukmana, Eko Rizki Purwo Widodo</i>	43 - 56
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Masa Krisis di Kabupaten Lumajang <i>Setyo Sumarno dan Achmadi Jayaputra</i>	57 - 68
Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara <i>Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere</i>	69 - 4
Pengaruh Kedekatan Orangtua dan Masyarakat terhadap Persepsi Seks Bebas dan Narkoba Pada Remaja <i>Alfisyahrina Hapsery, Artanti Indrasetianingsih, Risca Agustin, Natasha Bunga, Salsa Rifqah Nurain, Ellya Susilowati</i>	85 - 96

Pengantar Redaksi

Jurnal Sosio Konsepsia adalah forum untuk publikasi, desiminasi dan perdebatan ide-ide dari hasil penelitian kesejahteraan sosial. Jurnal ini bertujuan untuk memajukan pemahaman teori, membentuk kebijakan, dan menginformasikan praktik penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Sosio Konsepsia diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tiga kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal Sosio Konsepsia terakreditasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek / BRIN) Peringkat 2 sesuai SK No.200 / M / KPT / 2020 Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020. Pada Volume 13, No. 01, September – Desember 2023 menyoroti tentang isu lingkungan, program keluarga harapan, kapabilitas human agency, Lansia, Stunting dan persepsi seks bebas dikalangan remaja.

Yudhistira Anugerah Pratama, Bank sampah merupakan salah satu upaya yang didasari oleh kebijakan untuk melestarikan lingkungan. Begitu pula dengan Bank Sampah Wargi Manglayang yang mendirikan bank sampah dengan tujuan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan melalui empat dimensi yang meliputi legislasi, isu dan tujuan, keterlibatan anggota, dan sistem sumber. Metode deskriptif kualitatif digunakan, didukung observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar dimensi analisis kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang sudah terimplementasi secara optimal. Berdasarkan temuan ini, peneliti menyarankan beberapa upaya untuk memelihara kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang yang sudah optimal, seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi, meningkatkan kampanye sosial, penyediaan fasilitas, regulasi, dan sumber daya, menetapkan penyediaan insentif dan imbalan anggota, serta meningkatkan pembentukan jaringan yang sudah kuat.

Muhammad Rizaldy Nugraha, Dampak Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. (2) Mengetahui dampak dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Responden di dalam penelitian ini ada 85 responden dari Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dengan menganalisa dampak terhadap responden dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bias dilihat dari kondisi social ekonomi nya yang membaik, taraf pendidikan anaknya yang baik, status kesehatan gizi keluarga ibu dan anak yang baik dan tercukupi, dan akses kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Meilanny Budiarti Santoso, R. Nunung Nurwati, Azlinda Azman, Budhi Gunawan, Kapabilitas human agency merupakan issue penting bagi pengembangan keilmuan dan praktik pekerjaan sosial, mengingat pekerjaan sosial merupakan profesi yang bersentuhan langsung dengan intervensi sosial dan salah satunya bertujuan untuk menangani permasalahan sosial ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini merupakan refleksi bagi pekerja sosial profesional berdasarkan praktik nyata penggunaan kapabilitas human agency dalam intervensi sosial sekaligus menunjukkan pentingnya pengarusutamaan konsepsi human agency dalam keilmuan pekerjaan sosial yang salah satunya berfokus pada upaya pengembangan keberfungsian sosial. Metode explanatoriy dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis kapabilitas human agency Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) Foundation dalam menangani permasalahan pendidikan di pedalaman Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi kapabilitas human agency merupakan komponen penting di antara berbagai komponen lainnya dalam menangani permasalahan yang terjadi. Kehadiran aktor dengan kapabilitas human agency tidak dapat dipisahkan dari kelompok ataupun organisasi

sebagai wadah dalam melakukan program. Namun demikian, program dan kelompok ataupun organisasi dapat berjalan karena adanya eksistensi aktor dengan kapabilitas human agency yang berperan sebagai motor penggerak. Kolaborasi, networking dan partnership yang terjalin diantara berbagai pihak telah mendorong pelaksanaan program dengan baik dan berkelanjutan sekaligus sebagai infrastruktur dan fasilitasi yang mendukung program sebagai bentuk tindakan nyata (*agentic action*) yang dilakukan.

Fitara Grasella, Oman Sukmana, Eko Rizki Purwo Widodo, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fenomena praktik prostitusi Ayam Kampus pada mahasiswa di Kota Malang. Ayam Kampus merupakan istilah yang diberikan kepada mahasiswi yang terjun ke dalam dunia praktik prostitusi. Fokus penelitian diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan pokok penelitian, yakni: bagaimana proses dan factor-faktor yang mendorong mahasiswa dalam melakukan praktik prostitusi Ayam Kampus di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan snowball dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan tahap analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yang meliputi tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi dan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik perpanjangan waktu keterlibatan penelitian dan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses praktik prostitusi mahasiswa Ayam Kampus di Kota Malang dilakukan melalui tiga fase, yakni fase kontak awal, fase transaksi, dan fase akhir penyelesaian. Sedangkan factor-faktor yang menyebabkan mahasiswa terlibat dalam praktik prostitusi Ayam Kampus adalah karena factor relasi pertemanan, gaya hidup, dan factor kondisi ekonomi keluarga.

Setyo Sumarno dan Achmadi Jayaputra. Tahun 2021 terjadi perubahan kebijakan sosial dikenalkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ASISTENSILU) dengan penambahan jangkauan pelayanan yang dilakukan lembaga yang dibentuk Kementerian Sosial. Penelitian layanan sosial terhadap lanjut usia di masa krisis belum pernah dilakukan, sehingga permasalahannya bagaimana peran lembaga pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pelayanan sosial pada masa krisis. Tujuannya untuk menemukenali data dan keterangan pelayanan sosial yang dilakukan lembaga pemerintah dan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap pemangku kebijakan dan pelaksana kegiatan, serta pengamatan di lokasi. Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, Griya Lanjut Usia Gerbang Mas tidak terkait langsung dengan bencana alam letusan Gunung Semeru. Pelayanan langsung dilakukan terhadap seluruh lanjut usia penghuni panti sosial dan pelaksana. Terutama dalam mencegah penyebaran Covid-19, sehingga tidak ada yang terjangkit virus tersebut. Kedua, pelayanan sosial terhadap lanjut usia di wilayah bencana alam letusan Gunung Semeru telah dilakukan berbagai lembaga sosial dan masyarakat setempat sesuai dengan kearifan lokal setempat. rekomendasi, pemerintah dan masyarakat perlu menyusun pedoman untuk pelayanan sosial terhadap lanjut usia di masa krisis.

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere, Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah standar sesuai usianya. Stunting dapat berdampak buruk pada kesehatan dan produktivitas anak di masa depan. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi stunting melalui berbagai program, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program BPNT. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendampingan PKH dan Program BPNT dalam penanganan stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH dan Program BPNT memiliki peran penting dalam penanganan stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pendamping PKH berperan sebagai fasilitator, motivator, dan edukator dalam memberikan informasi dan edukasi mengenai stunting kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Program BPNT juga berperan penting dalam meningkatkan akses KPM terhadap pangan bergizi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendampingan PKH dan

Program BPNT memiliki potensi untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Alfisyahrina Hapsery, Artanti Indrasetianingsih, Risca Agustin, Natasha Bunga, Salsa Rifqah Nurain, Ellya Susilowati, Masa remaja adalah peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Di era digital ini, rasa ingin akan terus meningkat dan menimbulkan remaja dapat berkomunikasi dengan lawan jenis tanpa batas. Jika tidak adanya filter dan pengawasan, remaja dapat terjerumus ke dalam konten dewasa yang berdampak negatif bagi mereka seperti seks bebas dan narkoba. Hubungan positif ataupun negatif orang tua dan remaja akan menciptakan persepsi yang berpengaruh bagi remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kedekatan orang tua dan masyarakat terhadap persepsi seks bebas dan narkoba pada remaja. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dengan instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner online. Populasi dari penelitian ini adalah remaja yang berada di Pulau Jawa yakni seluruh lulusan baru Sekolah Menengah Sederajat (SMA) dan mahasiswa. Teknik analisis data dilakukan dengan metode CB-SEM (*Covariance Based Structural Equation Modeling*) dengan *software* AMOS. Hasil penelitian variabel laten eksogen Tempat Tinggal berpengaruh signifikan terhadap persepsi Seks Bebas dan Narkoba pada Remaja. Diperlukan upaya pencegahan perilaku seks bebas dan Narkoba dengan melaksanakan penyuluhan sosial dan program penguatan keluarga dan konseling bagi remaja pada Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Dewan redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan pikiran dalam penerbitan jurnal ini. Kami menyadari bahwa edisi kali ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan jurnal ini di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2023
Redaksi

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

Yudhistira Anugerah Pratama ^{1*} 

¹ Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jln. Bukit Dago Utara No. 25, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat - 40135

* Korespondensi: yudhistira18001@mail.unpad.ac.id; Tel: +62-8782-126-1007

Diterima: tanggal 18 September 2023; Direvisi: tanggal 21 November 2023; Diterbitkan: tanggal 27 Desember 2023

Abstrak: Bank sampah merupakan salah satu upaya yang didasari oleh kebijakan untuk melestarikan lingkungan. Begitu pula dengan Bank Sampah Wargi Manglayang yang mendirikan bank sampah dengan tujuan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan melalui empat dimensi yang meliputi legislasi, isu dan tujuan, keterlibatan anggota, dan sistem sumber. Metode deskriptif kualitatif digunakan, didukung observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar dimensi analisis kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang sudah terimplementasi secara optimal. Berdasarkan temuan ini, peneliti menyarankan beberapa upaya untuk memelihara kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang yang sudah optimal, seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi, meningkatkan kampanye sosial, penyediaan fasilitas, regulasi, dan sumber daya, menetapkan penyediaan insentif dan imbalan anggota, serta meningkatkan pembentukan jaringan yang sudah kuat.

Kata kunci: legislasi, isu dan tujuan, keterlibatan anggota, sistem sumber, bank sampah

Abstract: Waste banks are one of the efforts based on policies to preserve the environment. Similarly, the Wargi Manglayang Waste Bank established a waste bank with the same purpose. This study aims to analyze policies through four dimensions which include legislation, issues and objectives, member involvement, and source system. Qualitative descriptive methods are used, supported by observation, interviews, and literature reviews. The results showed that most of the dimensions of policy analysis in the Wargi Manglayang Waste Bank have been optimally implemented. Based on these findings, researchers suggest several efforts to maintain policies in the Wargi Manglayang Waste Bank that are already optimal, such as increasing socialization and education, increasing social campaigns, providing facilities, regulations, and resources, determining the provision of incentives and rewards for members, and increasing the formation of already strong networks.

Keywords: legislation, issues and objectives, member involvement, source system, waste bank

1. Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (2022) mencatat Kota Bandung memiliki jumlah penduduk sebesar 2,5 juta jiwa. Data ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebanyak 2,3 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2022). Kepala Seksi Humas Perusahaan Kawasan Kebersihan Kota Bandung (2019) menyatakan peningkatan jumlah penduduk Bandung juga berdampak pada meningkatnya jumlah TPA yang dihasilkan warga, setiap harinya bisa mencapai 1.500 ton sampah. Hal ini juga menyebabkan truk pengangkut sampah mengangkut sampah sebanyak 1.200 hingga 1.400 ton sampah per hari yang dibuang di TPA Sarimukti (Faizah, 2008; Koswara dalam Hijriah, 2020). Adapun menurut CNN Indonesia (2023), saat ini TPA Sarimukti harus ditutup karena kebakaran yang terjadi, akibatnya Kota Bandung dan sekitarnya tidak memiliki tempat penampungan sampah yang memadai atau dengan kata lain sebanding dengan daya tampung dari TPA Sarimukti. Namun, aktivis lingkungan dari Generasi Semangat Selalu Tulus Bandung mengungkapkan bahwa Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dalam sehari hanya bisa menangani 1.200 ton sampah, sehingga sisa sampah yang tidak diangkut ke TPA bisa tercecer, masuk ke sungai, atau dibakar. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang disebabkan oleh jumlah limbah yang melebihi kapasitas (Uphoff, Cohen, & Goldsmith, 1979; Tapran dalam Hijriah, 2020).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011, pengelolaan sampah di Kota Bandung diamanatkan kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Selanjutnya, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah Kota Bandung, tanggung jawab kebersihan kota diamanatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Namun secara teknis, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menugaskan kepada Perusahaan Kebersihan Daerah karena keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan sampah (Peraturan Daerah Bandung Nomor 8 Tahun 2016).

Saat ini, penanganan sampah di Kota Bandung terdiri dari menyapu jalan, mengangkut sampah ke TPA, serta memilah dan mengolah di sumber sampah dan di tempat penampungan sementara. Namun, paradigma lama pengelolaan sampah, seperti pengumpulan-pengangkutan-pembuangan dan penanganan seperti itu belum efektif karena sampai saat ini masih menyisakan TPA (Sitanggang, Priyambada, & Syafrudin, 2017; Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, 2019). Paradigma ini menyebabkan tekanan berat pada TPA, karena membutuhkan jangka waktu yang lama agar sampah dapat terurai oleh proses alami. Hal ini juga didukung bahwa mayoritas landfill memiliki kemampuan penyimpanan yang terbatas, karena hanya menggunakan sistem *open-dumping*, yaitu pembuangan limbah dengan cara ditimbun di lapangan terbuka tanpa pengolahan apapun (Sastropetro, 1988; Kabari, 2013; Suryandari, Djaenudin, & Pribadi, 2018).

Kondisi TPA yang terus meningkat setiap harinya, berbagai tindakan lain perlu dilakukan, karena peningkatan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan (Wazir, 1999; Kustiah, 2005; Soeharto, 2009). Pegiat lingkungan dari *Zero Waste Asia* mengatakan bahwa dalam waktu secepat mungkin, pemerintah Kota Bandung perlu bergerak cepat untuk menangani kondisi sampah yang menjadi permasalahan hingga saat ini (Putra dalam Hijriah, 2020). Namun, keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah dari sumbernya akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan permasalahan sampah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Salah satu upaya yang dapat melibatkan masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah dari sumbernya adalah melalui bank sampah (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2017). Dalam kegiatan bank sampah, partisipasi merupakan salah satu faktor keberhasilan (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2017). Dalam kajian tersebut, terungkap bahwa upaya pembuatan bank sampah direkomendasikan karena merupakan langkah strategis bagi keterlibatan masyarakat untuk mengatasi sampah, sehingga sampah dapat menjadi komoditas yang menguntungkan. Istilah bank sampah muncul, karena sistem penanganan sampah ini menggunakan manajemen seperti pada bank pada umumnya (Kindervatter,

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Warga Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

1979; Soeharto, 1997). Suwerda (2012) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank sampah adalah tempat terjadinya kegiatan pelayanan bagi para penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah.

Ernawati, Budiastuti, & Masykuri (2012) dan Iman (2013) menyebutkan bank sampah didukung oleh kebijakan pusat dan daerah sebagai salah satu tindakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan bank sampah terdiri dari aturan, arahan, dan prosedur yang diterapkan untuk menjalankan bisnis bank sampah untuk mencapai tujuan tertentu. Bank sampah memiliki kebijakan untuk memilih dan mengolah berbagai jenis sampah. Ini dapat termasuk sampah organik, plastik, kertas, logam, dan lainnya (Ernawati, Budiastuti, & Masykuri, 2012; Iman, 2013). Kruljac (2012) dan Indriati (2015) menambahkan kebijakan ini memastikan pengelolaan yang efektif dan memastikan bahwa operasi bank sampah tidak membahayakan masyarakat atau lingkungan sekitar. Bank sampah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang tepat. Ini dapat dicapai melalui kampanye sosial, kursus, atau seminar (Kruljac, 2012; Indriati, 2015).

Noviaty (2013) dan Rohmawati (2015) menyebutkan bahwa bank sampah membutuhkan analisis, termasuk analisis kebijakan yang digunakan, sebagai salah satu kegiatan yang memiliki tujuan progresif. Analisis kebijakan bank sampah melibatkan penilaian mendalam terhadap berbagai aspek kebijakan yang diterapkan dalam operasional bank sampah. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan tantangan, keberhasilan, dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Noviaty, 2013; Rohmawati, 2015). Adapun Tchobanoglous (1993) dan Yuliastuti (2013) menjelaskan salah satu analisis yang digunakan adalah untuk melihat seberapa baik kebijakan yang berlaku telah mencapai tujuan bank sampah, seperti meningkatkan tingkat daur ulang, mengurangi sampah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini dapat ditinjau berdasarkan partisipasi masyarakat dan volume sampah yang diolah. Adapun Chambers & Bonk (2013) menambahkan bahwa dalam melakukan identifikasi dan analisis suatu kebijakan dalam program, termasuk bank sampah, membutuhkan empat langkah peninjauan. Empat langkah tersebut adalah adanya legislatif yang menjadi dasar kebijakan, adanya isu dan tujuan yang jelas dari kebijakan, adanya keterlibatan anggota terkait kebijakan, dan adanya sistem sumber kebijakan.

Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung merupakan salah satu bank sampah yang sudah melakukan operasional selama 14 tahun. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti, Bank Sampah Wargi Manglayang sudah memberikan dampak yang signifikan pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti ingin menganalisis kebijakan yang diterapkan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang dengan berpedoman pada Chambers & Bonk (2013) sebagai berikut:

1. Bagaimana legislatif yang menjadi dasar kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang?
2. Bagaimana isu dan tujuan kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang?
3. Bagaimana keterlibatan anggota terkait kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang?
4. Bagaimana sistem sumber kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang?

2. Metode

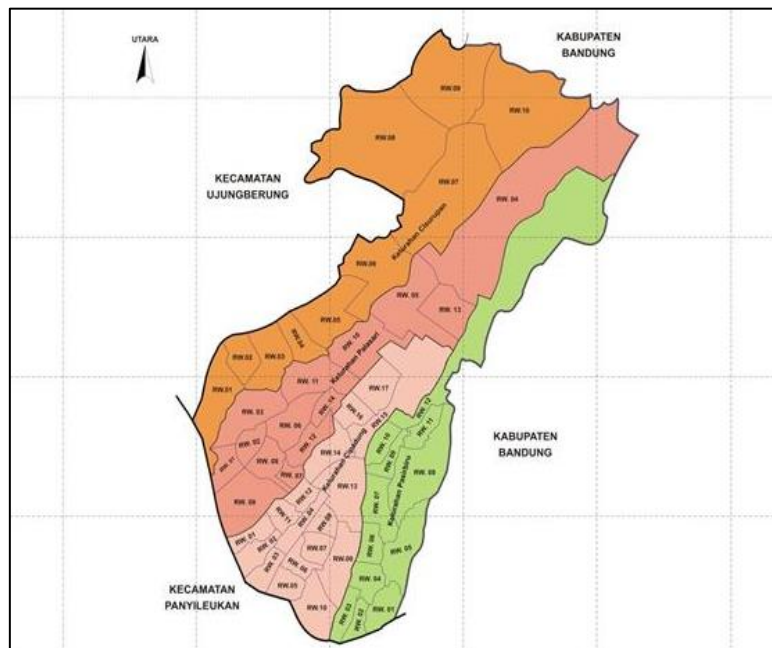
Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan melihat dokumen. Selain itu, data primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer dikumpulkan di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung, misalnya Profil Bank Sampah Wargi Manglayang dan *website online* mengenai kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang.

Selain menggunakan data primer dan sekunder, artikel ini juga menggunakan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini terdiri dari artikel, buku, tesis, dan disertasi yang membahas kebijakan dalam bank sampah. Peneliti melakukan analisis kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bank sampah dan melestarikan lingkungan (Creswell, 2014). Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah reduksi data yang merupakan tahap pemilahan data sesuai tujuan penelitian, penyajian data

yang merupakan narasi data yang telah disortir, dan penarikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari data penelitian yang telah dibahas berdasarkan tinjauan pustaka (Creswell, 2014).

3. Hasil

Kondisi yang terjadi di masyarakat meskipun sudah ada upaya penanganan masalah sampah yang diatur oleh pemerintah seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, nyatanya masih ada beberapa kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan kebersihan lingkungannya. Ketidakpuasan ini membuat beberapa kelompok masyarakat bersatu untuk melakukan upaya bersama. Salah satunya dilakukan oleh beberapa masyarakat di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, mereka mendirikan Bank Sampah Wargi Manglayang pada tahun 2009 yang berlokasi di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Beberapa komunitas tersebut membuat bank sampah yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk kegiatan yang mendukung perbaikan kondisi lingkungan, terutama dari permasalahan sampah.



Gambar 1: Peta Kelurahan Palasari

Pada tahun 2009, Bank Sampah Wargi Manglayang dipimpin oleh ketua atau biasa disebut *chief manager*, pada saat itu ketua pertama Bank Sampah Wargi Manglayang adalah Ibu Chelyna yang menjabat sejak awal berdirinya (tahun 2009) hingga tahun 2012. Kemudian pada tahun yang sama, kepala manajemen diserahkan kepada Ibu Mimin, dimana sebelumnya Ibu Mimin adalah wakil dari Ibu Chelyna. Ibu Mimin menjabat sebagai *managing chairman* dari tahun 2012 sampai sekarang. Anggota Bank Sampah Wargi Manglayang akan mendapatkan jabatan sebagai pengurus sekaligus nasabah. "Manajemen" berarti bebas mengikuti berbagai kegiatan Bank Sampah Wargi Manglayang, seperti mengurus urusan administrasi, mengelola gudang penyimpanan, mengurus pembuatan kerajinan. Sedangkan pelanggan yang dimaksud adalah pihak yang bisa menghemat sampah yang nantinya tabungan mereka akan dikonversi menjadi sejumlah rupiah. Pada tahun 2021, terdapat kurang lebih 250 anggota yang tergabung dalam Bank Sampah Wargi Manglayang, dan dari jumlah tersebut, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Mimin selaku ketua pengelola, tingkat aktivitas anggota yang menjadi anggota bervariasi, ada yang aktif, sedang, bahkan kurang aktif. Menurutny, anggota aktif biasanya rutin menabung ke Bank Sampah Wargi Manglayang setiap minggunya, jika yang saat ini setiap dua minggu sekali baru punya waktu menabung, sedangkan yang kurang aktif bisa sampai sebulan sekali untuk bisa menabung. Masyarakat yang tergabung dalam Bank

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

Sampah Wargi Manglayang tidak hanya terbatas pada wilayah Kabupaten Palasari, karena Bank Sampah Wargi Manglayang terbuka tentang keanggotaan, maka dapat lintas kecamatan, bahkan sampai ke daerah-daerah yang cukup jauh.

Selain mendorong ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kondisi lingkungannya, faktor lain yang menghambat terbentuknya Bank Sampah Wargi Manglayang adalah regulasi kompetisi kebersihan lingkungan yang salah satu syaratnya adalah kewajiban memiliki bank sampah. Secara historis, pada tahun 2009 terjadi lomba Bandung Green and Clean, dimana pada saat itu Walikota Bandung masih dijabat oleh Bapak Dada Rosada. Saat itu, kompetisi Bandung Green and Clean berkolaborasi dengan banyak pihak, antara lain Unilever, Pikiran Rakyat, Hotel Bandung, Rase FM, dan LPTT (semacam lembaga yang tepat diketuai oleh Pak Rohaji). Berbagai pihak ini bergabung untuk mengadakan kompetisi hijau dan bersih yang secara umum, adalah kompetisi kebersihan dan pengelolaan limbah. Dalam kompetisi tersebut, ada banyak kabupaten di Bandung (sekitar ratusan kabupaten). Saat itu, Kabupaten Palasari menjadi salah satu peserta dari banyak lainnya yang mengikuti lomba Bandung Green and Clean.



Gambar 2: Logo Bank Sampah Wargi Manglayang

Salah satu penggagas atau penggerak awal terbentuknya Bank Sampah Wargi Manglayang adalah suami dari Ibu Mimin yang merupakan pemerhati lingkungan, dan juga dosen pertanian Universitas Padjadjaran. Saat itu, mereka awalnya belajar tentang bank sampah melalui berbagai media, terutama internet. Pada tahun tersebut, tidak hanya Bank Sampah Wargi Manglayang, kabupaten lain juga akhirnya membuat bank sampah di daerahnya masing-masing. Pada kompetisi tahun 2009, Bank Sampah Wargi Manglayang berhasil meraih juara kedua, kemudian pada tahun berikutnya 2010, Bank Sampah Wargi Manglayang mengikuti lomba yang sama, dan meraih juara pertama dan juara umum tingkat Bandung, dimana pada saat tahun 2010, lomba Bandung Green and Clean diikuti oleh sekitar 500 kecamatan. Selanjutnya, perkembangan Bank Sampah Wargi Manglayang hingga saat ini masih beroperasi sebagaimana mestinya alur kerja bank sampah, meskipun tidak ada lagi kompetisi seperti Bandung Green and Clean. Karena mereka menyadari bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang memiliki manfaat, terutama bagi lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suryani (2014) yang mengungkapkan tujuan didirikannya bank sampah adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Berdasarkan sejarah, diketahui bahwa partisipasi masyarakat penting bagi Bank Sampah Wargi Manglayang. Mengingat dari awal pembentukannya hingga dapat bertahan hingga saat ini, Bank Sampah Wargi Manglayang bergantung pada partisipasi yang diberikan oleh masyarakat yang tergabung dalam Bank Sampah Wargi Manglayang itu sendiri. Peran serta masyarakat dalam kegiatan Bank Sampah Wargi Manglayang tidak hanya bermanfaat dalam mendukung kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan dampak yang lebih positif berupa manfaat ekonomi.

3.1. Kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang

Bagian ini menguraikan temuan penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang diberikan kepada informan. Untuk mengidentifikasi isu penelitian, data kemudian dianalisis secara deskriptif. Dalam rangka menggambarkan dan menganalisis informasi tentang aspek kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang, penelitian ini menggunakan data dari masyarakat dan pihak pemerintah yang terlibat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

3.2. Legislasi Bank Sampah Wargi Manglayang

Salah satu legislasi yang mengatur pendirian dan pengelolaan bank sampah di Indonesia adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce, reuse, dan recycle* melalui bank sampah. Dalam legislasi ini, terdapat ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah termasuk bank sampah. Bank Sampah Wargi Manglayang merupakan bentuk respon dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, sebab Bank Sampah Wargi Manglayang didirikan akibat adanya ketidakpuasan dari masyarakat Kelurahan Palasari mengenai permasalahan sampah. Hal ini terlihat dari adanya operasional Bank Sampah Wargi Manglayang yang sudah berjalan selama 14 tahun. Tidak hanya itu, dukungan Bank Sampah Wargi Manglayang terhadap legislasi yang ada dapat dilihat salah satunya dari keterlibatan Bank Sampah Wargi Manglayang dalam lomba Bandung Green and Clean dan menjadi juara.

Adapun informasi yang diperoleh selanjutnya adalah adanya legislasi yang mengatur tentang jenis sampah yang diterima dan dihargai oleh Bank Sampah Wargi Manglayang. Implementasi legislasi tersebut sudah dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari, sebab sebagian masyarakat sudah melihat manfaat atau insentif ekonomis dalam memilah sampah. Keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari juga didukung oleh optimalnya pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh mengenai manfaat dari bank sampah bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Salah satu faktor yang menjadi mendukung optimalisasi sosialisasi tersebut adalah intensitas pelaksanaan, yaitu dilakukan tiga kali dalam satu bulan. Legislasi yang optimal memungkinkan mengatasi pengelolaan limbah berbahaya dengan cukup baik. Limbah berbahaya yang tidak dibuang atau didaur ulang dengan tepat dapat mengancam kesehatan dan lingkungan, serta meningkatkan risiko kecelakaan industri. Hal ini juga menjadi alasan Keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari sudah cukup besar.

Kemudian, peneliti memperoleh informasi mengenai legislasi bank sampah yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan insentif bagi yang berpartisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang sudah memiliki kemampuan untuk memperluas operasi dengan memanfaatkan sebaik mungkin pembiayaan yang ada. Selain itu, masyarakat yang menjadi anggota juga sudah menerima insentif pembiayaan, sehingga mereka memiliki cukup modal untuk membeli alat pengumpulan dan pemrosesan sampah yang lebih efisien. Beberapa informan juga menambahkan hasil temuan penelitian, yaitu adanya insentif pembiayaan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang mendukung anggota menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam pengumpulan dan pengolahan sampah. Hal ini disebabkan adanya keuangan yang memadai, anggota bisa memperkenalkan teknologi atau metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang.

Berikutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang sudah menerapkan legislasi yang mengatur pengawasan dan penegakkan hukum yang cukup baik. Hal ini terlihat dari mulai tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap bank sampah sebagai lembaga yang transparan dan bertanggung jawab. Meskipun belum diterapkan seutuhnya, tetapi hal ini berpotensi mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan daur ulang sampah di Kelurahan Palasari dalam waktu mendatang. Selanjutnya, meskipun dana yang digunakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang sudah direalisasikan secara optimal, pemerintah dan masyarakat Kelurahan Palasari juga sudah menerapkan pengawasan dan penegakkan hukum terkait praktik ilegal. Hal ini terlihat salah

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

satunya dari transparansi dana yang dilakukan oleh sekretaris dan bendahara Kelurahan Palasari ketika dana digunakan, dengan tujuan untuk menghindari kasus pencucian uang atau penggelapan.

3.3. Isu dan Tujuan Bank Sampah Wargi Manglayang

Menurut hasil penelitian, isu yang timbul dalam mendirikan Bank Sampah Wargi Manglayang adalah mengurangi dampak lingkungan. Menurut keterangan Kepala Kelurahan Palasari, Bank Sampah Wargi Manglayang yang didirikan dapat membantu mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Dengan mendaur ulang atau memilah sampah, Bank Sampah Wargi Manglayang membantu mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, menghindari pencemaran tanah dan air serta mengurangi produksi emisi gas rumah kaca. Adapun keterangan lain menurut sekretaris Kelurahan Palasari yaitu mengurangi penggunaan sumber daya alam, sebab dengan mendaur ulang sampah, Bank Sampah Wargi Manglayang membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam seperti air, kayu, atau bahan bakar fosil. Dengan meminimalkan penggunaan sumber daya baru, Bank Sampah Wargi Manglayang berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan.

Kemudian, beberapa informan yang berasal dari masyarakat Kelurahan Palasari yang juga menjadi penggiat lingkungan berpendapat bahwa melalui Bank Sampah Wargi Manglayang, masyarakat Kelurahan Palasari diajarkan tentang pentingnya sikap peduli terhadap lingkungan. Dengan bertindak sebagai katalisator perubahan, Bank Sampah Wargi Manglayang membantu mengubah paradigma masyarakat dari pola pikir "membuang saja" menjadi mengelola sampah dengan bijaksana. Selain itu, Bank Sampah Wargi Manglayang juga mendorong dan memfasilitasi aktivitas daur ulang. Dengan memberikan insentif ekonomi seperti pembelian sampah, Bank Sampah Wargi Manglayang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan daur ulang dan memastikan bahwa lebih banyak sampah didaur ulang, bukan dibuang begitu saja. Dengan begitu, Bank Sampah Wargi Manglayang juga memungkinkan untuk memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat yang menjadi anggota sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Selanjutnya, diperoleh informasi mengenai implementasi tujuan dari Bank Sampah Wargi Manglayang. Hal ini terlihat dari pemaparan Kepala Kelurahan Palasari yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Bank Sampah Wargi Manglayang sudah optimal, bahkan dalam tiga tahun terakhir, Bank Sampah Wargi Manglayang berhasil mengurangi penumpukan sampah di Kelurahan Palasari sebesar 30%. Dengan demikian, dalam jangka panjang, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat mencegah pencemaran lingkungan, terutama melalui pembusukan sampah organik yang menghasilkan gas metana dan berpotensi mengancam kesehatan masyarakat Kelurahan Palasari.

Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang yang dikelola dengan baik menyebabkan masyarakat yang menjadi anggota memperoleh peluang untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui penjualan sampah yang didaur ulang. Selain itu, pengelolaan yang baik juga membuat kesempatan untuk melibatkan komunitas dalam kegiatan daur ulang menjadi lebih besar, sehingga kegiatan ekonomi lokal yang berhubungan dengan pengelolaan sampah mengalami perkembangan. Tidak hanya itu, keterangan dari beberapa masyarakat Kelurahan Palasari yang juga menjadi penggiat lingkungan adalah dampak dari operasional Bank Sampah Wargi Manglayang yang sudah baik membuat citra Bank Sampah Wargi Manglayang sudah dipandang baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat cenderung ingin terlibat, terutama dalam hal edukasi lingkungan. Hal ini terjadi salah satunya masyarakat Kelurahan Palasari merasa sudah ada contoh nyata yang menjadi pendorong perubahan perilaku mereka untuk hidup sehat dan bersih serta menjaga kelestarian lingkungan melalui edukasi terkait pengolahan sampah.

3.4. Keterlibatan Anggota Bank Sampah Wargi Manglayang

Keterlibatan pemerintah Kelurahan Palasari dalam kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang menjadi hal penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pendirian dan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang, meliputi aturan perlindungan lingkungan, izin usaha, dan mekanisme

pengawasan. Peran ini merupakan regulator pemerintah Kelurahan Palasari yang telah diimplementasikan dalam bank sampahnya. Sementara itu, pemerintah Kelurahan Palasari juga memberikan dana dan subsidi bagi Bank Sampah Wargi Manglayang untuk meningkatkan kapasitas operasional dan pengembangan program. Subsidi ini berupa bantuan keuangan, pembebasan pajak, atau bantuan logistik seperti truk pengangkut sampah. Pemerintah juga dalam beberapa kesempatan menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk mendukung program-program di Kelurahan Palasari. Hal ini meliputi penyaluran bantuan logistik, pendanaan, atau penggunaan teknologi modern. Oleh sebab itu, dalam Bank Sampah Wargi Manglayang, pemerintah Kelurahan Palasari telah mengupayakan menjalin kerjasama dengan sektor swasta, terutama dalam penyediaan alat pencacah sampah dan penampungan bagi sampah yang bersifat cairan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang.

Keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari dalam kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang juga menjadi hal penting untuk kesuksesan dan keberlanjutan program. Masyarakat Kelurahan Palasari berpartisipasi aktif memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang. Mereka dapat membantu meningkatkan jumlah dan kualitas bahan daur ulang yang masuk ke Bank Sampah Wargi Manglayang. Adapun mayoritas masyarakat sudah mendukung kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang dengan menggunakan produk yang terbuat dari bahan daur ulang. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa masyarakat mendukung keberlanjutan Bank Sampah Wargi Manglayang. Masyarakat Kelurahan Palasari yang mendaftar sebagai anggota dan berkontribusi secara langsung dalam mengelola sampah sudah mengimplementasikan peran mereka seutuhnya. Sebagian dari mereka memiliki kapasitas menjadi relawan untuk mengumpulkan, memilah, mendaur ulang, serta membantu dalam pengelolaan keuangan dan administrasi Bank Sampah Wargi Manglayang secara mandiri.

3.5. Sistem Sumber Bank Sampah Wargi Manglayang

Sistem sumber merupakan aspek lain yang dapat mendukung kebijakan bank sampah, sebab sistem sumber dapat menjadi modal bagi suatu kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kelurahan Palasari sudah berupaya memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang memfasilitasi pembentukan dan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang. Hal ini terlihat dari pemberian insentif pajak atau subsidi oleh pemerintah Kelurahan Palasari kepada Bank Sampah Wargi Manglayang serta memberikan bantuan teknis dalam pendirian dan operasionalnya.

Kemudian, sistem sumber yang mendukung Bank Sampah Wargi Manglayang adalah pihak swasta. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pihak swasta memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, pembinaan, atau pendampingan kepada Bank Sampah Wargi Manglayang. Pihak swasta juga dalam beberapa kesempatan menjadi mitra dalam pengolahan sampah yang dihasilkan oleh Bank Sampah Wargi Manglayang. Kemitraan dengan pihak swasta ini juga salah satunya didukung oleh pemerintah Kelurahan Palasari yang dalam beberapa kesempatan, melibatkan pihak swasta dalam berbagai program pembangunan di Kelurahan Palasari.

Adapun sebagian informan memberikan keterangan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang juga memperoleh dukungan dari lembaga sosial. Lembaga sosial seperti organisasi non-pemerintah atau lembaga amal yang memberikan dukungan berupa sumbangan dana, pemasaran produk daur ulang bank sampah, serta menjadi relawan dalam kegiatan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang menjadi indikasi terdapatnya sistem sumber yang berasal dari pihak lokal.

4. Pembahasan

Chambers & Bonk (2013), Noviaty (2013), dan Rohmawati (2015) menjelaskan bahwa kebijakan sosial adalah tindakan yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, memperbaiki kondisi hidup masyarakat, atau mengatasi masalah-masalah sosial. Kebijakan sosial biasanya bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial, melindungi hak-hak individu, dan mengatasi ketidaksetaraan serta masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat (Chambers & Bonk, 2013; Noviaty, 2013; Rohmawati, 2015). Aboejoewono (1985), Gelbert & Dwi (1996), dan Indriati (2015)

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

menambahkan kebijakan sosial dapat mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, perlindungan anak dan keluarga, layanan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan banyak lagi. Tujuan utama dari kebijakan sosial adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang rentan atau membutuhkan dukungan tambahan (Aboejoewono, 1985; Gelbert & Dwi, 1996; Indriati, 2015).

Selain itu, kebijakan sosial juga dapat melibatkan alokasi sumber daya publik, perubahan dalam peraturan dan undang-undang, serta berbagai program dan inisiatif yang ditujukan untuk mencapai hasil sosial yang diinginkan (Anwar, 2005; Chambers & Bonk, 2013). Dalam banyak kasus, Kardono (2007) dan Hariyani & Soemarno (2013) menjelaskan kebijakan sosial dapat berfokus pada pencegahan masalah sosial, perbaikan kondisi hidup, dan pemulihan sosial. Penting untuk diingat bahwa kebijakan sosial sangat bervariasi antara negara-negara dan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai, prioritas, dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Selain itu, kebijakan sosial juga dapat berkembang seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan dalam masyarakat dan tantangan sosial yang baru muncul.

Dalam konteks bank sampah, Tchobanoglous (1993), Chambers & Bonk (2013), Noviaty (2013), dan Yuliasuti (2013) memaparkan kebijakan sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah dan strategi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang terlibat dalam kegiatan bank sampah. Kebijakan sosial dalam bank sampah dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks lokal, kebutuhan masyarakat, dan sumber daya yang tersedia. Tujuannya adalah untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan bank sampah serta memastikan bahwa manfaatnya tersedia secara adil bagi semua pihak yang terlibat.

4.1. *Legislasi Bank Sampah Wargi Manglayang*

Chambers & Bonk (2013) dan Mawaddah (2016) memaparkan bahwa legislasi dalam kebijakan dapat didefinisikan sebagai peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif untuk mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dalam suatu negara atau wilayah. Legislasi ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem hukum yang adil, teratur, dan efektif dalam mengatur hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat (Chambers & Bonk, 2013; Mawaddah, 2016). Legislasi dalam kebijakan juga dapat mencakup aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mengatur tindakan dari pemerintah itu sendiri. Chambers & Bonk (2013) dan Mawaddah (2016) menambahkan bahwa legislasi dalam kebijakan juga harus didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu. Selain itu, legislasi juga harus dapat dijalankan dan ditegakkan secara efektif agar dapat mencapai tujuan dan manfaat yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Sementara Selintung, Rahmi, & Rombe (2015) dan Saputra & Mulasari (2017) menyebutkan bahwa legislasi mengenai kebijakan bank sampah adalah suatu aturan atau peraturan yang dirumuskan dan diberlakukan oleh pemerintah yang mengatur tentang operasional dan tata kelola bank sampah. Legislasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Selintung, Rahmi, & Rombe (2015) dan Saputra & Mulasari (2017) menambahkan bahwa legislasi dalam kebijakan bank sampah juga dapat melibatkan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga pemerintah terkait, serta komunitas dan masyarakat setempat. Proses legislatif dan konsultasi publik penting dilakukan untuk memastikan bahwa legislasi yang disusun mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas (Selintung, Rahmi, & Rombe, 2015; Saputra & Mulasari, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, Bank Sampah Wargi Manglayang merupakan bentuk respon dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, sebab Bank Sampah Wargi Manglayang didirikan akibat adanya ketidakpuasan dari masyarakat Kelurahan Palasari mengenai permasalahan sampah. Hal ini terlihat dari adanya operasional Bank Sampah Wargi Manglayang yang sudah berjalan selama 14 tahun. Tidak hanya itu, dukungan Bank Sampah Wargi Manglayang terhadap legislasi yang ada dapat dilihat salah satunya dari keterlibatan Bank Sampah

Wargi Manglayang dalam lomba Bandung Green and Clean dan menjadi juara. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pemaparan Chambers & Bonk (2013), Selintung, Rahmi, & Rombe (2015), Mawaddah (2016), dan Saputra & Mulasari (2017) yang membahas mengenai legislasi yang mengatur tentang pendirian dan pengelolaan bank sampah. Adanya legislasi tentang pendirian dan pengelolaan Bank Sampah Wargi Manglayang yang optimal sangat penting dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi masalah sampah. Legislasi yang baik dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk memfasilitasi pendirian dan pengelolaan Bank Sampah Wargi Manglayang secara efektif. Adanya legislasi yang memadai, juga dapat memberikan dampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Palasari.

Hasil penelitian selanjutnya adalah adanya legislasi yang mengatur tentang jenis sampah yang diterima dan dihargai oleh Bank Sampah Wargi Manglayang. Implementasi legislasi tersebut sudah dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari, sebab sebagian masyarakat sudah melihat manfaat atau insentif ekonomis dalam memilah sampah. Keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari juga didukung oleh optimalnya pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh mengenai manfaat dari bank sampah bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Salah satu faktor yang menjadi mendukung optimalisasi sosialisasi tersebut adalah intensitas pelaksanaan, yaitu dilakukan tiga kali dalam satu bulan. Legislasi yang optimal memungkinkan mengatasi pengelolaan limbah berbahaya dengan cukup baik. Limbah berbahaya yang tidak dibuang atau didaur ulang dengan tepat dapat mengancam kesehatan dan lingkungan, serta meningkatkan risiko kecelakaan industri. Hal ini juga menjadi alasan Keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari sudah cukup besar.

Pemaparan hasil tersebut sejalan dengan Chambers & Bonk (2013), Selintung, Rahmi, & Rombe (2015), Mawaddah (2016), dan Saputra & Mulasari (2017) yang membahas mengenai legislasi yang mengatur tentang jenis sampah yang diterima dan dihargai serta intensif pembiayaan dalam bank sampah. Adanya legislasi ini dapat mengatur pengolahan sampah oleh Bank Sampah Wargi Manglayang dengan baik, sebab legislasi ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012. Selain itu, legislasi ini juga mendorong pemberian insentif kepada Bank Sampah Wargi Manglayang, antara lain melalui pembiayaan yang intensif. Bank Sampah Wargi Manglayang dapat memperoleh pembiayaan atau bantuan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pihak swasta untuk meningkatkan operasional dan pengelolaan sampah. Bantuan dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian alat pengolah sampah seperti mesin daur ulang, tempat penampungan, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah juga mendorong Bank Sampah Wargi Manglayang untuk menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, termasuk bank, untuk memperoleh pembiayaan yang optimal. Kerjasama ini dapat meliputi fasilitas pinjaman dengan bunga yang rendah atau tanpa bunga, serta program kredit dengan syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Bank Sampah Wargi Manglayang.

Berikutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa legislasi Bank Sampah Wargi Manglayang sudah memiliki kemampuan untuk memperluas operasi mereka dengan memanfaatkan sebaik mungkin pembiayaan yang ada. Tidak hanya itu, masyarakat yang menjadi anggota juga sudah menerima intensif pembiayaan, sehingga mereka memiliki cukup modal untuk membeli alat pengumpulan dan pemrosesan sampah yang lebih efisien. Beberapa informan juga menambahkan hasil temuan penelitian, yaitu adanya intensif pembiayaan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang mendukung anggota menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam pengumpulan dan pengolahan sampah. Hal ini disebabkan adanya keuangan yang memadai, anggota bisa memperkenalkan teknologi atau metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang.

Pemaparan ini sudah memiliki kesesuaian dengan Chambers & Bonk (2013), Selintung, Rahmi, & Rombe (2015), Mawaddah (2016), dan Saputra & Mulasari (2017) yang membahas mengenai legislasi yang mengatur tentang pengawasan dan penegakan hukum dalam bank sampah. Dengan adanya pengawasan yang optimal, Bank Sampah Wargi Manglayang akan bekerja secara efektif dalam mengumpulkan, mengelola, dan daur ulang sampah. Hal ini dapat mengurangi jumlah sampah yang

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

masuk ke tempat pembuangan akhir atau limbah di Kelurahan Palasari. Dalam legislasi ini, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat dijadikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diajarkan untuk memilah sampah dan menyumbangkannya ke Bank Sampah Wargi Manglayang, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi sampah. Dengan adanya Bank Sampah Wargi Manglayang yang terorganisir dan diawasi secara optimal, masyarakat dapat memanfaatkan sampah sebagai sumber penghasilan tambahan. Dalam legislasi ini, Bank Sampah Wargi Manglayang juga dapat menjual sampah yang telah diolah kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kelurahan Palasari.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakkan hukum terhadap Bank Sampah Wargi Manglayang. Mereka dapat melakukan inspeksi, audit, atau pengawasan langsung untuk memastikan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pihak kepolisian dan aparat penegak hukum juga memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dapat terjadi di Bank Sampah Wargi Manglayang. Jika terdapat indikasi pelanggaran hukum, seperti penipuan, pencucian uang, atau pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, pihak kepolisian dapat melakukan investigasi dan menindak pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya legislasi yang mengatur dan pengawasan yang optimal, diharapkan Bank Sampah Wargi Manglayang dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan tujuannya, yaitu mengelola sampah secara efisien, menjaga lingkungan hidup, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

4.2. Isu dan Tujuan Bank Sampah Wargi Manglayang

Susanto, Lailatul, & Pahroni (2010), Rizal (2011), dan Chambers & Bonk (2013) memaparkan bahwa latar belakang adalah informasi dan kondisi yang relevan yang telah ada sebelum perumusan kebijakan. Ini mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mempengaruhi masalah yang harus diselesaikan oleh kebijakan tersebut. Sementara tujuan dalam kebijakan adalah hasil atau perubahan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Tujuan ini harus jelas, terukur, dan spesifik agar dapat dinilai keberhasilannya. Tujuan kebijakan dapat berkaitan dengan perbaikan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan masalah yang ada, atau mencapai tujuan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi yang merumuskan kebijakan (Susanto, Lailatul, & Pahroni, 2010; Rizal, 2011; Chambers & Bonk, 2013).

Kemudian Rizal (2011), Chambers & Bonk (2013), dan Yudistirani (2015) menambahkan bahwa latar belakang utama kebijakan bank sampah adalah masalah lingkungan yang terkait dengan pengelolaan sampah. Penumpukan sampah yang berlebihan, pencemaran lingkungan, dan masalah terkait limbah padat semakin memprihatinkan. Kebijakan bank sampah dirancang sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih dan sehat juga menjadi faktor latar belakang kebijakan bank sampah (Rizal, 2011; Chambers & Bonk, 2013; Yudistirani, 2015). Dengan semakin banyaknya informasi tentang dampak negatif sampah terhadap lingkungan, masyarakat mulai mencari cara untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Bank sampah memiliki potensi ekonomi yang signifikan, dengan mendaur ulang sampah, bank sampah dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat, terutama mereka yang terlibat dalam proses pengumpulan dan pengolahan sampah. Hal ini juga dapat membantu mengurangi kemiskinan (Rizal, 2011; Chambers & Bonk, 2013; Yudistirani, 2015).

Hasil penelitian berikut memiliki kesamaan penjelasan dari Susanto, Lailatul, & Pahroni (2010), Rizal (2011), Chambers & Bonk (2013), dan Yudistirani (2015) yang membahas mengenai isu yang dicantumkan dalam pencetus sebuah kebijakan bank sampah. Isu yang timbul dalam mendirikan Bank Sampah Wargi Manglayang adalah mengurangi dampak lingkungan. Didukung oleh keterangan Kepala Kelurahan Palasari, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat membantu mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Dengan mendaur ulang atau memilah sampah, Bank Sampah Wargi Manglayang membantu mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, menghindari pencemaran tanah dan air serta mengurangi produksi emisi gas rumah kaca. Adapun keterangan lain pendirian Bank Sampah Wargi Manglayang yaitu mengurangi penggunaan sumber

daya alam, sebab dengan mendaur ulang sampah, Bank Sampah Wargi Manglayang membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berharga seperti air, kayu, atau bahan bakar fosil. Dengan meminimalkan penggunaan sumber daya baru, bank sampah berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan.

Kemudian, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat menjadi media masyarakat Kelurahan Palasari untuk diajarkan tentang pentingnya sikap peduli terhadap lingkungan. Dengan bertindak sebagai katalisator perubahan, Bank Sampah Wargi Manglayang membantu mengubah paradigma masyarakat dari pola pikir "membuang saja" menjadi mengelola sampah dengan bijaksana. Selain itu, bank sampah juga mendorong dan memfasilitasi aktivitas daur ulang. Dengan memberikan insentif ekonomi seperti pembelian sampah, Bank Sampah Wargi Manglayang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan daur ulang dan memastikan bahwa lebih banyak sampah didaur ulang, bukan dibuang begitu saja. Dengan begitu, Bank Sampah Wargi Manglayang juga memungkinkan untuk memberikan pendapatan tambahan masyarakat yang menjadi anggota sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Pemaparan hasil tersebut juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh Susanto, Lailatul, & Pahroni (2010), Rizal (2011), Chambers & Bonk (2013), dan Yudistirani (2015) yang membahas mengenai isu yang dicantumkan dalam pencetus sebuah kebijakan bank sampah. Hal ini sesuai karena masyarakat yang memiliki edukasi mengenai lingkungan, akan menjadi agen perubahan bagi masyarakat lain untuk menerapkan pola hidup sehat, bahkan dalam jangka panjang, agen perubahan dapat menciptakan agen perubahan lain dan memelihara Bank Sampah Wargi Manglayang agar mendukung pembangunan berkelanjutan.

Salah satu tujuan utama kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang adalah mengelola sampah dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Ini mencakup pengurangan jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan peningkatan dalam daur ulang bahan-bahan dari sampah. Kebijakan bank sampah bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah yang tidak terkendali. Dengan memproses sampah secara benar, polusi lingkungan dapat diminimalkan. Bank Sampah Wargi Manglayang memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam upaya pengelolaan sampah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran lingkungan mereka dan memberikan peluang ekonomi tambahan. Kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang seringkali juga memiliki tujuan pendidikan dan edukasi. Melalui program pendidikan lingkungan, masyarakat dapat belajar tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar dan dampaknya terhadap lingkungan.

Selanjutnya, diperoleh informasi mengenai implementasi tujuan dari Bank Sampah Wargi Manglayang. Hal ini terlihat dari pemaparan Kepala Kelurahan Palasari yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Bank Sampah Wargi Manglayang sudah optimal, bahkan dalam tiga tahun terakhir, Bank Sampah Wargi Manglayang berhasil mengurangi penumpukan sampah di Kelurahan Palasari sebesar 30%. Dengan demikian, dalam jangka panjang, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat mencegah pencemaran lingkungan, terutama melalui pembusukan sampah organik yang menghasilkan gas metana dan berpotensi mengancam kesehatan masyarakat Kelurahan Palasari.

Susanto, Lailatul, & Pahroni (2010), Rizal (2011), Chambers & Bonk (2013), dan Yudistirani (2015) menyatakan bahwa implementasi dari sebuah kebijakan sejalan dengan isunya, sebab implementasi kebijakan menjadi respon dari isu yang ingin diselesaikan. Apabila implementasinya tidak sejalan dengan isu, maka kebijakan tersebut akan menjadi abstrak, bahkan berpotensi menimbulkan isu baru yang regresif. Seperti halnya implementasi kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang mengenai pengelolaan sampah. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang dapat mengurangi dampak negatif dari penumpukan sampah sekaligus menjaga kesehatan masyarakat Kelurahan Palasari.

Kemudian, hasil penelitian juga menyebutkan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang yang dikelola dengan baik membuat masyarakat yang menjadi anggota memperoleh peluang untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui penjualan sampah yang didaur ulang. Selain itu, pengelolaan yang baik juga membuat kesempatan untuk melibatkan komunitas dalam kegiatan daur ulang menjadi lebih besar, sehingga kegiatan ekonomi lokal yang berhubungan dengan pengelolaan sampah mengalami perkembangan. Tidak hanya itu, keterangan dari beberapa masyarakat Kelurahan

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

Palasari yang juga menjadi penggiat lingkungan adalah dampak dari operasional Bank Sampah Wargi Manglayang yang sudah baik membuat citra Bank Sampah Wargi Manglayang sudah dipandang baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat cenderung ingin terlibat, terutama dalam hal edukasi lingkungan. Hal ini terjadi salah satunya masyarakat Kelurahan Palasari merasa sudah ada contoh nyata yang menjadi pendorong perubahan perilaku mereka untuk hidup sehat dan bersih serta menjaga kelestarian lingkungan melalui edukasi terkait pengolahan sampah.

Berlanjut dari pemaparan Susanto, Lailatul, & Pahroni (2010), Rizal (2011), Chambers & Bonk (2013), dan Yudistirani (2015) sebelumnya, adanya implementasi kebijakan mengenai pengolahan sampah yang optimal di Bank Sampah Wargi Manglayang, menjadikan hal ini sebagai salah satu pemicu efek domino dalam masyarakat Kelurahan Palasari. Efek domino yang dimaksud pertama adalah bertambahnya potensi ekonomi bagi anggota. Hal ini terjadi akibat pengolahan yang optimal, membuat hasil dari bank sampah pun optimal, sehingga memberikan manfaat signifikan terhadap anggota, terutama dalam aspek perekonomian. Kemudian, dampak yang berhubungan dengan aspek perekonomian ini menimbulkan efek domino yang kedua, yaitu citra positif dari masyarakat Kelurahan Palasari. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Kelurahan Palasari memiliki asas *seeing is believing*, yaitu mereka akan mempercayai dan mengikuti suatu kebijakan, jika sudah ada contoh nyata yang membuktikan. Asas *seeing is believing* ini juga merupakan bagian dari penilaian masyarakat terhadap Bank Sampah Wargi Manglayang. Tidak hanya itu, karena masyarakat percaya dan mau terlibat seutuhnya dalam bank sampah, maka ada keinginan untuk mempelajari edukasi lingkungan secara mendalam, sehingga hal ini berpotensi menyelesaikan isu dari pencetus kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang yang telah dibahas sebelumnya.

4.3. Keterlibatan Anggota Bank Sampah Wargi Manglayang

Schultz, Oskamp, & Mainieri (1995), Syafrudin (2004), Damanhuri (2010), dan Chambers & Bonk (2013) Partisipasi dalam kebijakan adalah sebuah proses di mana individu-individu dan kelompok-kelompok yang terkena dampak langsung dari kebijakan atau program mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tersebut. Partisipasi dalam kebijakan menekankan adanya inklusi dan keterlibatan penuh dari semua pihak yang terdampak dalam proses pengambilan keputusan, daripada hanya mengandalkan pihak berwenang atau ahli kebijakan untuk membuat keputusan atas nama mereka (Schultz, Oskamp, & Mainieri, 1995; Syafrudin, 2004; Damanhuri, 2010; Chambers & Bonk, 2013).

Suarna (2008), Sarudji (2010), dan Rondiyah & Rahardjo (2014) menyatakan partisipasi dalam kebijakan juga didasarkan pada prinsip bahwa individu dan kelompok yang terlibat dalam suatu kebijakan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bernilai dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih responsif dan relevan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terdampak. Partisipasi dalam kebijakan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan, pemerintah dan organisasi lain yang terlibat dalam pembuatan kebijakan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan mereka. Partisipasi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan menyampaikan masukan serta keluhan mereka jika diperlukan (Suarna, 2008; Sarudji, 2010; Rondiyah & Rahardjo, 2014).

Schultz, Oskamp, & Mainieri (1995), Syafrudin (2004), Damanhuri (2010), dan Chambers & Bonk (2013) menambahkan bahwa partisipasi dalam kebijakan bank sampah sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan program ini. Partisipasi dari berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan meningkatkan pengelolaan limbah. Salah satu bentuk partisipasi dalam kebijakan bank sampah adalah dengan menjadi anggota bank sampah. Masyarakat dapat menyumbangkan sampah mereka ke bank sampah dan mendapatkan imbalan berupa poin atau uang.

Dengan menjadi anggota bank sampah, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program ini dan juga berperan dalam melindungi lingkungan.

Adapun Zeng (2005), Thanh (2010), dan Sari & Mulasari (2017) menjelaskan partisipasi masyarakat dalam kebijakan bank sampah juga dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak terkait, seperti sekolah atau organisasi lingkungan, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan manfaat dari bank sampah. Dengan adanya pemahaman yang luas tentang masalah sampah dan pentingnya pengelolaannya, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kebijakan bank sampah. Selain masyarakat, pihak dunia usaha juga dapat berpartisipasi dalam kebijakan bank sampah dengan menjadi mitra atau sponsor bank sampah. Misalnya, perusahaan dapat memberikan dukungan finansial atau fasilitas untuk operasional bank sampah. Dengan demikian, bank sampah dapat beroperasi dengan lebih efisien dan dapat menampung lebih banyak sampah (Zeng, 2005; Thanh, 2010; Sari & Mulasari, 2017).

Selain itu, partisipasi dalam kebijakan bank sampah juga dapat dilakukan melalui peran aktif pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung dan mendorong pengembangan bank sampah (Zeng, 2005; Thanh, 2010; Sari & Mulasari, 2017). Pemerintah dapat memberikan insentif atau fasilitas bagi bank sampah, seperti pembebasan pajak atau bantuan teknis. Selain itu, pemerintah juga dapat mengatur aturan yang melindungi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program bank sampah. Dengan partisipasi yang aktif dari berbagai pihak, kebijakan bank sampah dapat berhasil dalam mengatasi masalah sampah yang ada di masyarakat. Melalui partisipasi ini, sampah dapat dikelola dengan lebih efektif, limbah dapat dikurangi, dan lingkungan dapat terjaga dengan baik (Zeng, 2005; Thanh, 2010; Sari & Mulasari, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan, keterlibatan pemerintah Kelurahan Palasari dalam kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang menjadi hal penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pendirian dan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang, meliputi aturan perlindungan lingkungan, izin usaha, dan mekanisme pengawasan. Peran ini merupakan regulator pemerintah Kelurahan Palasari yang telah diimplementasikan dalam bank sampahnya. Sementara itu, pemerintah Kelurahan Palasari juga memberikan dana dan subsidi bagi Bank Sampah Wargi Manglayang untuk meningkatkan kapasitas operasional dan pengembangan program. Subsidi ini berupa bantuan keuangan, pembebasan pajak, atau bantuan logistik seperti truk pengangkut sampah. Pemerintah juga dalam beberapa kesempatan menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk mendukung program-program di Kelurahan Palasari. Hal ini meliputi penyaluran bantuan logistik, pendanaan, atau penggunaan teknologi modern. Oleh sebab itu, dalam Bank Sampah Wargi Manglayang, pemerintah Kelurahan Palasari telah mengupayakan menjalin kerjasama dengan sektor swasta, terutama dalam penyediaan alat pencacah sampah dan penampungan bagi sampah yang bersifat cair dalam Bank Sampah Wargi Manglayang.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam Bank Sampah Wargi Manglayang sebagian sudah selaras dengan Schultz, Oskamp, & Mainieri (1995), Syafrudin (2004), Zeng (2005), Suarna (2008), Damanhuri (2010), Sarudji (2010), Thanh (2010), Chambers & Bonk (2013), Rondiyah & Rahardjo (2014), dan Sari & Mulasari (2017). Namun masih terdapat beberapa hal yang belum diterapkan oleh pemerintah Kelurahan Palasari. Pemerintah Kelurahan Palasari belum melibatkan instansi pendidikan dan mengadakan pelatihan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kelurahan Palasari terkait pengelolaan sampah, daur ulang, dan manajemen Bank Sampah Wargi Manglayang. Padahal, hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan memberikan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan Bank Sampah Wargi Manglayang.

Keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari dalam kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang juga menjadi hal penting untuk kesuksesan dan keberlanjutan program. Masyarakat Kelurahan Palasari berpartisipasi aktif memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang. Mereka dapat membantu meningkatkan jumlah dan kualitas bahan daur ulang yang masuk ke Bank Sampah Wargi Manglayang. Adapun mayoritas masyarakat sudah mendukung kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang dengan menggunakan produk yang terbuat

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

dari bahan daur ulang. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa masyarakat mendukung keberlanjutan Bank Sampah Wargi Manglayang. Masyarakat Kelurahan Palasari yang mendaftar sebagai anggota dan berkontribusi secara langsung dalam mengelola sampah sudah mengimplementasikan peran mereka seutuhnya. Sebagian dari mereka memiliki kapasitas menjadi relawan untuk mengumpulkan, memilah, mendaur ulang, serta membantu dalam pengelolaan keuangan dan administrasi Bank Sampah Wargi Manglayang secara mandiri.

Sebagian besar partisipasi masyarakat Kelurahan Palasari sejalan dengan pemaparan Schultz, Oskamp, & Mainieri (1995), Syafrudin (2004), Zeng (2005), Suarna (2008), Damanhuri (2010), Sarudji (2010), Thanh (2010), Chambers & Bonk (2013), Rondiyah & Rahardjo (2014), dan Sari & Mulasari (2017). Hal ini dapat terlihat dari jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Bank Sampah Wargi Manglayang yang sudah banyak. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat seperti mengikuti program edukasi dan menggunakan produk daur ulang juga sudah dilakukan secara optimal, akibatnya keberadaan Bank Sampah Wargi Manglayang dapat memberikan dampak progresif. Dalam hal mengikuti program edukasi, dibutuhkan faktor pendukung lain seperti keterlibatan pemerintah dalam berkolaborasi dengan akademisi untuk mengadakan pelatihan dan keterampilan berbasis edukasi lingkungan. Dengan demikian, edukasi lingkungan dapat menjadi salah satu indikasi penting yang membuat masyarakat untuk memelihara keberadaan Bank Sampah Wargi Manglayang.

4.4. Sistem Sumber Bank Sampah Wargi Manglayang

Slamet (2009), Yulianto (2012), Chambers & Bonk (2013), dan Wan (2016) menyebutkan bahwa dukungan sistem sumber dalam kebijakan merujuk pada upaya pemerintah atau lembaga untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan tertentu. Sumber daya ini dapat berupa dana, tenaga kerja atau sumberdaya manusia, infrastruktur, teknologi, dan informasi. Dukungan sistem sumber sangat penting dalam kebijakan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Jika sumber daya yang diperlukan tidak cukup atau tidak efektif didistribusikan, maka kebijakan tersebut mungkin tidak dapat dijalankan dengan baik atau tidak memberikan hasil yang diharapkan (Slamet, 2009; Yulianto, 2012; Chambers & Bonk, 2013; Wan, 2016).

Yulianto (2012) dan Chambers & Bonk (2013) memberikan contoh dukungan sistem sumber dalam kebijakan adalah alokasi anggaran yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, penyediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai, pembangunan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kebijakan, penggunaan teknologi yang tepat, serta ketersediaan informasi yang akurat dan terpercaya untuk mendukung pengambilan keputusan. Yulianto (2012) dan Chambers & Bonk (2013) menambahkan dalam rangka meningkatkan dukungan sistem sumber dalam kebijakan, pemerintah atau lembaga dapat melakukan berbagai langkah seperti perencanaan anggaran yang matang, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, pengembangan infrastruktur yang terkait dengan kebijakan, investasi dalam teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, serta peningkatan sistem informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data.

Rahardyan & Widagdo (2005), Sudradjat (2006), Yuned (2016), dan Saputra (2018) menambahkan bahwa dukungan sistem sumber dalam kebijakan bank sampah menjadi hal penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan bank sampah. Dengan adanya dukungan sistem sumber ini, diharapkan bank sampah dapat berperan lebih efektif dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan kontribusinya terhadap lingkungan dan perekonomian. Dukungan sistem sumber menjadi salah satu indikasi penting dengan alasan bahwa sistem sumber dapat berperan sebagai modal pendukung dalam berbagai operasional bank sampah (Rahardyan & Widagdo, 2005; Sudradjat, 2006; Yuned, 2016; Saputra, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kelurahan Palasari sudah berupaya memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang memfasilitasi operasional Bank Sampah Wargi Manglayang. Hal ini terlihat dari pemerintah Kelurahan Palasari memberikan insentif pajak atau subsidi kepada bank sampah serta memberikan bantuan teknis dalam operasional Bank Sampah Wargi Manglayang. Kemudian, sistem sumber yang mendukung Bank Sampah Wargi Manglayang adalah pihak swasta. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pihak swasta memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan,

pembinaan, atau pendampingan kepada Bank Sampah Wargi Manglayang. Pihak swasta juga dalam beberapa kesempatan menjadi mitra dalam pengolahan sampah yang dihasilkan oleh Bank Sampah Wargi Manglayang. Kemitraan dengan pihak swasta ini juga salah satunya didukung oleh pemerintah Kelurahan Palasari yang dalam beberapa kesempatan, melibatkan pihak swasta dalam berbagai program pembangunan di Kelurahan Palasari.

Adapun sebagian informan memberikan keterangan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang juga memperoleh dukungan dari lembaga sosial. Lembaga sosial seperti organisasi non-pemerintah atau lembaga amal yang memberikan dukungan berupa sumbangan dana, pemasaran produk daur ulang bank sampah, serta menjadi relawan dalam kegiatan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang menjadi indikasi terdapatnya sistem sumber yang berasal dari pihak lokal. Tetapi, sebagian informan juga menambahkan bahwa sistem sumber yang telah tersedia hanya memberikan bantuan secara periodik, artinya dukungan dari sistem sumber, terutama yang berasal dari masyarakat dan lembaga sosial di Kelurahan Palasari bersifat sementara. Hal ini dapat dipahami karena dukungan sistem sumber hanya bersifat "membantu" saja, bukan untuk menjadi pemasok utama dari Bank Sampah Wargi Manglayang.

Analisis mengenai dukungan sistem sumber dalam Bank Sampah Wargi Manglayang masih belum sesuai dengan pemaparan Rahardyan & Widagdo (2005), Sudradjat (2006), Slamet (2009), Yulianto (2012), Chambers & Bonk (2013), Wan (2016), Yuned (2016), dan Saputra (2018) secara utuh. Hal ini terlihat dari dukungan sistem sumber yang berasal dari kelompok inti Kelurahan Palasari saja, sementara kelompok yang berasal dari akademisi belum dilibatkan. Adanya keterlibatan akademisi dalam Bank Sampah Wargi Manglayang dapat membantu dalam merancang program pelatihan dan pendidikan bagi anggota Bank Sampah Wargi Manglayang. Mereka dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi anggota untuk mengelola Bank Sampah Wargi Manglayang dengan lebih efektif, termasuk dalam hal manajemen limbah dan teknik daur ulang. Akademisi juga dapat melakukan penelitian dan pengembangan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Bank Sampah Wargi Manglayang. Mereka dapat mencari solusi baru dalam hal teknologi daur ulang, manajemen limbah, pemasaran produk daur ulang, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, keterlibatan akademisi dapat membantu Bank Sampah Wargi Manglayang untuk membangun jaringan dan kolaborasi dengan pihak lain, seperti perusahaan swasta, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Hal ini dapat membantu Bank Sampah Wargi Manglayang untuk meningkatkan aksesibilitas sumber daya, dukungan teknis, dan peluang kerjasama dalam penanganan dan pemanfaatan sampah. Melalui keterlibatan akademisi, Bank Sampah Wargi Manglayang juga dapat mendapatkan pengakuan dan legitimasi yang lebih luas dari masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan reputasi Bank Sampah Wargi Manglayang sebagai lembaga yang berkontribusi positif dalam pengelolaan sampah dan lingkungan (Rahardyan & Widagdo, 2005; Sudradjat, 2006; Slamet, 2009; Yulianto, 2012; Chambers & Bonk, 2013; Wan, 2016; Yuned, 2016; Saputra, 2018).

5. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa legislasi Bank Sampah Wargi Manglayang yang ada sudah berjalan dengan optimal. Salah satu pendukung legislasi yang mengatur tentang bank sampah adalah kesadaran masyarakat Kelurahan Palasari dan keterlibatan aktif dalam memisahkan sampah dan memanfaatkannya melalui Bank Sampah Wargi Manglayang. Dengan kesadaran dan keterlibatan aktif dari masyarakat, Bank Sampah Wargi Manglayang mudah untuk beroperasi secara efektif. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga menjadi pendukung lain dalam implementasi legislasi ini. Adanya fasilitas dan sarana yang memadai, seperti tempat pengumpulan sampah, perlengkapan pemilahan sampah, dan proses pendaur ulang, membuat Bank Sampah Wargi Manglayang dapat berfungsi optimal. Selain itu, kebijakan dan regulasi terkait Bank Sampah Wargi Manglayang yang jelas dan seragam juga menjadi pendukung.

Hasil penelitian mengenai isu dan implementasi tujuan Bank Sampah Wargi Manglayang sudah sesuai dengan konseptual. Kesimpulan yang peneliti ambil mengenai Bank Sampah Wargi

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

Manglayang telah diperkenalkan sebagai solusi untuk mengelola sampah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di Kelurahan Palasari. Beberapa penyebab Bank Sampah Wargi Manglayang sudah optimal antara lain adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Bank Sampah Wargi Manglayang dan manfaatnya dalam pengelolaan sampah, infrastruktur yang memadai, dan insentif imbalan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam Bank Sampah Wargi Manglayang.

Kesimpulan yang dapat diambil selanjutnya adalah keterlibatan anggota dalam kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang sudah optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang sudah optimal antara lain adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, adanya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat bank sampah, serta adanya insentif yang memadai untuk mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat juga pendukung seperti peran pemerintah dalam mengembangkan Bank Sampah Wargi Manglayang dan belum adanya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan baik antara pemerintah dan masyarakat. Kesimpulan selanjutnya dari keterlibatan anggota dalam Bank Sampah Wargi Manglayang adalah pemerintah perlu meningkatkan upaya dan komitmen mereka dalam mempromosikan dan mendukung Bank Sampah Wargi Manglayang.

Adapun kesimpulan terakhir mengenai analisis kebijakan adalah bahwa sistem sumber dalam Bank Sampah Wargi Manglayang sudah memadai. Dengan adanya sistem sumber yang memadai, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat mengoptimalkan proses pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pengolahan dan pemanfaatan. Sistem sumber yang baik mencakup infrastruktur yang memadai, seperti kontainer sampah dan alat pengangkut, serta personel yang terlatih untuk melakukan kegiatan tersebut. Selain itu, sistem sumber juga mencakup pembiayaan yang cukup untuk menjalankan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang. Dengan adanya dukungan sistem sumber yang memadai, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat beroperasi secara efisien dan efektif dalam mengelola sampah serta meningkatkan kontribusi mereka dalam pengurangan limbah dan pelestarian lingkungan.

6. Saran

Dalam membantu memelihara legislasi Bank Sampah Wargi Manglayang yang optimal, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memisahkan sampah dan manfaat dari bank sampah. Pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur yang memadai dan memberikan insentif kepada masyarakat yang aktif terlibat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang. Selain itu, menciptakan kebijakan dan regulasi yang seragam dan jelas juga perlu ditingkatkan. Hal ini akan membantu menjamin keberhasilan implementasi legislasi Bank Sampah Wargi Manglayang dan menjaga konsistensi dalam program tersebut. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan legislasi Bank Sampah Wargi Manglayang dapat berjalan dengan lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dan lingkungan.

Kemudian, untuk mengoptimalkan Bank Sampah Wargi Manglayang, langkah-langkah yang harus diambil terkait isu dan tujuan adalah peningkatan pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan cara kerja Bank Sampah Wargi Manglayang; adanya dukungan dan koordinasi yang lebih baik dari pemerintah dan lembaga terkait dalam penyediaan fasilitas, regulasi, dan sumber daya untuk Bank Sampah Wargi Manglayang; adanya penyediaan insentif dan imbalan yang cukup bagi masyarakat yang aktif dalam Bank Sampah Wargi Manglayang; meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk operasional Bank Sampah Wargi Manglayang; serta meningkatkan koordinasi antara Bank Sampah Wargi Manglayang dengan pedagang sampah atau pabrik daur ulang untuk memastikan kelancaran proses pengumpulan, pemilahan, dan penjualan sampah. Dengan mengatasi kendala tersebut dan mengimplementasikan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Bank Sampah Wargi Manglayang dapat berfungsi dengan lebih optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan sampah dan lingkungan.

Untuk meningkatkan keterlibatan anggota, perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Bank Sampah Wargi Manglayang, pemberian insentif yang menarik bagi masyarakat yang aktif terlibat, pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, serta peran aktif pemerintah dalam mendukung dan mengembangkan Bank Sampah Wargi Manglayang. Dengan partisipasi anggota yang lebih optimal, diharapkan Bank Sampah Wargi Manglayang dapat berperan lebih efektif dalam mengurangi volume sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih di Kelurahan Palasari. Pemerintah juga perlu mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu Bank Sampah Wargi Manglayang dengan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti dewan pengelola limbah, dinas kebersihan, dan lembaga lingkungan hidup. Ketersediaan dan keragaman sumber daya manusia dan keuangan harus dijamin agar Bank Sampah Wargi Manglayang dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang melalui kampanye penyuluhan, pendidikan mengenai pentingnya pengelolaan sampah, dan pemberian insentif bagi masyarakat yang aktif dalam Bank Sampah Wargi Manglayang.

Saran yang dapat peneliti berikan terkait sistem sumber dalam Bank Sampah Wargi Manglayang adalah pendidikan dan pelatihan yang melibatkan pihak ketiga seperti akademisi, sebab hal ini akan membantu berbagai pihak yang terlibat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang memahami dan menerapkan prosedur operasional standar dengan benar dan memaksimalkan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang ada. Selain itu, pihak swasta juga dapat mendukung dengan memberikan pendanaan yang bersifat mutualisme, seperti pembagian hasil dari produk olahan sampah dari Bank Sampah Wargi Manglayang dengan pihak swasta tersebut. Bank Sampah Wargi Manglayang juga dapat bekerja sama dengan bank sampah lainnya atau organisasi terkait untuk membentuk jaringan yang kuat. Dengan ini, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat berbagi sumber daya, inovasi, dan *best practice* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama.

Ucapan terimakasih: Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian dan penulisan artikel ini, khususnya Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang telah memberikan ilmu dan kesempatan kepada penulis untuk menulis artikel ini.

Daftar Pustaka

- Aboejoewono, A. (1985). *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*. Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus.
- Anwar, H. (2005). *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chambers, D. E. & Bonk, J. F. (2013). *Social Policy and Social Programs Sixth Edition*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- CNN Indonesia. (2023). Kebakaran TPA Sarimukti, Pemkab Bandung Barat Menyerah Padamkan Api. *Melalui*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912105522-20-997826/kebakaran-tpa-sarimukti-pemkab-bandung-barat-menyerah-padamkan-api>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication Inc.
- Damanhuri, E. (2010). *Pengelolaan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Ernawati, D.; Budiastuti, S.; & Masykuri, M. (2012). Analisis Komposisi, Jumlah dan Pengembangan Strategi Pengelolaan Sampah di Wilayah Pemerintah Kota Semarang Berbasis Analisis SWOT. *Jurnal Ekosains*, Volume 4, No. 2, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Faizah. (2008). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)* (Tesis). *Dikutip dari Eprints Undip*. Nomor Akses: 17313.
- Gelbert, P. & Dwi, S. (1996). *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan Wall Chart*. Malang: Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup.
- Hariyani, P. & Soemarno (2013). Scavengers Participation on Waste Management In The Supit Urang Landfill, Mulyorejo, Sukun, Malang. *JPAI*, Volume 4, No. 1: 1671-2338.
- Hijriah, M. R. (2020). *Berbagai Masalah Sampah Kota Bandung*. <https://fixindonesia.pikiran-yudhistira.anugerah.pratama>
- Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung*

- rakyat.com/lingkungan/pr-36571656/bermacammasalah-sampah-kota-bandung.*
- Iman, H. (2013). Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Taman Sari Kota Bandung, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*: 283-290.
- Indriati, N. (2015). Community-based Solid Waste Bank Model For Sustainable Education. *Journal of Social and Behavioral Science, Volume 224*: 158-166.
- Kabari. (2013). Menyulap Sampah menjadi Berkah. <https://kabarinews.com/utama-1menyulap-sampah-menjadi-berkah/57111> (diakses 4 Juli 2020).
- Kardono. (2007). Integrated Solid Waste Management in Indonesian. *Proccedings of International Symposium on Ecotopia Scince, ISET*: 629-633.
- Kindervatter, S. (1979). *Nonformal Education as an Empowering Process with Case Studies from Indonesia and Thailand*. New York: Center for International Education.
- Kruljac, S. (2012). Public-Private Partnership in Solid Waste Management: Sistainable Development Strategies for Brazil. *Journal of Society for Latin American Studies, Bulletin of Latin American Research, Volume 31, No. 2*: 222-236.
- Kustiah, T. (2005). *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman*. Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum.
- Mawaddah, N. (2016). Strategi Adaptasi Pemulung terhadap Dampak yang Ditimbulkan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tamangapa Kecamatan Manggala, Kota Makassar. *Skripsi. Universitas Negeri Makassar*.
- Noviaty, M. (2013). *Dampak Program Bank Sampah terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan*.
- Rahardyan, B. & Widagdo, A. S. (2005). Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan melalui Pengembangan Daur Ulang. *Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampaham di Propinsi DKI Jakarta*.
- Rizal, M. (2011). Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi Kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Danggola). *Jurnal Smart, Volume 9, No. 2*: 155-172.
- Rohmawati, D. (2015). Kewiralembagaan dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Bank Sampah Gemah Ripah, Badegan, Bantul. *Jurnal Studi Pemuda*.
- Rondiyah, S. & Rahardjo, M. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Sampah di Pasar Banjarsari Kota Pekalongan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 2, No. 3*.
- Saputra, R. K. (2018). Model Tempat Sampah Braille Dengan Sensor Suara Terhadap Ketepatan Memilah Sampah Siswa Tunanetra di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul Tahun 2018. *Karya Tulis Ilmiah Politeknik Kesehatan Yogyakarta*.
- Saputra, S. & Mulasari, S. A. (2017). Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Pengelolaan Sampah pada Karyawan di Kampus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 11, No. 1*.
- Sari, N. & Mulasari, S. A. (2017). Pengetahuan, Sikap dan Pendidikan dengan Perilaku Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. *Jurnal Medika Respati, Volume 12, No. 2*.
- Sarudji, D. (2010). *Kesehatan Lingkungan*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Sastropetro, S. (1988). *Partisipasi, Komunitas, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Schultz, P. W.; Oskamp, S.; & Mainieri, T. (1995). Who Recycles and When? A Review of Personal and Situational Factors. *Journal of Environmental Psychology, Volume 15*: 105-121.
- Selintung, M.; Rahmi, I. R.; & Rombe, R. (2015). *Studi Pengelolaan Sampah Terpadu di Tingkat Kelurahan Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang)*. Jurusan Teknik Sipil Unhas.
- Sitanggang, C. M.; Priyambada, I. B.; & Syafrudin. (2017). Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus RW 6, 7, dan 8 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang). *Jurnal Teknik Lingkungan, Volume 6, No. 1*: 1-10.
- Slamet, J. S. (2009). *Kesehatan Lingkungan Cetakan Kedelapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suarna, I. W. (2008). Model Penanggulangan Masalah Sampah Perkotaan dan Perdesaan. *Seminar dan Lokakarya Dies Natalis Universitas Udayana*.
- Sudradjat. (2006). *Mengelola Sampah Kota*. Bogor: Penebar Swadaya.
- Suharto, E. (1997). *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Studi Pembangunan LSP-STKS Bandung.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Suryandari, E. Y., Djaenudin, D.; & Pribadi, M. A. (2018). Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandung: Nilai Tambah dan Potensi Ekonomi. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Volume 15 No. 3*: 195-211.
- Susanto, R.; Lailatul, N.; & Pahroni, R. (2010). Hubungan Pengetahuan terhadap Pengelolaan Sampah Organik dan Non Organik pada Masyarakat RW 03, Sumbersari Malang. *Jurnal Keperawatan, Volume 1, No. 1*.
- Suwerda, B. (2012). *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan) Disertai Penerapan Bank Sampah "Gemah Ripah" di Dusun*

- Badegan Bantul*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Syafrudin. (2004). Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang). *Makalah Diskusi Interaktif: Pengelolaan Sampah Perkotaan Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP*.
- Tchobanoglous, G. (1993). *Integrated Solid Waste Management*. McGraw Hill International Edition.
- Thanh, N. P. (2010). Assessment of Plastic Waste Generation and Its Potential Recycling of Household Solid Waste in Can Tho City, Vietnam. *Journal Environ Monit Assess, Volume 175*: 23-35.
- Uphoff, N. T.; Cohen, J. M.; & Goldsmith, A. A. (1979). *Rural Development Committee: Feasibility and Application of Rural Development Participation: A State of Arth Paper*. New York: Cornell University.
- Wan, T. (2016). *Model dengan Gambar Doraemon pada Tempat Sampah dan Frekuensi Membuang Sampah di SDN Tahunan Kecamatan Umbulhar*.
- Wazir, A. W. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa.
- Yudistirani, S. A. (2015). Desain Sistem Pengelolaan Sampah melalui Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik Berdasarkan Persepsi Ibu-Ibu Rumah Tangga. *Jurnal Konversi Volume 4, No. 2*.
- Yulianto, M. Y. (2012). Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Jurnal Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang*.
- Yuliastuti. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung. *Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali, Indonesia*.
- Yuned, S. R. (2016). Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kota Bukittinggi. *Jurnal Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas Padang*.
- Zeng, Y. (2005). Characterization of Solid Waste Disposed at Columbia Sanitary Landfill in Mussouri. *Journal Waste Management & Research*.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

Muhammad Rizaldy Nugraha ^{1*}

¹ Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

* E-mail corresponding author: aldynugraha3418@gmail.com

Diterima: 12 Februari 2023 ; Disetujui: 10 Desember 2023; Diterbitkan: 27 Desember 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. (2) Mengetahui dampak dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Responden di dalam penelitian ini ada 85 responden dari Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dengan menganalisa dampak terhadap responden dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bias dilihat dari kondisi social ekonomi nya yang membaik, taraf pendidikan anaknya yang baik, status kesehatan gizi keluarga ibu dan anak yang baik dan tercukupi, dan akses kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Kata kunci: Dampak, Kesejahteraan, Program keluarga harapan, Keluarga penerima manfaat

Abstract: This study aims (1) to find out the implementation of the Family Hope Program for the welfare of Beneficiary Families (KPM) in Gambut District, Banjar Regency. (2) Knowing the impact of the implementation of the Family Hope Program on the welfare of Beneficiary Families (KPM) in Gambut District, Banjar Regency. Respondents in this study were 85 respondents from Gambut District, Banjar Regency, and this study used a descriptive qualitative method of data collection techniques by interviewing, observation, and documentation. Data analysis by analyzing the impact on respondents and SWOT analysis. The results of this study indicate that the impact of the Family Hope Program (PKH) has a positive impact on the welfare of Beneficiary Families (KPM), it can be seen from their improved socioeconomic conditions, good education levels of their children, good nutritional health status of mothers and children families and adequate, and access to adequate health and education.

Keywords: Impact, Welfare, Family Hope Program, Beneficiary Families

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia sudah melaksanakan kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) dari tahun 2007, yang mempunyai istilah lain di dunia internasional dengan sebutan *Conditional Cash Transfers* (CCT) suda terbukti cukup berhasil dalam menuntaskan kemiskinan yang dihadapi di negara-negara yang mempunyai masalah terkait kemiskinan yang tinggi.

PKH juga merupakan program bantuan yang termasuk dalam strategi utama penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini juga termasuk sebagai bantuan tunai bersyarat yang memiliki persyaratan pendidikan dan kesehatan (Irmayani et al. 2020; Setiawan et al. 2023).

PKH ini merupakan program yang bersifat berkelanjutan yang dapat mempercepat rencana pembangunan millennium atau dengan istilah Millenium Development Goals (MDGs). Yaitu penanggulangan kemiskinan, tercapainya pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan, menekan tingkat kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu.

PKH di Kabupaten Banjar sendiri mempunyai banyak KPM setiap tahunnya, namun dapat di lihat dari data yang telah di dapat oleh peneliti bahwa tiap tahunnya ada mengalami penurunan jumlah KPM. Sebagai berikut ;

Tabel 1. Daftar Kecamatan Penerima Bantuan PKH

No.	Kecamatan Penerima Bantuan PKH	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (2019)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat(2020)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (2021)
1.	Aluh – Aluh	1.610	1547	1105
2.	Aranio	290	301	283
3.	Astambul	1.120	1.082	972
4.	Beruntung Baru	832	820	451
5.	Cintapuri Darussalam	-	135	126
6.	Gambut	653	626	574
7.	Karang Intan	661	625	631
8.	Kertak Hanyar	565	543	556
9.	Martapura	885	836	785
10.	Martapura Barat	711	688	739
11.	Martapura Timur	605	603	796
12.	Mataraman	189	195	334
13.	Paramasan	202	205	90
14.	Pengaron	239	257	221
15.	Sambung Makmur	413	432	335
16.	Simpang Empat	322	207	232
17.	Sungai Pinang	393	359	201
18.	Sungai Tabuk	1.206	1.189	1179
19.	Tatah Makmur	593	563	468
20.	Telaga Bauntung	82	82	80
Jumlah Total		11.571	11.294	10.158

Dilihat dari data tabel di atas, dapat di katakan jumlah penerima bantuan PKH di semua kecamatan mengalami penurunan setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa Program Keluarga

Harapan dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Banjar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gambut dengan pertimbangan letak geografis yang berada di antara Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru menjadikan Kecamatan Gambut sebagai daerah penyangga dari kedua kota tadi. Dengan tingkat kemiskinan di kecamatan Gambut yang di asumsikan menurun seiring dengan menurun nya jumlah KPM per tahun dan adanya kebijakan PKH yang sudah ada dari tahun 2008 di Kabupaten Banjar khususnya Kecamatan Gambut, maka dari itu peneliti berniat ingin meneliti dampak yang diberikan oleh kebijakan PKH ini terhadap tingkat kesejahteraannya para keluarga penerima manfaat.

Tujuan penelitian ini (1) Untuk memahami dampak dari pelaksanaan kebijakan PKH terhadap tingkat kesejahteraan para KPM yang menjadi responden di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, (2) Mengetahui strategi apa yang digunakan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan Program Keluarga Harapan.

1.1. Program Keluarga Harapan

Menurut Kementerian Sosial, kebijakan program keluarga harapan atau di singkat PKH, termasuk salah satu program bantuan yang dikategorikan menjadi klaster utama dalam strategi untuk mengentaskan, menanggulangi, dan menekan yang kemiskinan yang ada di Indonesia (Habibullah et al., 2024).

Program ini juga termasuk dalam bantuan tunai bersyarat yang memiliki persyaratan yaitu pendidikan dan kesehatan. Manfaat PKH memberikan manfaat untuk jangka pendek dan untuk jangka panjang. Pertama untuk jangka pendeknya, Program PKH ini dapat memberikan *income effect* atau efek pendapatan kepada keluarga penerima manfaat dengan meringankan beban pengeluaran rumah tangga (Habibullah et al., 2017).

Tujuan nya untuk memaksimalkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat mengubah pandangan, kelakuan dan pemikiran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar lebih mudah untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang bertujuan untuk menghancurkan lingkaran kemiskinan.

1.2. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Soetomo (2014), “kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan, ketenteraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan tetapi juga keadilan dalam berbagai dimensi.” Kondisi yang aman akan lebih membuat kehidupan masyarakat lebih aman dari sisi sosiologi maupun psikologisnya, dimana masyarakat akan merasakan kehidupan yang mereka lalui akan menjadi nyaman, merasa terlindungi, dan bebas dari rasa ketakutan untuk esok harinya. Indikator kesejahteraan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau bias disebut (BKKBN)

kesejahteraan juga memiliki tingkatan untuk mengukur suatu kesejahteraan keluarga yang sudah dibagi menjadi lima kelompok, yaitu;

- 1) Keluarga pra sejahtera, dengan ditunjukkannya ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar dari kategori tingkatan Keluarga Sejahtera I.
- 2) Keluarga sejahtera I (kebutuhan dasar), dengan ditunjukkannya bahwa anggota keluarga mampu untuk memenuhi kebutuhan makan sehari dua kali dan lebih; mempunyai setelan pakaian yang berbeda untuk pada saat di rumah, untuk bersekolah maupun juga untuk bepergian; mempunyai kondisi tempat tinggal yang beratap, dan mempunyai lantai dan dinding yang layak; dan untuk yang terakhir mempunyai kemampuan individu membawa anggota

keluarganya yang sakit untuk berobat atau mengecek kesehatan nya ke sarana kesehatan terdekat.

- 3) Keluarga sejahtera II (kebutuhan psikologis), dengan ditunjukkannya bahwa anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing - masing; mampu untuk mengkonsumsi daging atau ikan atau telur minimal seminggu sekali; mampu membeli satu set pakaian yang baru minimal satu tahun sekali; mempunyai luas lantai rumah minimal 8 persegi untuk setiap penghuni rumahnya; dan juga dapat memastikan keadaan keluarga dalam keadaan sehat untuk tiga bulan terakhir; ada mempunyai anggota keluarga yang dapat bekerja untuk mendapatkan penghasilan; seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin; dan juga untuk pasangan diusia suburnya dengan anak dua atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.
- 4) Keluarga sejahtera III (kebutuhan pengembangan), dengan ditunjukkannya ada mempunyai keinginan upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama; kemampuan untuk menabung sebagian dari pendapatan yang dihasilkan berupa uang maupun barang; memiliki kebiasaan atau tradisi untuk makan bersama keluarga dirumah setidaknya seminggu sekali agar bisa berkomunikasi untuk saling dekat; dapat mengikuti atau memiliki waktu untuk kegiatan masyarakat; dapat menerima dan mendapatkan informasi dari berbagai media misalnya dari surat kabar, dari majalah, dari radio, dan dari televisi ataupun dari internet.
- 5) Keluarga sejahtera III Plus (aktualisasi diri), dengan ditunjukkannya mampu untuk menyumbangkan sebagian kecil materiil secara sukarela dan mampu untuk sering mengikuti kegiatan sosial; dan mempunyai salah satu anggota keluarga yang masuk dan aktif dalam kepengurusan perkumpulan masyarakat.

2. Metode

Lokasi yang menjadi tempat penelitian disini bertempat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, sebanyak 12 desa (Banyu Hiran, Guntung Papuyu, Guntung Ujung, Kayu Bawang, Keladan Baru, Makmur, Malintang, Malintang Baru, Sungai Kupang, Tambak Sirang Darat, Tambak Sirang Laut, Tambak Sirang Baru) dan 2 kelurahan (Gambut, dan Gambut Barat).

Jenis penelitian yang di gunakan untuk melakukan penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dimana metode penelitian ini memanfaatkan data kualitatif kemudian dipaparkan dengan cara deskriptif.

Populasi yang diteliti untuk penelitian ini adalah para penerima PKH di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang sudah menggunakan Program Kebijakan PKH tahun 2021 lebih tepatnya data KPM terbaru yang di data oleh pihak Dinas Sosial. Jumlah penerima bantuan PKH yang di teliti adalah sebanyak 574 KPM, Penelitian ini memakai metode *Purposive sampling* (yang juga biasa dikenal dengan sebutan *judgement*, *selective* atau *subjective sampling*) dengan menggunakan rumus slovin untuk mempermudah dalam meneliti karena banyaknya jumlah populasi yang akan di jadikan sampel, peneliti menetapkan nilai presisi sebesar 90%. Dengan rumus sebagai berikut: $n = \frac{N}{1+Na^2}$ dan mendapatkan hasil $n = \frac{574}{1+574 \cdot (10\%)^2} = 85.1632$ di bulatkan menjadi 85, Jadi jumlah sampel yang digunakan ialah 85 KPM, Selain itu untuk menentukan jumlah sampel per desa dan kelurahannya peneliti menggunakan *Stratified Random Sampling*.

Teknik pengumpulan data (1) dengan melakukan teknik wawancara, di penelitian ini sang peneliti akan melakukan wawancara secara matang, selain itu juga wawancara di lakukan secara terbuka kepada informan dengan suatu perencanaan, persiapan dan berpedoman agar wawancara jadi tertata dan tidak kaku untuk mendapatkan informasi dan data yang diterima sesuai dengan keadaan dan

kenyataan. (2) dengan melakukan teknik observasi, yaitu dengan mengamati apa saja yang terjadi yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja dan terurut mengenai fenomena sosial yang terjadi dan kemudian di catat oleh peneliti untuk di ceritakan kembali. (3) dengan melakukan teknik dokumentasi, teknik dokumentasi ini juga bisa disebut dengan teknik pengarsipan atau pengolahan yang menjadi pelengkap didalam penelitian kualitatif deskriptif setelah melakukan teknik observasi dan teknik wawancara. Dengan menelaah referensi – referensi dan mempelajari buku – buku dan jurnal – jurnal mengenai permasalahan yang sama dengan penelitian, dan juga arsip atau dokumen mengenai penelitian yang terjadi, dan yang terakhir foto – foto yang di dapat saat melakukan penelitian.

Penganalisaan data menggunakan dua metode (1) Analisa Dampak, menganalisa dampak kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan para Keluarga Penerima Manfaatnya, peneliti akan menganalisa bagaimana dampak nya terhadap para KPM ini melalui wawancara dengan membuat kuisioner yang isinya sesuai dengan indikator tingkat kesejahteraan yang di keluarkan oleh BKKBN. (2) Analisis SWOT merupakan singkatan dari empat komponen yang berbeda didalam metode analisis ini, yang pertama yang di maksud dengan S ialah *Strength* yang artinya kekuatan, yang kedua W ialah *Weakness* yang artinya kelemahan, yang ketiga ialah O ialah *Opportunities* yang artinya kesempatan, dan untuk yang terakhir T ialah *Threats* yang artinya ancaman.

3. Pembahasan dan Hasil

Dampak kebijakan PKH terhadap kesejahteraan

Dampak kebijakan PKH terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat di ukur dari indikator kesejahteraan sesuai dengan aturan dari BKKBN tingkat kesejahteraan sesuai dengan indikator yang sudah di tetapkan, dengan juga melihat perbandingan sebelum dan sesudah adanya kebijakan PKH ini.

Indikator pertama, Keluarga pra sejahtera, dengan ditunjukkannya ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar dari kategory tingkatan Keluarga Sejahtera I

Tabel 2. Indikator Pertama Sebelum dan Sesudah

Indikator Kesejahteraan	Jumlah responden (Sebelum)	Jumlah responden (Sesudah)
Keluarga Pra sejahtera	85/85	85/85

Dilihat dari tabel 2 bahwa jumlah responden sebelum maupun sesudah sudah termasuk kategori keluarga pra sejahtera., di karenakan semua responden sudah memenuhi kriteria dari indikator keluarga pra sejahtera.

Indikator kedua, Keluarga sejahtera I (kebutuhan dasar), dengan ditunjukkannya bahwa anggota keluarga mampu untuk memenuhi kebutuhan makan sehari dua kali dan lebih; mempunyai setelan pakaian yang berbeda untuk pada saat di rumah, untuk bersekolah maupun juga untuk bepergian; mempunyai kondisi tempat tinggal yang beratap, dan mempunyai lantai dan dinding yang layak; dan untuk yang terakhir mempunyai kemampuan individu membawa anggota keluarganya yang sakit untuk berobat atau mengecek kesehatan nya ke sarana kesehatan terdekat.

Tabel 3. Indikator Kedua Sebelum dan Sesudah

Indikator Kesejahteraan	Jumlah responden (Sebelum)	Jumlah responden (Sesudah)
Keluarga Sejahtera I	85/85	85/85

Dilihat dari tabel 3 bahwa jumlah responden sebelum maupun sesudah sudah termasuk kategori keluarga sejahtera I, di karenakan semua responden sudah memenuhi kriteria dari indikator keluarga sejahtera I.

Indikator ketiga, Keluarga sejahtera II (kebutuhan psikologis), dengan ditunjukkannya bahwa anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing - masing; mampu untuk mengkonsumsi daging atau ikan atau telur minimal seminggu sekali; mampu membeli satu set pakaian yang baru minimal satu tahun sekali; mempunyai luas lantai rumah minimal 8 persegi untuk setiap penghuni rumahnya; dan juga dapat memastikan keadaan keluarga dalam keadaan sehat untuk tiga bulan terakhir; ada mempunyai anggota keluarga yang dapat bekerja untuk mendapatkan penghasilan; seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin; dan juga untuk pasangan diusia suburnya dengan anak dua atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.

Tabel 4. Indikator Ketiga Sebelum dan Sesudah

Indikator Kesejahteraan	Jumlah responden (Sebelum)	Jumlah responden (Sesudah)
Keluarga Sejahtera II	19/85	47/85

Dilihat dari tabel 4 bahwa jumlah responden sebelum terdaftar di kebijakan PKH berjumlah 19 responden saja yang dapat memenuhi kriteria indikator dari keluarga sejahtera II, namun setelah terdaftar di PKH meningkat menjadi 47 responden yang sudah masuk kategori keluarga sejahtera II.

Indikator keempat, Keluarga sejahtera III (kebutuhan pengembangan), dengan ditunjukkannya ada mempunyai keinginan upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama; kemampuan untuk menabung sebagian dari pendapatan yang dihasilkan berupa uang maupun barang; memiliki kebiasaan atau tradisi untuk makan bersama keluarga dirumah setidaknya seminggu sekali agar bisa berkomunikasi untuk saling dekat; dapat mengikuti atau memiliki waktu untuk kegiatan masyarakat; dapat menerima dan mendapatkan informasi dari berbagai media misalnya dari surat kabar, dari majalah, dari radio, dan dari televisi ataupun dari internet.

Tabel 5. Indikator Keempat Sebelum dan Sesudah

Indikator Kesejahteraan	Jumlah responden (Sebelum)	Jumlah responden (Sesudah)
Keluarga Sejahtera III	0/85	27/85

Dilihat dari tabel 5 bahwa responden yang belum terdaftar di PKH tidak ada yang berhasil masuk di dalam kategori keluarga sejahtera III karena semuanya tidak memenuhi kriteria indikator dari keluarga sejahtera III, sedangkan untuk responden yang sudah terdaftar di PKH berjumlah 27 responden sudah masuk kategori keluarga sejahtera III.

Indikator kelima, Keluarga sejahtera III Plus (aktualisasi diri), dengan ditunjukkannya mampu untuk menyumbangkan sebagian kecil materiil secara sukarela dan mampu untuk sering mengikuti kegiatan sosial; dan mempunyai salah satu anggota keluarga yang masuk dan aktif dalam kepengurusan perkumpulan masyarakat.

Tabel 6. Indikator Kelima Sebelum dan Sesudah

Indikator Kesejahteraan	Jumlah responden (Sebelum)	Jumlah responden (Sesudah)
Keluarga Sejahtera III Plus	-	-

Dapat dilihat pada tabel 6 bahwa responden sebelum maupun sesudah terdaftar di PKH tidak ada satupun yang bisa masuk di kategori keluarga sejahtera III plus karena para responden tidak dapat memenuhi persyaratan dari kriteria yang sudah di tentukan dalam indikaotr keluarga sejahtera plus.

Dari hasil penelitian, dapat di tafsirkan bahwa terjadinya perubahan terhadap responden dengan adanya dampak dari kebijakan PKH. Perubahan yang terjadi pada responden ini adalah dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga responden, dengan mengukur kesejahteraan responden melalui indikator kesejahteraan milik BKKBN, dengan demikian di dapatlah pengelompokkan responden berdasarkan tingkat kesejahteraan nya;

Tabel 7. Perbandingan Responden Sebelum dan Sesudah Terdaftar di PKH

Tingkat Kesejahteraan	Jumlah Responden (Sebelum)	Persentase (%)	Jumlah Responden (Setelah)	Persentase (%)
Keluarga Prasejahtera	85	100	85	100
Keluarga Sejahtera I	85	100	85	100
Keluarga Sejahtera II	19	22	47	55
Keluarga Sejahtera III	-	-	27	32
Keluarga Sejahtera III Plus	-	-	-	-

Tabel 8 Identifikasi IFAS Kebijakan PKH Kabupaten Banjar khususnya Kecamatan Gambut

No.	Faktor Strategis Internal Strength	Penilaian					Bobot	Skor
		1	2	3	4	5		
1	Pendamping tersedia di setiap daerah					√	5	25
2	Kompetensi pendamping di tingkatkan dari waktu ke waktu				√		4	20
3	Komitmen pelayanan dari pendamping					√	5	25
4	Pengawasan berjenjang dari desa hingga pusat				√		4	20
5	Perencanaan dan penyusunan kebijakan untuk kesejahteraan KPM				√		4	20
Total Stength								110
No.	Weakness	Penilaian					Bobot	Skor
		1	2	3	4	5		
1	Akurasi data yang sebagian tidak sesuai dengan kondisi lapangan				√		4	20
2	Kecendrungan masyarakat yang puas dengan bantuan yang diberikan namun tidak antusias meningkatkan taraf hidup				√		4	20
Total Weakness								40

Tabel 9 Identifikasi EFAS Kebijakan PKH Kabupaten Banjar khususnya Kecamatan Gambut

No.	Faktor Strategis Eksternal Opportunities	Penilaian					Bobot	Skor
		1	2	3	4	5		
1	Peningkatan anggaran PKH dari tahun ke tahun				√		3	12
2	Rencana penambahan jumlah penerima PKH			√			3	9
3	Dukungan pemerintah Kab / Kota dan Provinsi				√		4	20
4	PKH didukung lintas kementerian				√		4	20
Total Opportunities								61

No.	Threats			
1	Kurangnya kesadaran KPM untuk meningkatkan kualitas hidup secara mandiri	√	3(3,5)	9
2	Kesadaran KPM terhadap partisipasi pendidikan anak masih rendah	√	3	9
3	Kondisi pandemic yang membuat bertambahnya penduduk miskin	√	4	12
Total Threats				30

Pembahasan hasil SWOT

Dalam unsur kekuatan (Strenghts) terdapat dua nilai terbesar yang menjadi faktor strategis internal nya yaitu faktor “pendamping tersedia di setiap daerah” dengan nilai 25, Kemudian faktor “komitmen pelayanan dari pendamping” dengan nilai 25.

Dalam unsur kelemahan (weakness) terdapat dua nilai besar yang menjadi faktor strategis internal nya yaitu faktor “akurasi data yang sebagian tidak sesuai dengan kondisi lapangan” dengan nilai 20, dan yang kedua faktor “kecendrungan masyarakat yang puas dengan bantuan yang diberikan namun tidak antusias meningkatkan taraf hidup” dengan nilai 20.

Dalam unsur peluang (Opporturnities) terdapat dua nilai terbesar yang menjadi faktor strategis eksternalnya yaitu faktor “dukungan pemerintah Kab/Kota dan Provinsi” dengan nilai 20, dan faktor yang kedua “PKH didukung lintas Kementerian” dengan nilai 20.

Dalam unsur ancaman terdapat 3 nilai tertinggi namun akan di ambil dua nilai tertinggi saja yang pertama yaitu faktor “kondisi pandemik yang membuat bertambahnya penduduk miskin” dengan nilai 12, yang kedua “kurangnya kesadaran KPM untuk meningkatkan kualitas hidup secara mandiri” dengan nilai 9.

Dengan menggunakan hasil dari IFAS dan EFAS dapat ditetapkan strategi yang diperlukan dengan menghubungkan dua unsur SWOT yang terkait untuk membuat strategi :

- Strategi S-O : Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
- Strategi S-T : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
- Strategi W-O:Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
- Strategi W-T :Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

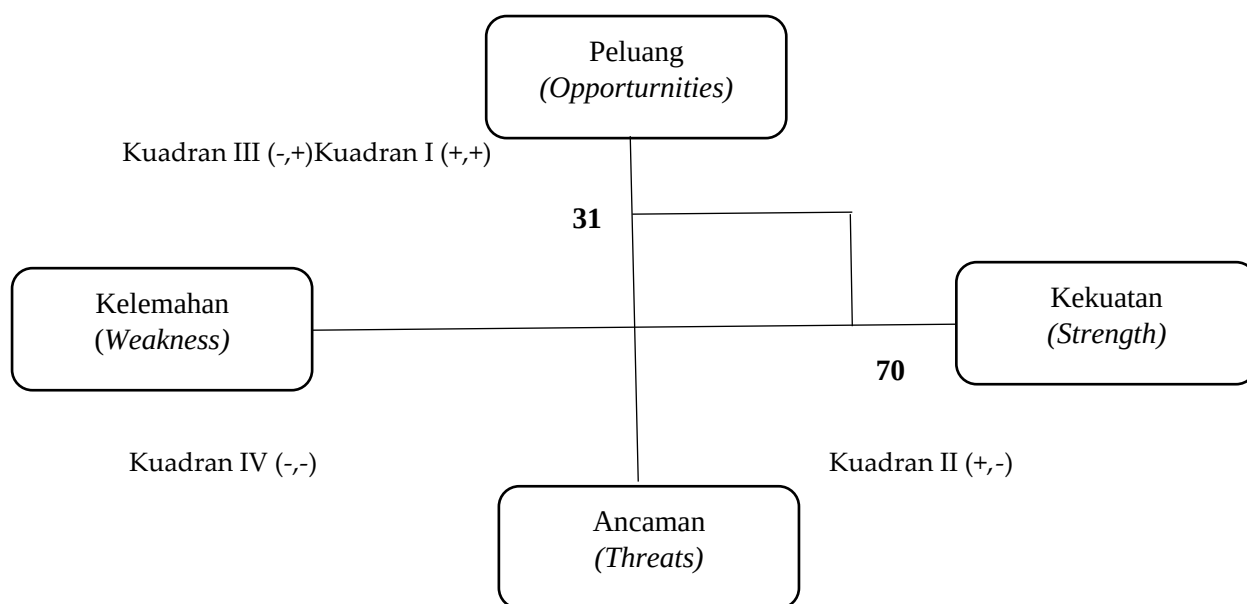
Tabel 9 Matriks SWOT

	IFAS	Strength (S)	Weakness (W)
		1. Pendamping tersedia di setiap daerah 2. Komitmen pelayanan dari pendamping	1. Akurasi data sebagian tidak sesuai dengan kondisi lapangan. 2. Kecendrungan masyarakat yang puas dengan bantuan yang diberikan namun tidak antusias meningkatkan taraf hidup
EFAS		Strenght Opportunities (SO)	Weakness Opportunities (WO)
	Opportunities (O) 1. Dukungan pemerintah Kab / Kota dan Provinsi 2. PKH didukung lintas Kementerian	1. Peningkatan pendamping disetiap daerah yang telah didukung oleh pemerintah Kabupaten, Kota, dan Provinsi	1. Peningkatan akurasi data kondisi lapangan di Kabupaten, Kota, maupun Provinsi 2. Pendamping agar meningkatkan materi – materi yang diberikan oleh

	2. Peningkatan pelayanan dari pendamping serta lintas Kementerian yang terlibat di PKH	Kementerian pusat untuk di ajarkan ke para masyarakat bahwa pentingnya taraf hidup
Threats (T)	Strenght Threats (ST)	Weakness Threats (WT)
1. Kondisi pandemik yang membuat bertambahnya penduduk miskin	1. Peningkatan pendamping PKH di saat bertambahnya masyarakat miskin	1. Peningkatan akurasi data dikala bertambahnya masyarakat miskin yang bergabung di PKH agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan di lapangan.
2. Kurangnya kesadaran KPM untuk meningkatkan kualitas hidup secara mandiri	2. Pendamping yang komitmen selalu membimbing para KPM nya agar meningkatnya kualitas hidup secara mandiri	2. Peningkatan pembelajaran materi, praktek, dll agar masyarakat sadar dan antusias untuk graduasi dari program PKH

Berdasarkan faktor internal dan eksternal strategis yang tepat untuk kebijakan PKH di Kabupaten Banjar khususnya Kecamatan Gambut ialah :

1. Strategi S-O
 - a. Peningkatan pendamping disetiap daerah yang telah didukung oleh pemerintah Kabupaten, Kota, dan Provinsi.
 - b. Peningkatan pelayanan dari pendamping serta lintas Kementerian yang terlibat di PKH
2. Strategi S-T
 - a. Peningkatan pendamping PKH di saat bertambahnya masyarakat miskin
 - b. Pendamping yang komitmen selalu membimbing para KPM nya agar meningkatnya kualitas hidup secara mandiri
3. Strategi W-O
 - a. Peningkatan akurasi data kondisi lapangan di Kabupaten, Kota, maupun Provinsi
 - b. Pendamping agar meningkatkan materi – materi yang diberikan oleh Kementerian pusat untuk di ajarkan ke para masyarakat bahwa pentingnya taraf hidup
4. Strategi W-T
 - a. Peningkatan akurasi data dikala bertambahnya masyarakat miskin yang bergabung di PKH agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan di lapangan.
 - b. Peningkatan pembelajaran materi, praktek, dll agar masyarakat sadar dan antusias untuk graduasi dari program PKH



Gambar 1. Matriks SWOT

Sumbu X = Total Kekuatan – Total Kelemahan = 110 – 40 = 70

Sumbu Y = Total Peluang – Total Ancaman = 61 – 30 = 31

Melalui perhitungan IFAS dan EFAS didapatkan hasil analisis matriks SPACE (Strategic Position And Action Evaluation – SPACE matriks), maka terlihat kuadran yang berisi strategi yang sesuai dengan kondisi atau keadaan saat ini. Dari perhitungan dapat dilihat bahwa strategi kebijakan PKH di Kabupaten Banjar khususnya Kecamatan Gambut masuk pada kuadran I yaitu Agresif / Ekspansif / Growth yang strateginya bertujuan agar terus tumbuh dengan strategi yang tepat adalah strategi S – O yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Jadi untuk strategi keberhasilan kebijakan Program Keluarga Harapan adalah dengan menggunakan strategi S – O, dimana yang pertama ialah meningkatkan pendamping di setiap daerah yang telah di dukung lintas sektor dengan menambahkan beberapa personil PKH untuk di lapangan maupun untuk pekerjaan internal nya agar bisa mendampingi para KPM bisa lebih maksimal. Mengapa diperlukan nya penambahan atau peningkatan, karena ideal nya satu pendamping merangkul 150 – 200 orang KPM dan selain mendampingi para KPM mereka juga yang memverifikasi dan memvalidasi para KPM yang sudah terdaftar di Pusdatin.

Untuk strategi keberhasilan yang kedua adalah peningkatan pelayanan dari pendamping serta lintas Kementerian yang terlibat di PKH, dengan memberikan pelatihan yang lebih matang dari pihak Kementerian Sosial di karenakan untuk beberapa tahun terakhir yang menjadi pendamping PKH bukan lah orang dengan background pendidikan sosial asli atau bisa dikatakan orang awam. Di karenakan untuk sekarang lebih banyak sukarelawan dan bekerja sambilan untuk menambah pendapatan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian di pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian yang di lakukan di Kecamatan Gambut telah berhasil dalam memberikan dampak positif untuk kesejahteraan para KPM nya, dengan melihat terjadinya peningkatan tingkat kesejahteraan keluarga responden yang awalnya keluarga pra sejahtera I dengan jumlah responden sebesar 100 % , keluarga sejahtera I sebesar 100 % , dan keluarga sejahtera II sebesar 22 % , menjadi keluarga pra sejahtera dengan jumlah sebesar 100 % , keluarga sejahtera I sebesar 100 % , keluarga sejahtera II sebesar 55 % , dan keluarga sejahtera III sebesar 32 % .

- 2) Hasil penelitian yang di lakukan juga menunjukan bahwa kebijakan PKH agar dapat lebih berhasil di perlukan nya strategi S-O dimana pemerintah harus menambah personil pendampingan PKH, karena untuk beberapa wilayah khususnya wilayah yang perlu usaha untuk dijangkau mengalami pengurangan dalam usaha pendampingannya dari PKH yang hasil nya banyak terjadi masalah seperti berbeda nya nomor NIK dengan nomor yang ada di rekening untuk penerimaan bantuan. Dan yang kedua dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat, dengan menambah wawasan pengetahuan untuk pendamping dan lainnya.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kecamatan Gambut Dalam Angka*.
- BKKBN. (2021). *Indikator Kesejahteraan*. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
- BKKBN. (2022). *Stunting*. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
- Darsono, GRM Soerjo (2014). *Modul TOT Pendamping KUBE PKH*. Jakarta: TNP2K
- Direktorat Jaminan Sosial . (2018). *Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Fernandez, Luisa (2018). *Modul Pengasuhan & Pendidikan Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Habibullah, Sugiyanto, Sitepu A, Irmayani, Susantyo B, Mujiyadi B, Nainggolan T. 2017. *Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*.
<http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/4bfa42f04ade03804a8c7469d411d5c.pdf>.
- Haryanto, Sindung. (2011). *Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta
- Irmayani NR, Susantyo B, Mujiyadi B us, Nainggolan T, Habibullah, Sugiyanto. 2020. Changes of poor family behavior through family development session. Di dalam: Annual International Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2020). Atlantis Press. hlm 22–26.
- Kementerian Sosial. (2007). *Kebijakan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial
- Kementerian Sosial. (2018). *Modul Perlindungan Anak*. Jakarta : Kementerian Sosial
- Kementerian Sosial (2018). *Modul Pengelolaan Keuangan & Perencanaan Usaha*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial (2017). *Family Development Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial
- Kementerian Sosial (2019) *Pedoman Pelaksanaan PKH*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial (2021). *Program Kewirausahaan*. Jakarta: Kementerian Sosial
- Kementerian Sosial. (2022). *Kebijakan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial
- Kementerian Sosial (2021). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Sosial
- Mu'man Nuryana, Irmayani NR, Susantyo B, B. Mujiyadi S, Togiartua Nainggolan S, Habibullah. 2020. Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia Tahun 2020 - 2024. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Nurlina T. Muhyiddin, M. Irfan Tarmizi, Anna Yulianta. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Parihatin Atin, Avita A., Susie Sugiarti (2018). *Modul Kesehatan & Gizi*. Jakarta: Kementerian Sosial
- Pracoyo, T. K. (n.d.). *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Grasindo
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Sugiyono. (2021). *Metoda Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sulasih, M. S. (2020). *Analisis SWOT*. Rizquna.
- Setiawan HH, Yuda TK, Susantyo B, Sulubere MB, Ganti M, Habibullah H, Sabarisman M, Murni R. 2023. Scaling up social entrepreneurship to reduce poverty: Exploring the challenges and opportunities through stakeholder engagement. *Front Sociol.* 8. doi:10.3389/fsoc.2023.1131762.
- Todaro Michael P. , Stephen C. Smith. (2009, 2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Yamane, T. (1967). *Elementary Sampling Theory*. Prentice Hall.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Kapabilitas Human Agency Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) Foundation Dalam Menangani Permasalahan Pendidikan di Pedalaman Banten

Meilanny Budiarti Santoso^{1,2*} , R. Nunung Nurwati² , Azlinda Azman³ , Budhi Gunawan⁴ 

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Kesejahteraan Sosial; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

² Departemen Kesejahteraan Sosial; Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

³ Social Work Programme; School of Social Science, University Sains Malaysia, Penang, Malaysia

⁴ Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

* Korespondensi: mbudiarti1305@gmail.com; Tel: (62) +81320728850

Diterima: tanggal 5 Agustus; Direvisi: tanggal 15 Agustus 2023; Diterbitkan: tanggal 27 Desember 2023

Abstrak: Kapabilitas *human agency* merupakan *issue* penting bagi pengembangan keilmuan dan praktik pekerjaan sosial, mengingat pekerjaan sosial merupakan profesi yang bersentuhan langsung dengan intervensi sosial dan salah satunya bertujuan untuk menangani permasalahan sosial ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini merupakan refleksi bagi pekerja sosial profesional berdasarkan praktik nyata penggunaan kapabilitas *human agency* dalam intervensi sosial sekaligus menunjukkan pentingnya pengarusutamaan konsepsi *human agency* dalam keilmuan pekerjaan sosial yang salah satunya berfokus pada upaya pengembangan keberfungsian sosial. Metode *explanatory* dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis kapabilitas *human agency* Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) Foundation dalam menangani permasalahan pendidikan di pedalaman Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi kapabilitas *human agency* merupakan komponen penting di antara berbagai komponen lainnya dalam menangani permasalahan yang terjadi. Kehadiran aktor dengan kapabilitas *human agency* tidak dapat dipisahkan dari kelompok ataupun organisasi sebagai wadah dalam melakukan program. Namun demikian, program dan kelompok ataupun organisasi dapat berjalan karena adanya eksistensi aktor dengan kapabilitas *human agency* yang berperan sebagai motor penggerak. Kolaborasi, *networking* dan *partnership* yang terjalin diantara berbagai pihak telah mendorong pelaksanaan program dengan baik dan berkelanjutan sekaligus sebagai infrastruktur dan fasilitasi yang mendukung program sebagai bentuk tindakan nyata (*agentic action*) yang dilakukan.

Kata kunci: Kapabilitas, Human Agency, Masalah Sosial, Pekerjaan Sosial

Abstract: *Human agency capability is an important issue for the scientific development and practice of social work, bearing in mind that social work is a profession that is in direct contact with social interventions and one of its aims is to deal with social problems or meet community needs. This study aims to be a reflection for professional social workers based on the actual practice of using human agency capabilities in social interventions while at the same time demonstrating the importance of mainstreaming the concept of human agency in social work science, one of which focuses on efforts to develop social functioning. The explanatory method with a qualitative approach is used to analyze the human agency capabilities of the Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) Foundation in dealing with educational problems in the interior of Banten. The results of the study show that the existence of human agency capabilities is an important component among various other components in dealing with problems that occur and the presence of actors with human agency capabilities cannot be separated from groups or organizations as a forum for carrying out programs. However, programs and groups or organizations can run because of the existence of actors with human agency capabilities who act as the driving force. Collaboration, networking, and partnerships that exist between various parties have encouraged the implementation of the program properly and sustainably as well as infrastructure and facilitation that supports the program as a form of real action (agentic action) that they carry out.*

Keywords: Capabilities, Human Agency, Social Problems, Social Work

1. Pendahuluan

Berbagai upaya dalam menangani permasalahan sosial telah banyak dilakukan oleh individu-individu pada skala mikro secara kasuistik, sehingga kemudian individu-individu tersebut mampu membangkitkan partisipasi masyarakat untuk mendukung upaya yang dilakukannya. Keberhasilan menangani permasalahan dalam masyarakat yang digerakkan oleh orang-orang dengan kapabilitas berbeda dan di atas rata-rata (*ordinary people*) tersebut dalam istilah ilmu sosial salah satunya dikenal dengan sebutan *human agency*.

Pada suatu kondisi masyarakat tertentu selalu ada sejumlah kecil orang-orang dengan kapabilitas *human agency* yang menjadi inti utama pendorong perkembangan dan perubahan (Huggins & Thompson, 2019). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Florida, 2005) mengenai bangkitnya orang-orang yang semakin mampu menghasilkan beragam inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan memiliki kreativitas tinggi serta siap berpartisipasi untuk membuat kondisi kehidupan diri dan lingkungan dalam masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam melakukan upaya penanganan permasalahan ataupun dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, orang-orang dengan kapabilitas *human agency* tidak bekerja sendiri, melainkan dengan bergabung dalam organisasi ataupun kelompok untuk melakukan upaya perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan membangun dan membentuk jejaring (*networking*) serta memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya yang dapat dijangkau, yaitu sebagai infrastruktur dan fasilitas yang mendukung program sebagai bentuk tindakan nyata (*agentic action*) yang mereka lakukan.

Program yang digerakkan oleh orang-orang dengan kapabilitas *human agency* terbukti dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan, serta menunjukkan tumbuh dan berkembangnya keikutsertaan masyarakat. Dalam hal ini, berjalannya aktivitas ataupun program dengan baik bukan hanya karena ada dan terlibatnya orang-orang dengan kapabilitas *human agency* dalam pelaksanaan program saja, karena kehadiran *human agency* hanyalah salah satu faktor dari berbagai faktor penting lainnya, seperti faktor kelembagaan yang baik ataupun faktor lingkungan yang mendukung. Namun demikian, keberadaan kelembagaan yang baik dan lingkungan yang mendukung tidak cukup untuk dapat menggerakkan suatu program dapat berjalan dengan baik secara berkesinambungan dan mencapai tujuan yang diharapkan tanpa keterlibatan orang-orang dengan kapabilitas *human agency* di dalamnya.

Program sebagai bentuk tindakan nyata (*agentic action*) yang dilakukan oleh orang-orang dengan kapabilitas *human agency* sejalan dengan praktik pekerjaan sosial yang tidak hanya fokus pada upaya menangani permasalahan, melainkan juga pada upaya mengembangkan potensi untuk mendorong perubahan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Demikian pun dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggapi persoalan yang terjadi dalam masyarakat oleh orang-orang dengan kapabilitas *human agency* yang ditujukan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dengan cara menangani permasalahan sosial yang terjadi ataupun dengan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pekerjaan sosial merupakan disiplin akademis dan profesi berbasis praktik intervensi sosial untuk mempromosikan perubahan sosial, pengembangan masyarakat dan kohesi sosial (Duan et al., 2019). Dengan hadirnya individu-individu dengan kapabilitas *human agency* yang menunjukkan bukti keberhasilan dalam menjalankan program secara berkelanjutan dan dapat melibatkan masyarakat untuk ikut terlibat, maka hal tersebut dapat menjadi refleksi bagi praktik pekerja sosial profesional yang melakukan berbagai upaya pelayanan sosial sebagai bentuk intervensi sosial untuk menumbuhkembangkan keberfungsian sosial masyarakat.

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat dan masih menjadi permasalahan di Provinsi Banten dengan tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Berdasarkan data hasil pencatatan

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021, hanya 783,71 ribu jiwa (6,65%) penduduk di Provinsi Banten yang mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.649 jiwa (0,02%) penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S3 dan 41,77 ribu jiwa (0,35%) berpendidikan S2, serta 549,97 ribu jiwa (4,67%) berpendidikan hingga S1. Adapun, penduduk yang mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA/SLTA berjumlah 2,83 juta jiwa (23,97%) dan yang lulus pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) adalah sebanyak 1,71 juta jiwa (14,51%). Selanjutnya, terdapat 2,79 juta jiwa (23,73%) penduduk Provinsi Banten yang berpendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar (SD).

Isu pendidikan menjadi salah satu prioritas dan sentral di Provinsi Banten sejalan dengan kualitas pendidikan masyarakat yang tergolong rendah. Banyaknya siswa yang putus sekolah tidak hanya disebabkan karena permasalahan biaya atau faktor ekonomi keluarga, tetapi juga karena faktor orang tua yang mengarahkan anak untuk bekerja dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga angka anak putus sekolah di Provinsi Banten masih tinggi. Data menunjukkan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 82.851 orang anak putus sekolah di Provinsi Banten. Demikian pun dengan masih rendahnya rata-rata lama sekolah serta rendahnya harapan lama sekolah menjadi salah satu isu strategis permasalahan pendidikan di Provinsi Banten. Begitupun dengan ketimpangan aksesibilitas pendidikan yang terjadi di Provinsi Banten menjadi permasalahan tersendiri. Selain keterbatasan fasilitas pendidikan dan belum meratanya fasilitas pendidikan yang ada, baik pada segi kualitas maupun kuantitas, seperti minimnya ketersediaan gedung serta peralatan sekolah, akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan wajib belajar 12 tahun di Provinsi Banten pun belum maksimal pencapaiannya. Selain itu, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Banten menjadi indikator tingginya jumlah desa tertinggal di Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang.

Situasi dan kondisi yang terjadi dalam bidang pendidikan khususnya di wilayah Banten menjadi gambaran nyata bahwa pendidikan masih menjadi permasalahan, khususnya bagi masyarakat di pelosok Banten dengan tingkat ekonomi yang rendah. Sebagai upaya menangani permasalahan pendidikan tersebut, Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) *Foundation* berupaya melakukan *social project* untuk menangani permasalahan yang terjadi dan telah menunjukkan keberhasilan, sehingga dapat menjadi bahan refleksi bagi praktik pekerja sosial profesional yang diharapkan dapat melakukan hal serupa ataupun bekerjasama dengan sosok orang-orang yang memiliki kapabilitas *human agency* yang telah terbukti berhasil dalam menangani permasalahan sosial.

1.1. Tinjauan Konseptual Mengenai Kapabilitas *Human Agency*

Sejalan dengan peran kebutuhan psikologis dasar menjadi sumber utama dari disposisi adaptif manusia (Liu & Huang, 2021), demikian pun dengan *self-determination theory* yang menjelaskan bahwa manusia secara aktif berorientasi pada pertumbuhan dan secara alami cenderung bertindak sesuai dengan kebutuhan mereka (Deci & Ryan, 2000). Di sisi lain, *self-determination theory* juga menjelaskan mengenai motivasi manusia yang merupakan aspek penting dari *human agency*, terutama terkait dengan proses pengaturan diri yang digambarkan oleh Bandura (2018) sebagai reaktivitas diri (*self-reactiveness*). *Self-determination theory* menawarkan model *human agency* dalam memahami otonomi individu, yaitu bahwa *human agency* memainkan peran universal, esensial, dan inheren, sebagai sifat dasar dari setiap perilaku adaptif (Vansteenkiste et al., 2020).

Isu sentral *human agency* adalah hubungan sebab akibat antara aktor dengan konteks sosial yang bermuara pada pemahaman otonomi dan kehendak bebas (Dörnyei et al., 2014). Hal ini konsisten dengan prinsip-prinsip praktik pekerjaan sosial yang memposisikan individu dengan kapabilitas untuk menentukan tujuan hidup sendiri (Reisch & Jani, 2012). Demikian pun dengan

(Chirkov et al., 2003) yang menyatakan seseorang menjadi otonom ketika perilaku yang dilakukan merupakan keinginan sendiri dan ketika dirinya dengan sepenuhnya mendukung dan terlibat dalam tindakan yang dilakukan dan/atau berkaitan dengan nilai-nilai yang diungkapkannya.

Teori dan kerangka praktik pekerja sosial memposisikan kapasitas *human agency* pada diri *agent* sebagai mediasi sosial yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dalam kerangka kerja di mana *agent* secara aktif dapat bekerja dan berperan bersama orang-orang disekitarnya untuk menciptakan solusi terhadap permasalahan sosial (Parsell et al., 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kapabilitas *human agency* penting bagi profesi pekerjaan sosial yang melakukan praktik intervensi sosial dengan bekerja bersama klien dan bukan bekerja terhadap klien.

Pandangan tersebut sesuai dengan *value* yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial yaitu *helping people to help themselves* yang dipandang efektif untuk membantu kelompok sasaran agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi (Jane Addams Hull House Association, n.d.) dalam (Barsky, 2010). Sejalan dengan hal tersebut, (Goh, 2015) menjelaskan bahwa *human agency* dapat digunakan untuk menganalisis proses praktik pekerjaan sosial dan kapasitas individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat dalam tindakan proyektif dan kreatif pada konteks dan kondisi sosial tertentu yang dimediasi oleh sumber daya yang tersedia.

Terkait hal tersebut, makna intervensi sosial untuk menangani permasalahan bukan berarti mengambil alih permasalahan yang dihadapi penyandang masalah, melainkan dilakukan dengan cara mengembangkan kapasitas kelompok sasaran agar dapat melakukan upaya pertolongan terhadap diri mereka sendiri (*self-help*). Hal tersebut sejalan dengan *strengths perspective* yang memandang bahwa "setiap orang mempunyai sumber daya dan kapasitas untuk mengembangkan kehidupan mereka yang belum dimanfaatkan" (Salleby, 1996). *Value help people to help themselves* yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial didasarkan pada asumsi bahwa kelompok sasaran memiliki kemampuan berupa sumber-sumber kekuatan untuk memperbaiki keadaan dan membantu menangani permasalahan.

Teori dan kerangka praktik pekerja sosial memosisikan kapabilitas *human agency* sebagai mediasi sosial yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dalam kerangka kerja di mana *agent* secara aktif bekerja dan berperan bersama orang-orang disekitarnya untuk menciptakan solusi atas ketidakadilan dan permasalahan sosial (Parsell et al., 2017). Hal tersebut merupakan upaya untuk membangkitkan keberfungsian sosial pada masyarakat. Keberfungsian sosial yang merupakan konsep kunci untuk memahami keunikan fokus pekerjaan sosial dan yang membedakan pekerjaan sosial dengan profesi pertolongan lainnya. (Alfaiz & Yandri, 2015) menjelaskan individu dengan *human agency* tidak hanya merupakan hasil bentukan lingkungan, karena *human agency* pun menjadi kontributor bagi perilaku individu. Dalam tindakannya, individu dengan *human agency* memiliki tujuan, mengkonstruksi dan membangun perencanaan untuk mencapai tujuan (Cauce & Gordon, 2018).

Human agency dianggap sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan individu dan masyarakat merespon perubahan lingkungan, terlebih dalam situasi perubahan sosial yang terjadi dengan cepat, kondisi kehidupan yang bergejolak (*volatile*), menghadapi kondisi ketidakpastian (*uncertain*), situasi yang kompleks (*complex*) dan ambigu (*ambiguous*) (Council & Sowcik, 2020), sehingga kapabilitas *human agency* sangat dibutuhkan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, harapan dan tindakan untuk memperbaiki masa depan cenderung terletak pada kekuatan dan efektivitas dari kemampuan orang-orang yang termotivasi dan memiliki perhatian terhadap lingkungan sosial, bersedia berjuang demi perubahan cara manusia hidup, berpikir dan melakukan tindakan; berupaya untuk menangani permasalahan sosial yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah, mengakselerasi program pembangunan agar dapat berjalan dengan lebih cepat, mengoptimalkan potensi masyarakat yang belum digarap oleh pemerintah, berupaya mendorong dan menginspirasi orang-orang yang belum bergerak terlebih cenderung hanya mengoreksi dan mencari kesalahan pihak lain Nicholls, 2008.

Meilanny Budiarti Santoso, R. Nunung Nurwati, Azlinda Azman, Budhi Gunawan

Kapabilitas Human Agency Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) Foundation Dalam Menangani Permasalahan Pendidikan di Pedalaman Banten

Sejalan dan menguatkan berbagai konsep yang telah diungkapkan sebelumnya, (Grillitsch & Sotarauta, 2019) menjelaskan bahwa *human agency* mengacu pada tindakan yang disengaja, bertujuan, dan bermakna, dengan konsekuensi yang diinginkan ataupun untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Terkait penjelasan tersebut, (Deacon & Mann, 1999) memaknai *agency* sebagai gagasan yang menunjukkan bahwa 'tindakan, aktivitas, keputusan, dan perilaku', mewakili 'pilihan yang bermakna' ('*meaningful choice*') bagi seseorang, dalam hal ini menunjuk pada orang-orang dengan kapabilitas *human agency*. Proses pemaknaan, pembelajaran, dan tindakan penataan ulang berlangsung secara terus menerus selama periode waktu tertentu atau terstruktur dalam ruang dan waktu (Gergen, 1999) pada diri orang-orang dengan kapabilitas *human agency*

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengenai kapabilitas *human agency* Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) Foundation dalam menangani permasalahan pendidikan di pedalaman Banten. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari data lapangan dan sumber data sekunder berasal dari berbagai referensi dan dokumen terkait dinamika pembentukan kapasitas *human agency*, baik itu berupa buku, *ebook*, artikel jurnal, berbagai dokumen terkait berupa laporan ataupun foto, dokumen resmi yang dipublikasikan, dan sumber referensi digital yang berasal dari *web site*.

Sumber data primer diperoleh menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang melibatkan informan dari berbagai pihak terkait yang dapat menjelaskan kapabilitas *human agency* Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) Foundation beserta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Teknik pengumpulan data primer lainnya yang dilakukan adalah berupa teknik observasi terhadap tindakan agentik (*agentic action*) yang dilakukan oleh Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) Foundation. Teknik wawancara dan teknik observasi dilakukan oleh peneliti baik secara tatap muka langsung maupun dilakukan dalam jaringan (*daring*) melalui berbagai *platform* yang memungkinkan untuk digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data lainnya berupa teknik studi literatur yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari berbagai referensi dan dokumen mengenai dinamika pembentukan kapasitas *human agency* baik itu berupa referensi fisik (*hard copy*) ataupun pengumpulan referensi yang dilakukan melalui aktivitas *searching* pada berbagai *digital platform* dengan bantuan aplikasi pendukung.

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam proses pengumpulan data kualitatif. Instrumen penelitian lainnya yang digunakan berupa pedoman wawancara (*general interview guide approach*), alat perekam suara (*recorder*), alat tulis untuk mencatat (*field note*) dan berbagai piranti elektronik yang mendukung proses pengumpulan data secara *daring*. Adapun untuk aktivitas observasi, instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi dan kamera.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis sejalan dengan langkah-langkah yang dikemukakan oleh (Miles, M. B., & Huberman, 20189), bahwa proses analisis data dilakukan melalui tiga langkah yaitu: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merupakan proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).

Langkah demi langkah yang dilakukan dalam proses analisis data menurut (Miles, M. B., & Huberman, 20189) adalah sebagai berikut:

1). Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi dan studi dokumentasi. Setiap data yang diperoleh dianalisis secara keseluruhan dan melalui proses interpretatif karena data yang dikumpulkan berupa uraian yang panjang dan terperinci.

2). Kondensasi Data

Proses kondensasi data merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasikan data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan berbagai materi empiris. Kondensasi data terdiri dari beberapa proses sebagai berikut:

a. Pemilihan (*selecting*)

Secara selektif peneliti menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting dan hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, konsekuensinya ditemukan informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

b. Pengerucutan (*focusing*)

Memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis, dalam hal ini peneliti memfokuskan pada data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian dan peneliti pun membatasi data hanya yang sejalan dengan rumusan masalah penelitian.

c. Peringkasan (*abstracting*)

Peneliti membuat rangkuman yang berisi inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang diperlukan dan data yang telah terkumpul dievaluasi khususnya berkaitan dengan kualitas dan cakupan data.

d. Penyederhanaan dan transformasi (*data simplifying and transforming*)

Selanjutnya data disederhanakan dan ditransformasikan melalui tahapan seleksi berupa ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas.

3). Penyajian Data

Proses penyajian data yang dimaknai oleh (Miles, M. B., & Huberman, 20189) adalah sebagai sebuah pengorganisasian, penyatuan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, sehingga peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam konteks penelitian dan apa yang harus dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat memperdalam analisis dengan cara meneruskan proses analisis yang sedang dilakukan ataupun mengambil tindakan untuk memperdalam temuannya.

4). Penarikan Simpulan / Verifikasi

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan simpulan yang dilakukan oleh peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, alur sebab akibat, dan tahap akhirnya membuat simpulan dari keseluruhan data yang diperoleh berdasarkan proses analisis yang telah dilakukan serta mengecek ulang data yang telah ditemukan di lapangan.

Dalam hal ini, peneliti melakukan proses pengecekan ulang terhadap catatan lapangan dan berbagai data yang diperoleh dari lapangan untuk menemukan pola yang ditunjukkan oleh data yang diperoleh, ketika peneliti menemukan ketidakjelasan data ataupun ketidaksinkronan data, maka peneliti melakukan proses konfirmasi ulang pada sumber data.

Berikutnya peneliti melakukan pencatatan untuk menunjukkan keteraturan data yang diperoleh dengan memperhatikan alur sebab akibat berdasarkan data yang diperoleh, setelah melakukan proses tersebut, kemudian peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh.

Uji validitas data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi yang dilakukan berupa triangulasi teknik dan triangulasi

sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, teknik observasi dan studi dokumentasi. Adapun triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai subjek berbeda dalam penelitian

3. Hasil dan Pembahasan

ISBANBAN diresmikan menjadi sebuah organisasi berbadan hukum yayasan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008514.AH.01.04. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Istana Belajar Anak Banten dan selanjutnya lebih dikenal sebagai ISBANBAN *Foundation*. Pemberian nama ISBANBAN *Foundation* bertujuan agar organisasi lebih bersifat universal untuk tujuan menjangkau kerjasama pada skala internasional.

ISBANBAN merupakan sebuah organisasi *non-profit* yang berfokus pada bidang pendidikan bagi anak-anak di wilayah pelosok Banten. ISBANBAN hadir sebagai upaya nyata dalam menangani permasalahan pendidikan sejalan dengan tingginya angka buta huruf, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan banyaknya anak usia sekolah yang belum mendapatkan hak pendidikan di wilayah pelosok Banten. ISBANBAN diinisiasi oleh seorang anak muda Banten bernama Panji Aziz Pratama bersama teman-temannya di Forum OSIS Banten dan Banten Muda *Community* pada 10 Februari 2013.

Inisiator pendiri ISBANBAN *Foundation* berlatar belakang pendidikan strata satu di bidang ilmu sosial yaitu ilmu kesejahteraan sosial. Bidang keilmuan tersebut sangat relevan untuk mendukung proses pengembangan berbagai program *social project* yang dilakukannya dalam ISBANBAN *Foundation*. Berbekal pengetahuan, tata nilai profesi pekerjaan sosial, keterampilan dan kemampuan untuk menggunakan sarana prasarana berbasis internet serta tumbuh dalam lingkungan sosial yang fasih dalam menggunakan teknologi internet, hal tersebut mendukung pengembangan berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh ISBANBAN *Foundation*.

Dengan menggunakan kerangka pikir keilmuan yang dipelajarinya, Panji Aziz Pratama selaku inisiator ISBANBAN *Foundation* merasa sangat terbantu untuk dapat berpikir dengan lebih logis dan lebih *scientific*, Panji Aziz Pratama pun merasa lebih memiliki *framework* dalam merancang program dan lebih dapat menunjukkan adanya *theory of change* dari *social project* yang dibuatnya dan merasa terbantu dalam menciptakan dampak yang signifikan (*impactful*) bagi penerima manfaat (*beneficiaries*).

Untuk mendukung pengembangan ISBANBAN *Foundation* khususnya berkaitan dengan aspek pendanaan, Panji Aziz Pratama mengajak teman-teman *core team*-nya untuk mengembangkan mekanisme *pitching* dan Panji pun terinspirasi untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya saat kuliah yaitu mengenai tahapan intervensi sosial berdasarkan kerangka praktik pekerjaan sosial, khususnya dalam membuat rencana aksi yang diawali dengan melakukan *assessment*, kemudian membuat *plan of treatment*, melakukan *treatment*, melaksanakan *termination* dan diakhiri dengan kegiatan *after care* terhadap penerima manfaat (*beneficiaries*). Berbagai tahapan pelaksanaan intervensi tersebut menunjukkan bahwa program disusun berdasarkan kondisi objektif dan dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan yang jelas, sehingga hal tersebut memberikan kejelasan bagi pra calon pendonor dan dapat membuat mereka percaya untuk memberikan donasi dan bantuannya terhadap pelaksanaan program.

Kemampuan Panji Aziz Pratama dalam menggerakkan teman-temannya untuk menjalankan *social project* ataupun keberhasilannya dalam melakukan mekanisme *pitching* dan membangun partnership dengan berbagai pihak lembaga donor didukung oleh kemampuan Panji Aziz Pratama dalam *public speaking* dan *leadership* yang dimilikinya. Panji Aziz Pratama memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam membangun jejaring (*networking*) dengan berbagai pihak, sehingga organisasi memperoleh bantuan pendanaan untuk menjalankan *project based program*. Terjadinya interaksi antara

kompetensi yang dimiliki Panji Aziz Pratama dengan ketersediaan sumber daya pada lembaga donor yang dapat diakses terbukti telah mendukung keberhasilan pelaksanaan *social project* yang dilakukan oleh ISBANBAN Foundation.

Social project ISBANBAN Foundation berkembang menjadi organisasi formal dan aktivitasnya terus berkembang, ditandai dengan dibangunnya taman baca di enam lokasi berbeda di wilayah Provinsi Banten, yaitu di Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Masing-masing taman baca tersebut diberi nama "ISBANBAN chapter" diikuti oleh nama masing-masing lokasi wilayah.

Seiring berjalannya waktu, saat ini ISBANBAN memasuki tahun ke 10 dalam aktivitasnya dan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu berupa peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak di berbagai wilayah pedalaman Banten. ISBANBAN Foundation telah memiliki 18 taman baca yang dibangun di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan total 576 anak penerima manfaat. Jumlah relawan sebanyak 1.547 orang dan 42 orang *leaders*.

Saat ini, ISBANBAN Foundation sedang berusaha untuk menerapkan *value co-creation; Collaboration, Creativity* dan *Innovation*. Makna dari *co-creation* adalah sama-sama membuat karya yang dijabarkan dalam banyak kolaborasi, kreativitas, melakukan banyak kegiatan, melakukan inovasi agar ISBANBAN dapat tumbuh di lebih banyak tempat dan *impact*-nya semakin banyak menjangkau ke berbagai wilayah Banten.

Selain mengembangkan kelembagaan organisasi, ISBANBAN Foundation pun melakukan upaya pengembangan kapabilitas para pengurus dan para relawannya, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, menguasai *multy-skills*, memiliki *project management skill*, mampu melakukan *teamwork management and development*, dan memiliki *leadership capacity* yang baik. Hal ini dilakukan karena para pengurus dan para relawan merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program dengan mekanisme berbasis *project based* yang dikembangkan oleh ISBANBAN Foundation dan bertujuan untuk meningkatkan daya tarik atau *excitement* dari para pengurus dan para relawan saat menjalankan berbagai program ISBANBAN Foundation.

Berbagai program yang dilakukan ISBANBAN Foundation dalam menangani permasalahan pendidikan di wilayah Provinsi Banten adalah Program Taman Baca ISBANBAN Foundation, Program Mingguan, Program *iDreams*, dan Program *iLeads*. Berbagai program tersebut memiliki maksud dan tujuannya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1) Program Taman Baca ISBANBAN Foundation

Program Taman Baca merupakan program pertama yang dilakukan di Desa Sukamaju, Kabupaten Lebak bertepatan dengan kegiatan pemberian bantuan bagi korban bencana banjir di Provinsi Banten. Saat itu ISBANBAN pun belum terbentuk sebagai sebuah organisasi formal dan kegiatan pemberian bantuan bagi korban bencana banjir tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN).

2) Program Mingguan (Program ISBANBAN Foundation yang dilaksanakan setiap hari Minggu)

Program Mingguan merupakan aktivitas mengajar anak-anak rentang usia TK hingga SD yang dilakukan di 7 desa binaan ISBANBAN Foundation oleh para relawan. Tujuan utama dari Program Mingguan adalah membantu anak-anak binaan dalam peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. ISBANBAN Foundation juga berusaha untuk meningkatkan potensi anak-anak binaan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Proses pembelajaran dalam Program Mingguan mencakup kegiatan tentang *fun science*, pengenalan profesi, seni kriya, dan materi penguatan pembelajaran di sekolah.

3) Program *iDreams*

Program *iDreams* merupakan program pemberian beasiswa ISBANBAN Foundation untuk anak dari

keluarga pra-sejahtera yang memiliki potensi akademik/non akademik dan berdomisili di wilayah Provinsi Banten. Gagasan dilaksanakannya Program *iDreams* terinspirasi dari kisah salah satu anak binaan ISBANBAN *Foundation* yang tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah lulus SD dikarenakan keterbatasan ekonomi keluarga. “Gagasan beasiswa lahir dari salah satu anak binaan di Kabupaten Lebak, namanya Muniroh, adik binaan sejak kelas 2 SD dan di kelas 6 Muniroh bercerita ia tidak akan melanjutkan pendidikannya dan berniat untuk bekerja saja karena keterbatasan ekonomi”. Narasi tersebut disampaikan Panji Aziz Pratama ketika menjadi narasumber pada salah satu Program Televisi Kick Andy, 15 Januari 2023.

Panji Aziz Pratama beserta teman-temannya berinisiatif membantu permasalahan yang dihadapi oleh Muniroh dengan melakukan penggalangan dana melalui ISBANBAN *Foundation*. Dari kegiatan penggalangan dana yang dilakukan, ISBANBAN *Foundation* berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp 40 juta yang kemudian dikelola oleh tim ISBANBAN *Foundation* dengan digunakan untuk membantu kelanjutan pendidikan Muniroh ke tingkat SMP dan membantu 24 orang anak binaan ISBANBAN *Foundation* lainnya melalui beasiswa Program *iDreams*.

Program beasiswa yang diberikan ISBANBAN *Foundation* pada awalnya diperuntukan bagi anak binaan yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Namun, setelah menganalisis data pendidikan di Provinsi Banten yang menunjukkan lebih banyak anak-anak yang sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, maka ISBANBAN *Foundation* pun menyesuaikan program pemberian beasiswa dengan memperluas jangkauan penerima beasiswa pada siswa yang akan masuk SMA.

Selain memberikan beasiswa pendidikan, ISBANBAN *Foundation* pun melakukan program *mentorship* yang bertujuan sebagai upaya pengembangan kapasitas diri bagi siswa binaan di tingkat SMA serta bimbingan persiapan memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi. “ISBANBAN *Foundation* pun berusaha memberikan motivasi kepada penerima beasiswa di tingkat SMA untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi dengan memberikan pendampingan belajar kepada siswa kelas 12 untuk persiapan kuliah”. Hal tersebut disampaikan oleh Panji Aziz Pratama pada Program Televisi Kick Andy, 15 Januari 2023.

Kegiatan *mentorship* pengembangan kapasitas diri merupakan kegiatan yang terinspirasi oleh pengalaman pribadi Panji Aziz Pratama ketika dirinya di saat masih kecil mendapat bantuan. Panji Aziz Pratama ingin membentuk karakter anak-anak binaan untuk menjadi mandiri dan tidak memiliki sikap ketergantungan pada bantuan yang diberikan, salah satunya hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pengembangan kapasitas diri.

Program *iDreams* mulai dilaksanakan oleh ISBANBAN *Foundation* pada tahun 2018 dan saat ini telah memberikan manfaat kepada 225 orang anak penerima beasiswa dan 27 orang anak telah berhasil mendapatkan kesempatan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi. Keberhasilan Program *iDreams* juga tidak luput dari aktivitas penggalangan dana dan *partnership* yang dilakukan oleh ISBANBAN *Foundation* dengan berbagai pihak.

4) Program *iLeads*

Program ISBANBAN *Leadership Academy (iLeads)* merupakan program pengembangan kapasitas kepemimpinan bagi para relawan ISBANBAN *Foundation*, yaitu dengan memberikan program intensif *mentorship* selama empat bulan kepada para relawan. Program *iLeads* dilakukan sejak tahun 2019. Sebagai upaya meningkatkan kualitas para relawan, ISBANBAN *Foundation* secara rutin melakukan kegiatan *upgrading* bagi para relawan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas relawan dalam mengelola program. Materi-materi yang diberikan dalam kegiatan *upgrading* bagi para relawan tersebut berkaitan dengan materi manajemen waktu, *public speaking* serta cara kreatif dalam mengajar yang dapat meningkatkan efektivitas pengajaran yang diberikan oleh para relawan ISBANBAN *Foundation* kepada anak-anak binaan.

Untuk mendukung pengembangan ISBANBAN *Foundation* khususnya berkaitan dengan aspek pendanaan, Panji Aziz Pratama mengajak teman-teman *core team*-nya untuk mengembangkan mekanisme *pitching*. Panji Aziz Pratama terinspirasi untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya saat kuliah yaitu mengenai tahapan intervensi sosial berdasarkan kerangka praktik pekerjaan sosial, khususnya dalam membuat rencana aksi yang diawali dengan melakukan *assessment*, kemudian membuat *plan of treatment*, melakukan *treatment*, melaksanakan *termination* dan diakhiri dengan kegiatan *after care* terhadap penerima manfaat (*beneficiaries*). Berbagai tahapan pelaksanaan intervensi tersebut menunjukkan bahwa program disusun berdasarkan kondisi objektif dan dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan yang jelas, sehingga hal tersebut memberikan kejelasan bagi pra calon pendonor dan dapat membuat mereka percaya untuk memberikan donasi dan bantuannya terhadap pelaksanaan program.

Dengan menggunakan kerangka pikir keilmuan yang dipelajarinya, Panji Aziz Pratama merasa sangat terbantu untuk dapat berpikir dengan lebih logis dan lebih *scientific*, Panji Aziz Pratama pun merasa lebih memiliki *framework* dalam merancang program dan lebih dapat menunjukkan adanya *theory of change* dari *social project* yang dibuatnya dan merasa terbantu dalam menciptakan dampak yang signifikan (*impactful*) bagi penerima manfaat (*beneficiaries*).

Dalam menjalankan program, Panji Aziz Pratama bersama teman-teman *core team* ISBANBAN *Foundation* memikirkan *impact driven* bagi para penerima manfaat (*beneficiaries*), yang kemudian dituangkan ke dalam program berbasis *project based*. Mekanisme *pitching* terhadap lembaga donor sejauh ini tidak menimbulkan kewajiban ataupun *feedback* khusus bagi ISBANBAN *Foundation* karena pihak donor hanya meminta *reporting project* sebagai bukti telah dilaksanakannya program bagi penerima manfaat (*beneficiaries*).

Networking yang dibangun oleh Panji Aziz Pratama sebagai *project leader* sekaligus sebagai *public branding* ISBANBAN *Foundation* terbukti telah berhasil memfasilitasi upaya pengembangan berbagai program yang dijalankan oleh ISBANBAN *Foundation*. Awalnya ISBANBAN *Foundation* melaksanakan program secara rutin dan seiring perkembangan situasi dan kondisi para pengurus dan relawan, hal tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dilakukan, sehingga kemudian bertransformasi menjadi program berbasis *project based* dan *partnership*, yang dilakukan dengan strategi mengakses berbagai lembaga donor di tingkat nasional maupun internasional, menjangkau pemerintah, perusahaan, organisasi/kelompok masyarakat, akademisi dan pihak media.

Kerjasama dan kolaborasi yang dikembangkan oleh Panji Aziz Pratama dengan dukungan teman-teman *core team*-nya terhadap berbagai pihak tersebut tidak berpengaruh pada otonomi ide, penentuan pilihan, otonomi dalam mengambil keputusan dan kebijakan internal organisasi ISBANBAN *Foundation*. Hal tersebut karena berbagai pihak yang terlibat di tingkat nasional maupun internasional secara penuh menyerahkan ide dan pelaksanaan program pada otonomi ISBANBAN *Foundation*. Adapun *feedback* yang diminta oleh pihak donor adalah berupa *branding partnership*, yaitu dengan membuat *posting* program di media sosial Instagram milik ISBANBAN *Foundation* dan wajib membuat tautan pada akun lembaga donor.

4. Kesimpulan

Isu kapabilitas *human agency* tetap penting untuk dikaji, khususnya bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial dan juga memperkaya praktik pekerjaan sosial. Di sisi lain profesi pekerjaan sosial merupakan profesi pekerjaan yang terus berkembang dengan keunikan ke-Indonesia-an; yang juga memerlukan sentuhan berbagai ilmu-ilmu lainnya (*eclectic*). Profesi pekerjaan sosial seharusnya merupakan profesi yang bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan sosial nyata yang dihadapi oleh masyarakat termarginal. Dengan intervensi sosialnya, pekerja sosial bertujuan untuk menangani permasalahan sosial terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kajian ini

Meilanny Budiarti Santoso, R. Nunung Nurwati, Azlinda Azman, Budhi Gunawan

Kapabilitas Human Agency Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) Foundation Dalam Menangani Permasalahan Pendidikan di Pedalaman Banten

merupakan refleksi bagi pekerja sosial profesional berdasarkan praktik nyata dengan menggunakan kapabilitas *human agency* dalam intervensi sosialnya, sekaligus menunjukkan pentingnya *mainstream* konsepsi *human agency* dalam keilmuan pekerjaan sosial yang salah satunya berfokus pada upaya pengembangan keberfungsian sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kapabilitas *human agency* dengan kasus Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) *Foundation* dalam menangani permasalahan pendidikan di pedalaman Banten, bahwa eksistensi kapabilitas *human agency* merupakan komponen penting dalam proses intervensi sosial. Namun demikian, kapabilitas *human agency* juga terkait erat dengan berbagai komponen lainnya dalam menangani permasalahan sosial yang ada. Pengalaman Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) menunjukkan bahwa kehadiran aktor dengan kapabilitas *human agency* tidak dapat dipisahkan dari kelompok ataupun organisasi sebagai wadah dalam melakukan program, serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program dan kelompok ataupun organisasi dapat berjalan dengan baik karena adanya kemampuan aktor dengan kapabilitas *human agency* yang berperan sebagai motor penggerak, inisiator, fasilitator, serta *enabler* berjalannya intervensi sosial. Kolaborasi, jaringan (*networking*) dan kemitraan (*partnership*) yang terjalin diantara berbagai pihak juga merupakan faktor yang telah mendorong berjalannya program dengan baik serta berkesinambungan (*sustain*).

5. Saran

Masih diperlukan kajian-kajian lainnya terkait praktik nyata pekerjaan sosial dengan mengangkat isu dan fokus berbeda dengan menggunakan topik kapabilitas *human agency* dalam intervensi sosialnya, hal tersebut penting dilakukan sekaligus untuk menunjukkan pentingnya *mainstream* konsepsi *human agency* dalam keilmuan pekerjaan sosial yang salah satunya berfokus pada upaya pengembangan keberfungsian sosial.

Daftar Pustaka

- Alfaiz, A., & Yandri, H. (2015). Self-Concept And Self Efficacy As A Ground Points In A Social Activities (An Analysis Of Psychology Perspective: A Social Cognitive Theory). *Jurnal Pelangi*, 7(2), 200–211. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22202/jp.2015.v7i2.203>
- Barsky, A. E. (2010). Ethics and Values in Social Work. In *Book*. Oxford University Press, Inc. <https://doi.org/10.18084/1084-7219.24.1.261>
- Cauce, A. M., & Gordon, E. W. (2018). *Toward the measurement of human agency and the disposition to express it* (2013).
- Chirkov, V., Ryan, R. M., Kim, Y., & Kaplan, U. (2003). Differentiating Autonomy From Individualism and Independence : A Self-Determination Theory Perspective on Internalization of Cultural Orientations and Well-Being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(1), 97–110. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.1.97>
- Council, A., & Sowcik, M. (2020). Exploring the Development of Humble Leaders in the Context of Agriculture. *Advancements in Agricultural Development*, 1(3), 55–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.37433/aad.v1i3.55>
- Deacon, A., & Mann, K. (1999). Agency, Modernity and Social Policy. *Journal of Social Policy*, 28(3), 413–435. <https://doi.org/10.1017/S0047279499005644>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- Dörnyei, Z., Mac Intyre, P. D., & Henry, A. (2014). Motivational Dynamics in Language Learning. In *Motivational Dynamics in Language Learning*. <https://doi.org/10.21832/9781783092574>
- Duan, W., Guan, Q., Sheng, J., & Qi, B. (2019). Initial Development of the Social Work Core Competency Inventory. *British Journal of Social Work*, 1–19. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcz013>
- Florida, R. (2005). *Cities and The Creative Class*. Routledge.
- Goh, E. C. (2015). Vulnerable Families as Active Agents of Their Own Change Process: A Bidirectional Perspective. *Social Work*, 60(2), 145–154. <https://doi.org/10.1093/sw/swv002>
- Grillitsch, M., & Sotarauta, M. (2019). Trinity of Change Agency, Regional Development Paths and Opportunity Spaces. *Progress in Human Geography*, XX(X), 1–20. <https://doi.org/10.1177/0309132519853870>

Meilanny Budiarti Santoso, R. Nunung Nurwati, Azlinda Azman, Budhi Gunawan

Kapabilitas Human Agency Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) Foundation Dalam Menangani Permasalahan Pendidikan di Pedalaman Banten

- Huggins, R., & Thompson, P. (2019). Human Agency, Entrepreneurship and Regional Development: A Behavioural Perspective on Economic Evolution and Innovative Transformation. *Entrepreneurship and Regional Development*, 32(7–8), 573–589. <https://doi.org/10.1080/08985626.2019.1687758>
- Liu, Y., & Huang, X. (2021). Effects of Basic Psychological Needs on Resilience: A Human Agency Model. In *Frontiers in Psychology*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.700035>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2018). Qualitative data analysis. In *News.Ge* (p. <https://news.ge/anakliis-portiaris-qveynis-momava>).
- Parsell, C., Eggins, E., & Marston, G. (2017). Human Agency and Social Work Research: A Systematic Search and Synthesis of Social Work Literature. *British Journal Of Social Work*, 47, 238–255. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcv145>
- Reisch, M., & Jani, J. S. (2012). The new politics of social work practice: Understanding context to promote change. *The British Journal of Social Work*. <https://academic.oup.com/bjsw/article-abstract/42/6/1132/1629372>
- Salleby, D. (1996). The strengths perspective in social work practice. *Social Work (United States)*, 41(2), 296–305. <https://doi.org/10.1093/sw/40.2.280>
- Vansteenkiste, M., Ryan, R. M., & Soenens, B. (2020). Basic Psychological Need Theory: Advancements, Critical Themes, and Future Directions. In *Motivation and Emotion*. Springer US. <https://doi.org/10.1007/s11031-019-09818-1>



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Proses Praktik Prostitusi Mahasiswa “Ayam Kampus” di Kota Malang

Fitara Grasella¹ , Oman Sukmana^{1*} , Eko Rizki Purwo Widodo¹ 

¹ Universitas Muhammadiyah Malang

* Korespondensi: oman@umm.ac.id; Tlp +6282244333075

Diterima : 28 Agustus 2023; Direvisi: 25 Oktober 2023; Disetujui : 27 Desember 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fenomena praktik prostitusi Ayam Kampus pada mahasiswa di Kota Malang. Ayam Kampus merupakan istilah yang diberikan kepada mahasiswi yang terjun ke dalam dunia praktik prostitusi. Fokus penelitian diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan pokok penelitian, yakni: bagaimana proses dan factor-faktor yang mendorong mahasiswa dalam melakukan praktik prostitusi Ayam Kampus di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan *snowball* dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan tahap analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yang meliputi tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi dan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik perpanjangan waktu keterlibatan penelitian dan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses praktik prostitusi mahasiswa Ayam Kampus di Kota Malang dilakukan melalui tiga fase, yakni fase kontak awal, fase transaksi, dan fase akhir penyelesaian. Sedangkan factor-faktor yang menyebabkan mahasiswa terlibat dalam praktik prostitusi Ayam Kampus adalah karena factor relasi pertemanan, gaya hidup, dan factor kondisi ekonomi keluarga.

Kata Kunci: ‘Ayam Kampus’, Mahasiswa, Praktik, Prostitusi

Abstract: This research aims to describe the phenomenon of Ayam Kampus prostitution practices among students in Malang City. Ayam Kampus is a term given to female students who enter the world of prostitution. The focus of the research is directed at answering two main research questions, namely: what are the processes and factors that encourage students to practice Ayam Kampus prostitution in Malang City. This research uses a qualitative approach and descriptive research type. The data collection technique uses a snowball and the data collection technique uses interviews, observation and documentation. Meanwhile, the data analysis technique uses Miles, Huberman, and Saldana’s qualitative data analysis stage, which includes data collection, data condensation, data presentation, as well as verification and conclusions. Data validity techniques use extended research involvement techniques and source triangulation techniques. The research results show that the process of prostitution practice for Ayam Kampus students in Malang City is carried out through three phases, namely the initial contact phase, the transaction phase, and the final settlement phase. Meanwhile, the factors that cause students to become involved in the practice of campus chicken prostitution are due to friendship relations, lifestyle and family economic conditions.

Keywords: ‘Campus Chicken’, Students, Practice, Prostitution

1. Pendahuluan

Prostitusi (pelacuran) merupakan fenomena sosial yang sudah terjadi sejak lama dan hingga saat ini masih muncul dalam kehidupan masyarakat (Ambarwati et al., 2020). Salah satu penyakit masyarakat yang susah untuk diatasi adalah prostitusi (Nurgiansah, 2020). Prostitusi (pelacuran) merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Prostitusi (pelacuran) merupakan salah satu bentuk patologi sosial dalam masyarakat (Putri & Lestari, 2023).

Menurut Kartono (Burlan, 2016), prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. Patologi sosial adalah sebuah tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun betetangga, isiplin, kebaikan dan hukum formal (Khumaerah, 2017). Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, dalam perspektif kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembedaannya sebagai bagian daripada makhluk sosial (Ihsan, M.N., Waluyo, A., Lestari, 2023).

Secara umum pelacuran atau biasa disebut prostitusi merupakan upaya membeli atau menjual perbuatan seksual di luar nikah untuk mendapatkan imbalan materi (Eddyono et al., 2017). Prostitusi adalah salah satu bentuk eksploitasi seksual dan mencakup, namun tidak terbatas pada, semua kegiatan prostitusi dan pelecehan seksual, dan segala bentuk penggunaan alat kelamin atau organ tubuh korban lainnya untuk mendapatkan keuntungan (Negoro & Atmadja, 2014).

Di Indonesia, pelacur disebut wanita tuna susila (WSTS) atau Pekerja Seks Komersial (PSK). Pelacur adalah orang yang menjajakan dirinya untuk keuntungan materi atau untuk memuaskan nafsu. Selain pelacur, istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan para pekerja seks komersial adalah sundal, yang berarti perempuan jalang, liar, nakal, dan yang melanggar hak-hak seorang wanita. Selain itu, ada istilah lain untuk pelacur, lonte, yang semakna dengan sundal. (Khumaerah, 2017).

Selanjutnya, dalam pandangan Pitana dan Gayatri (Sukmana, 2017) Prostitusi adalah fenomena kehidupan sosial dan dinamika masyarakat. Akibat perkembangan teknologi dan informasi, prostitusi tumbuh dan berkembang di seluruh kota besar di Indonesia, termasuk Kota Malang, karena kompleksitas masyarakat modern. Bersamaan dengan kemajuan teknologi saat ini, terjadi perubahan pada fenomena prostitusi yang umum di masyarakat. Bermula dari sebuah tempat lokalisasi, prostitusi sekarang berubah menjadi online, yang dianggap mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat melalui akses internet berupa social media. Beberapa pelaku pekerja seks mulai menyukai prostitusi online karena dianggap memberi mereka lebih banyak pilihan untuk mencari pelanggan dan memberi mereka keuntungan karena akses yang lebih mudah dan efektif (Wahab et al., 2020).

Mengacu kepada hasil studi Andana dan Faozi (Andana & Faozi, 2022) dikemukakan bahwa penyebab terjadinya prostitusi di masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut: Pertama, faktor eksploitasi yang disebabkan oleh mucikari yang menipu dan merayu perempuan bahkan anak di bawah umur, yang akhirnya menjadi pekerja seks komersial. Kedua, yang menyebabkan seseorang terjun ke dunia prostitusi adalah faktor ekonomi yang bersumber dari kepribadian seseorang yang berpikir on the fly. Ketiga, adanya faktor pemaksaan. Pekerja seks komersial yang bergerak di dunia prostitusi dipaksa dan diperbudak oleh seseorang atau pihak tertentu. Dalam permasalahan ini, pemerintah harus mengambil inisiatif untuk membantu masyarakat yang tidak berdaya. Keempat: Faktor lingkungan. Dalam hal ini lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadian dan perilaku seseorang. Faktor lingkungan inilah yang menyebabkan banyak orang berakhir di dunia prostitusi. Kelima, faktor gaya hidup: Banyak orang lebih memilih gaya hidup yang sangat berlebihan, dan banyak pelaku prostitusi yang mengabaikan nilai-nilai agama, kesopanan, dan kesopanan. Dan nomor enam adalah faktor frustrasi yang mendorong seseorang terjun ke dunia prostitusi dalam keadaan seperti ini. Banyak di antara mereka yang tidak mampu menyelesaikan masalah.

Sebagai kota yang dikenal dengan sebutan "Kota Pendidikan", termasuk pendidikan tinggi. Program Tri Bina Cita Kota Malang yang merupakan moto Malang sebagai kota Pendidikan, Industri dan Pariwisata menjadi nilai jual promosi Kota Malang (T. Soseco, 2021). Sebagai kota pendidikan, maka Kota Malang menjadi tujuan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk belajar. Hadirnya mahasiswa dari berbagai pelosok tanah air di Kota Malang tentu saja harus dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Malang. Namun demikian, kehadiran para mahasiswa di Kota Malang ini juga memiliki dampak negative yakni munculnya prostitusi di kalangan mahasiswa. Kota Malang merupakan salah satu kota besar dengan jumlah pekerja seks komersial (PSK) lebih tinggi dibandingkan kota besar lainnya di Jawa Timur. Jumlah pekerja seks komersial (PSK) di Kota Malang menduduki peringkat kedua tertinggi di Jawa Timur, disusul Kota Banyuwangi di peringkat pertama, dan Kota Surabaya di peringkat ketiga.

Bentuk prostitusi dari tahun ke tahun semakin beragam seperti *pergundikan*, *gadis-gadis bar*, *gadis-gadis juvenile*, *gadis-gadis binal*, *gadis-gadis taxi*, *hoters*, dan sebagainya. Prostitusi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan tidak berpendidikan saja, namun juga oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi dan terpelajar. Tidak bisa dipungkiri, permasalahan prostitusi juga merambah pada sektor pendidikan Indonesia. Telah diketahui secara umum bahwa kampus telah lama dikenal sebagai tempat prostitusi (Vallen & Puspita, 2022).

Ayam kampus adalah fenomena prostitusi yang sedang diperdebatkan saat ini. Prostitusi atau penyedia jasa seks yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pekerjaan paruh waktu dan tidak terikat dikenal sebagai ayam kampus. Ayam kampus biasanya dijual secara rahasia sehingga hanya orang tertentu yang dapat berbicara dengan mereka. Para mahasiswa yang berusaha menjadi PSK terselubung sekarang disebut "ayam kampus". Prostitusi Ayam Kampus adalah ketika terdapat mahasiswi yang menjajakan tubuhnya sebagai pelacur di lingkungan kampus (Bahrudin & Amanda, 2022). *Ayam kampus* termasuk pada kategori wanita panggilan (*call girl*) dimana kelompok ini mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi daripada dengan kelompok lain sehingga dengan demikian label atau predikat *ayam kampus* dapat memasang tarif tinggi dari pada pekerja seks komersial lainnya (Suryani, 2016). Ayam Kampus dapat didefinisikan sebagai pelaku Free Seks (Seks Bebas) di mana mereka masih terdaftar sebagai mahasiswi pada sebuah lembaga pendidikan universitas baik diploma ataupun sarjana (Putri, 2015).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena prostitusi mahasiswa khususnya ayam kampus yang saat ini menjadi permasalahan umum atau lumrah di masyarakat. Sebab, mahasiswa dipandang sebagai simbol intelektual yang patut dijadikan teladan bagi masyarakat. Fenomena ayam kampus sendiri bisa dikatakan menjadi bukti bahwa prostitusi telah merasuki lingkungan intelektual yang selama ini dibanggakan masyarakat dan menjadi pintu gerbang kehormatan bangsa.

Fenomena diatas tersebut menarik peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang bentuk prostitusi mahasiswa di Kota Malang dan faktor yang melatar belakangnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Praktik Prostitusi Mahasiswa "Ayam Kampus" di Kota Malang". Sedangkan rumusan permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses praktik prostitusi mahasiswa di Kota Malang?; dan (2) Apa faktor pendorong mahasiswa melakukan praktik prostitusi di Kota Malang?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kota Malang yang merupakan kota pelajar. Subjek Penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, dengan memanfaatkan informan kunci (key informan) untuk mengantarkan peneliti kepada subjek penelitian berikutnya (Saleh, 2017). Menurut Yin (Nurdiani, 2014) *snowball sampling* digunakan jika peneliti tidak tahu siapa yang tepat menjadi sampel, karena tidak mengetahui kondisi warga masyarakat di lapangan. Informan kunci dalam penelitian ini tidak hanya memberikan informasi data akan tetapi juga membantu peneliti menemukan dan membuka akses kepada subjek atau informan berikutnya. *Key Person* (subjek pertama) yaitu teman peneliti yang kuliah di PTS di Kota Malang sebagai subjek pertama dan pembuka

jalan karena sudah lama terlibat dalam proses praktik prostitusi di kalangan mahasiswa. Berdasarkan informasi key person ini kemudian diperoleh sejumlah subyek dan informan penelitian sebagaimana pada table 1.

Tabel 1: Daftar Nama Subjek dan Informan Penelitian

No	Nama (samaran)	Usia	Pendidikan	Keterangan
1.	Pupah	23 Thn	Kuliah di PTS di Kota Malang	Ayam Kampus
2.	Tiara	21 Thn	Kuliah di PTN di Kota Malang	Ayam Kampus
3.	Vika	22 Thn	Kuliah di PTS di Kota Malang	Ayam Kampus
4.	Nuriza	22 Thn	Kuliah di PTS di Kota Malang	Ayam Kampus
5.	Gladis	24 Thn	Kuliah di PTN di Kota Malang	Ayam Kampus
6.	Zilla	22 Thn	Kuliah di PTN di Kota Malang	Ayam Kampus
7.	Sofia	23 Thn	Kuliah di PTS di Kota Malang	Ayam Kampus
8.	Bobey	34 Thn	Bekerja di Club Malam BR di Kota Malang	Makelar
9.	Keceng	24 Thn	Kuliah di PTN di Kota Malang	Pengguna Jasa Ayam Kampus
10.	Jabrix	23 Thn	Bekerja di Coffeshop di Kota Malang	Pengguna Jasa Ayam Kampus

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa Data menggunakan tahapan analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana (Wanto, 2018) yang meliputi tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan.

Uji Keabsahan Data dilakukan dengan uji kredibilitas (credibility). Uji kredibilitas (credibility) atau disebut dengan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebuah karya ilmiah yang dilakukan (Helaluddin & Wijaya, 2019). Uji kredibilitas dalam penelitian dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan dan meningkatkan kecermatan dalam penelitian, serta dengan melakukan triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Mekarisce, 2020).

3. Hasil

3.1. Proses Praktik Prostitusi Mahasiswa di Kota Malang

Berdasarkan data hasil penelitian, maka proses praktik prostitusi mahasiswa “Ayam Kampus” di Kota Malang dapat dideskripsikan dalam tiga fase, yakni: fase awal, fase transaksi, dan fase akhir. **Pertama, Fase Awal.** Fase ini, pada awalnya menjadi penentu seseorang dalam mengambil keputusan masuk ke dunia prostitusi. Dengan berbagai permasalahan yang dialami oleh pelaku, dan faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk akhirnya memutuskan untuk menjadi prostotusi. Setelah pelaku yakin, maka mulailah pelaku akan melakukan proses praktik prostitusi. Fase awal juga menjelaskan bagaimana hal-hal yang memperkuat kegiatan ini, dimana pelaku kegiatan prostitusi terselubung ini melakukan beberapa poin penting yaitu:

a. Mencari Konsumen

Berbeda dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang secara terang-terangan menjual diri di tempat prostitusi atau yang biasa disebut lokalisasi, mahasiswi yang menggeluti bisnis “ayam kampus” cenderung menutup-nutupi pekerjaannya dan hanya menjual jasanya kepada orang-orang tertentu. Keamanan menjadi alasannya utama, karena mereka tidak ingin orang lain mengetahui pekerjaan mereka yang sesungguhnya. Dalam praktik prostitusi mahasiswa, mencari dan memilih konsumen merupakan hal yang penting. Ada beberapa cara yang dilakukan pelaku untuk mendapat konsumen yaitu:

Fitara Grasella, Oman Sukmana, Eko Rizki Purwo Widodo
Proses Praktik Prostitusi Mahasiswa “Ayam Kampus” di Kota Malang

1) Lingkup Pertemanan (Dikenalkan Teman)

Dalam mencari konsumen, pelaku biasanya dikenalkan oleh teman yang mana teman tersebut juga merupakan “ayam kampus”. Hal tersebut dibuktikan dengan pengakuan subjek Tiara :

“...dari Kak Pupah sih biasanya. Itu kalau dia dapet job tapi lagi nggak biasanya dilempar ke kita. Dia selalu ngabarin. Mau nggak gitu. Dia selalu jelasin di awal siapa yang mau BO, feenya berapa. Jadi enak aku bisa nimbang-nimbang dulu mau ngambil apa nggak. Soalnya aku agak pemilih sih ya sama pelanggan”

Subjek mengatakan biasanya ia mendapat konsumen dari teman yang juga merupakan “ayam kampus”. Dalam kutipan wawancara tersebut ketika pelaku mendapat konsumen namun ia tidak bisa karena sudah mendapat konsumen lain, maka akan dilempar ke teman yang lainnya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh penuturan Nuriza yang mengatakan:

“...lagi dugem terus tiba-tiba dikenalin temen. Ya mau-mau aja asal latar belakang orangnya jelas, dapetnya jelas. Kadang Kak Pupah dapet, terus dia nggak bisa ya dikasih ke aku. Bukan makelar sih dia, tapi karena relasinya udah banyak jadi ya Kak Pupah yang lebih sering dapet job terus dikasih ke kita”

Sama halnya dengan kedua subjek di atas, Pupah juga mengaku bahwa ia sering mengenalkan om-om ke teman-temannya. Melalui grup obrolan whatsapp biasanya ia menawarkan pelanggan ke teman-temannya. Berikut merupakan pengakuan Pupah:

“...banyak sih dapet. Kadang kan aku lagi nggak mood nge-job ya aku tawarain ke anak-anak di grup. Aku sesuai mood sih, kalo lagi pengen aja. Soalnya kan aku juga punya pacar. Nggak bisa kerja gitu tiap hari. Kalau anak-anak lagi butuh ya aku kasih aja”

Dari hasil wawancara dengan subjek, dapat disimpulkan bahwa pelaku mendapat konsumen melalui jaringan pertemanan mereka. Dalam hal ini ketika pelaku akan mencari konsumen temannya ketika temannya membutuhkan untuk disewa.

2) Melalui Media Sosial

Selain dikenalkan teman, pelaku bisa mendapat konsumen melalui media sosial. Media sosial yang sering digunakan yaitu Line, Tinder, Bumble, Twitter. Menurut pelaku, mencari konsumen melalui media sosial lebih mudah, namun harus tetap hati-hati dan selektif dalam memilih konsumen. Seperti yang dikatakan subjek Gladis sebagai berikut :

“aku sih lebih pemilih ya beb kalo nyari pelanggan. Nggak mau mahasiswa atau yang latarbelakangnya nggak jelas apalagi yang nggak berduit. Sering dapet itu ya dari Tinder. Dari Tinder nanti move chatting di Line. Biasanya, orangnya nanya dulu sih di Tinder bisa BO apa engga. Pas udah aku jawab bisa, dan orang minta kontak ya aku kasih id Line. Akun Tinderku juga nggak make identitas asli. Di twitter juga gitu, masang foto-foto seksi foto cantic seksi lah, nanti ada yang direct messages, tanya-tanya. Aku nggak main michat beb. Mending pakai twitter. Kalo michat kan rata-rata lonte-lonte murah gitu ya, kalo aku beda dong. Kalau di michat pelanggannya juga banyak kuli, mahasiswa gitu. Rata-rata yang nggak berduit cuma mau enak doang”

Menurut penuturan subjek, ia banyak mendapat konsumen melalui media sosial Tinder dan twitter. Namun dalam menjalankan askinya, ia tidak memakai identitas asli yang ditampilkan di media sosial untuk mencari konsumen. Penuturan Gladis juga dikuatkan oleh Zilla yang mana Zilla lebih banyak mendapat konsumen melalui media sosial Line dan Bumble. Seperti yang dijelaskan:

“...banyak Koko-Koko sih kalo di Bumble. Enaknya ya itu, banyak duitnya daripada mahasiswa nawarnya murah. Kalo setingkat Koko-Koko kan gausah nawar dikasih harga berapa asal cocok ya gas. Kalo di Line itu banyak dari fitur Namanya People Nearby, kebanyakan mahasiswa sih jadi kadang aku pilih-pilih dulu nggak langsung aku terima gitu aja”

Singkatnya, kebanyakan subjek dari penelitian kurang suka dengan pelanggan mahasiswa karena dianggap tidak punya uang dan menawarkan dengan harga murah. Sedangkan mereka lebih suka Koko atau Om-Om seperti yang juga dikatakan oleh salah satu informan bernama Keceng. Keceng merupakan mahasiswa di salah satu PTS di Malang yang juga kerap memakai jasa “ayam kampus”. Penuturan Keceng sebagai berikut:

“...beda kelas mah kalo mahasiswa. Ayam kampus itu lebih eksklusif ya menurut aku, nggak semua orang bisa pakai. Tapi ya tergantung ayam kampusnya yang gimana dulu sih. Biasanya aku nemuin di Tinder, terus aku minta kontakannya segala macam setelah cocok ya eksekusi. Di Tinder mah banyak banget, pinter-pinternya kita aja milih cewek yang gimana”

Dari hasil wawancara, informan membenarkan bahwa banyak sekali mahasiswi-mahasiswa yang menggunakan media sosial untuk mendapat konsumen. Singkatnya melalui penuturan dari beberapa subjek dan informan, media sosial menjadi alternatif yang efektif untuk mendapat konsumen dalam praktik prostitusi. Beberapa dari mahasiswi yang bekerja sebagai “ayam kampus,” tidak serta merta dalam mendapat konsumen khususnya yang di dapat melalui media sosial. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan agar sesuai dengan kriterianya.

3) Melalui Makelar

Cara terakhir yang digunakan untuk mendapat konsumen yaitu melalui makelar. Makelar “ayam kampus” yang di dapat dalam penelitian ini yaitu merupakan seorang manager di salah satu Club malam di Malang. Sebagai manager club malam, ia banyak memiliki banyak relasi dengan para pelanggan-pelanggan yang sering datang ke club malam tersebut. Tak jarang pelanggan-pelanggan tersebut meminta untuk dicarikan teman minum dan disewa. Hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan subjek Pupah sebagai berikut:

“...bang Bobey juga sering ngenalin sama bos-bos pas lagi dugem. Nemenin minum dapet fee, apalagi kalo sekalian bungkus pulangnya.. Feenya jadi 3x lipat bahkan lebih. Rata-rata yang dikenalin bang Bobey juga bos-bos besar. Banyak juga dari luar kota”

Subjek menjelaskan bahwa saat ia pergi ke club malam, ia sering dikenalkan oleh manager club tersebut yang notabene sebagai makelar dalam praktik prostitusi mahasiswa ini. Subjek menuturkan bahwa konsumen yang didapat dari makelar kebanyakan merupakan seorang bos-bos besar dan banyak yang berasal dari luar Malang. Pengakuan Pupah juga dibenarkan oleh Vika yang juga sering mendapat tawaran dari Bobey:

“...ya karna sering dugem disitu, akhirnya kenal juga sama managernya namanya bang Bobey. Anak-anak yang lain juga pada kenal sama dia. Awalnya dia nawarin mau nggak nemenin minum tamunya.. Terus jadi sering gitu dapet panggilan dari bang Bobey kalo ada tamu. Ya aku nggak masalah sih, karena emang tamunya bang Bobey nggak main-main duitnya pada banyak bos besar semua. Kadang kalo legi sepi job juga aku nanya ke bang Bobey, nanti dia nyarin gitu. Kan sama-sama untung ya, aku dapet duit dia juga pasti dapet fee dari orangnya, ditambah lagi kalo orangnya minta temenin minum pasti order minumannya banyak. Untung buat clubnya juga”

Dari wawancara di atas singkatnya, pelaku mendapat konsumen melalui makelar. Dimana makelar merupakan manager club malam yang sering didatangi oleh para subjek. Ketika makelar mendapat tamu di club malam yang meminta untuk dicarikan teman minum, maka makelar akan menawarkan kepada pelaku. Makelar akan mendapat uang tip dari konsumen karena jasanya, sedangkan pelaku akan mendapat uang karena menemani minum dan disewa. Sehingga terjadilah simbiosis yang saling menguntungkan antara makelar dan pelaku.

b. Menjalin kesepakatan

Setelah mendapat konsumen atau pelanggan, tahap selanjutnya yaitu menjalin kesepakatan. Dalam hal ini kesepakatan yang dimaksud yaitu termasuk berkenalan, bertukar foto, negosiasi harga,

persetujuan lokasi, dan peraturan-peraturan yang dimiliki oleh masing-masing “ayam kampus” kepada pelanggan saat melakukan praktik prostitusi. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil wawancara dengan subjek Pupah :

“...kalo dapet dari bang Bobey sih dia udah tau ya kita masang harga berapa. Bang Bobey biasanya juga udah ngomong dulu ke orangnya. Jadi bang Bobey yang hubungin kita. Kita tinggal dateng ke tempat dugem. Ketemu sama orangnya. Lihat gimana maunya pelanggan. Minta temenin dulu terus ke hotel. Ada juga yang emang minta temenin minum doang. Nanti kita juga tinggal nyesuaikan aja. Nggak ribet. Biasanya kalo nemenin minum doang di tempat dugem fee nya 1 juta – 1,5 juta. Kalo sekalian BO ya bisa sampai 3 juta – 4 juta. Itupun short time, kalau long time beda lagi. Tapi kalau yang BO sekelas bos-bos perusahaan, koko-koko gitu jarang ada yang nawar langsung gas aja”

Subjek menjelaskan apabila mendapat konsumen yang dikenalkan oleh makelar, maka proses kesepakatan lebih mudah dan cepat. Hal tersebut dikarenakan sebelum melakukan kesepakatan dengan pelaku, makelar akan memberikan gambaran dan informasi tentang pelaku, sehingga ketika pelaku dan konsumen bertemu maka kesepakatan langsung dilakukan tanpa berbasa-basi. Pelaku juga senang ketika ada konsumen yang langsung epakat tanpa harus tawar menawar harga.

Berbeda dengan penuturan Pupah, Vika mengaku ketika mendapat pelanggan dari media sosial ia merasa lebih memakan waktu seperti yang dikatakan sebagai berikut:

“...pas udah dikasih kontak Line dan aku masang harga kadang ada yang nawar-nawar dulu. Ada yang minta foto dulu. Ada yang langsung deal tanpa babibu. Cuma kadang kesel sama yang udah tanya-tanya udah dikirim foto tapi malah nggak jadi alasannya kemahalan minta turinin harga. Padahal itu udah aku kasih harga minimal. Misalnya aku masang harga 2 juta satu kali main, malah ditawar jadi 1 juta mintanya 2 jam pula. Kan ya rugi beb, buang-buang waktu aja”

Singkatnya, subjek mengaku kesal jika ada konsumen yang akan menyewa namun banyak bertanya dan akhirnya tidak jadi menyewa. Merasa membuang-buang waktu. dalam tahap ini ketika “ayam kampus” dan konsumen telah menyepakati harga tempat dan lainnya, maka pelaku akan memberikan peraturan-peraturan yang diberikan kepada konsumen. Seperti contohnya wajib menggunakan pengaman, praktiknya dilakukan berapa lama dan beberapa permintaan lain dari pelaku. Hal ini dimaksudkan agar transaksi yang akan dilakukan berjalan dengan nyaman bagi kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 7 subjek didapatkan informasi harga dari masing-masing subjek berdasarkan waktu dalam sekali praktik.

Tabel 2:: Daftar Tarif ‘Ayam Kampus’ berdasarkan waktu

No	Nama (Samaran)	Harga Short Time (1-2 jam)	Harga Long Time (6-8 jam)
1.	Pupah	2 juta – 4 juta	6 juta – 7 juta
2.	Tiara	1,5 juta – 2 juta	3,5 juta – 5 juta
3.	Vika	1,5 juta – 2 juta	3,5 juta – 5 juta
4.	Nuriza	2 juta – 3 juta	4 juta – 7 juta
5.	Gladis	2 juta – 4 juta	≥ 7 juta
6.	Zilla	1,5 juta – 2 juta	3,5 juta – 5 juta
7.	Sofia	1,5 juta – 2 juta	3,5 juta – 5 juta

Sumber : Dokumentasi peneliti

Kedua, Fase Transaksi. Dalam fase ini merupakan tahapan dilakukannya praktik prostitusi. Dari hasil wawancara, setelah membahas proses disewa atau di bookingnya para “ayam kampus” ini, kemudian pembahasan ini melalui bagaimana pelaku-pelaku ini mulai melakukan eksekusi untuk memuaskan konsumen yang telah menyewanya. Pernyataan pertama diawali oleh Tiara:

“...kalo di tempat dugem gitu ya biasanya nemenin minum dulu, terus kita pulang dan biasanya kalau nggak ke hotel ya ke apartemen. Kadang pelangganku kalau mahasiswa itu biasanya sampai pagi mereka baru pulang, tapi kalau om-om yang kerja luar kota gitu biasanya sekali gitu udah sih langsung bayar dan biasanya ya langsung ditinggal gitu, jadi tidur hotel sendirian aku. Kadang mereka habis main biasanya istirahat sejam dua jam langsung cabut”

Dari penuturan subjek di atas, ketika pelaku mendapat konsumen di tempat dugem, biasanya awalnya yaitu menemani minum setelah itu transaksi prostitusi akan dilakukan pulang-pulang di hotel atau apartemen tergantung kesepakatan. Pelaku juga menjelaskan apabila konsumennya mahasiswa, biasanya setelah melakukan transaksi konsumen akan tidur dulu dan pagi baru pulang sedangkan apabila konsumennya om-om yang berasal dari luar kota, maka setelah transaksi dan pelaku dibayar, konsumen akan langsung pulang. Subjek lain yaitu Tiara juga menjelaskan:

“...gak tentu sih ya. Kalo dapetnya dari Tinder gitu biasanya aku janji keluar kemana dulu gitu nanti dijemput sama orangnya, paling diajakin makan, jalan-jalan dan minta belikan barang-barang. Baru habis itu check-in di hotel”

Penjelasan Tiara yaitu tidak selalu konsumen langsung mengajak transaksi di hotel. Ada kalanya, pelaku mendapat konsumen yang akan mengajaknya untuk makan, jalan-jalan bahkan berbelanja untuk pelaku sebelum melakukan transaksi di hotel. Terkait dengan penuturan Tiara, didukung juga dengan penuturan oleh Gladis:

“aku sih kalo main sukannya di hotel ya, selain tempatnya bersih juga enak dan nyaman, aku pernah sewa apartemen malah dan dapet kamar yang kotor banget, sebelum diBO juga biasanya aku minta belanjain baju dan beberapa kebutuhanku. Ini aku dapet HP Iphone ini kan juga dari pelangganku, lagian om-om yang sewa aku kebanyakan nggak pelit kok mereka, malah pernah aku sampai mau dikasih mobil. Tapi karna aku orangnya nggak mau terikat ya, takutnya nanti kalau habis dikasih barang-barang kayak mobil, rumah gitu jadi terikat sama orangnya”

Dari pernyataan-pernyataan subjek di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada tempat khusus yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan transaksi prostitusi. Mereka melakukan di hotel yang telah disepakati antara pelaku dan konsumen. Tidak hanya uang yang didapat pelaku, tetapi mereka juga mendapat barang-barang seperti baju, tas, hp yang diminta dari konsumennya.

Ketiga, Fase Akhir. Dalam fase ini merupakan kelanjutan dari proses prostitusi yang dilakukan mahasiswi. Dalam fase ini ketika konsumen merasa puas dan senang dengan pelayanan dari “ayam kampus” maka tak jarang akan dijadikan langganan dan repeat order. Bahkan ada pula konsumen yang jatuh hati kepada pelaku dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih dekat. Seperti yang diungkapkan salah satu informan bernama Jabrix:

“...pernah dulu BO cewek. Keluar duit banyak banget emang ya tapi sebandinglah sama servicenya. Dia juga cantik pokoknya mantep. Sebelum BO kan kita jalan-jalan dulu, makan, nonton. Dua kali aku order dia eh aku jadi bawa perasaan sama dia, jadi suka. Akhirnya aku coba deketin dia, dan kita deket tuh. Pas mau jadian, aku ngomong ke dia kalau berhenti aja jadi ayam kampus. Dia nggak mau, dan setelah itu kita lost kontak”

Mahasiswi yang bekerja sebagai “ayam kampus” juga kerap menemui pelanggan yang ingin menjadikannya simpanan. Seperti yang dijelaskan oleh Sofia sebagai berikut:

“kalau yang pengen jadiin simpanan banyak, tapi akunya yang nggak mau beb. Terlalu beresiko kalau kayak gitu. Pokoknya aku yang penting itu duit bukannya status. Kalau jadi simpanan itu terikat, pasti kedepannya nanti bakal sulit”

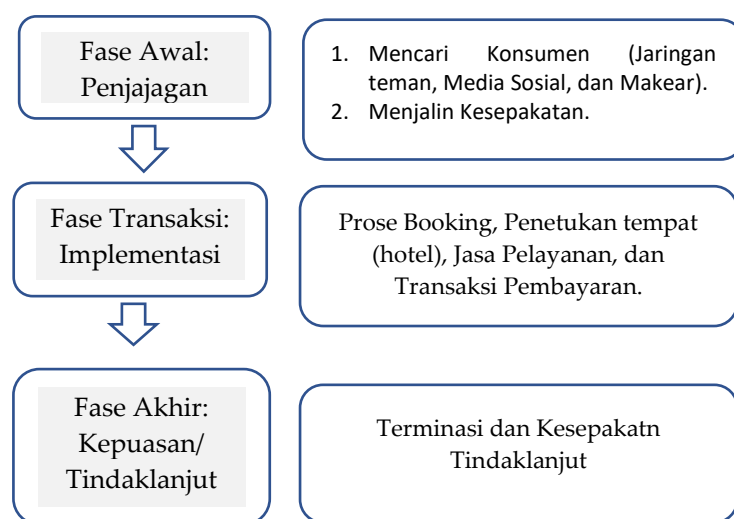
Diakui, meski bisa dengan mudah mendapatkan uang menjadi seorang ayam kampus, namun sebagian mahasiswi pelaku bisnis haram ini enggan menjadi simpanan om-om berkantong tebal yang telah memiliki keluarga anak dan istri. Mereka lebih memilih aman dengan menjajakan cinta kilatnya

daripada harus menjadi simpanan pria beristri. Alasannya, selain beresiko jati dirinya terungkap, pelaku juga menghindari terjadinya konflik dengan istri sah si om-om apabila sampai hubungannya dengan om-om tersebut diketahui istrinya.

Subjek lainnya juga mengaku kerap kali setelah disewa terkadang terbawa perasaan alias baper kepada pelanggannya. Akan tetapi ia mengaku lebih memilih menahan diri. Pelaku lebih memilih menahan diri ketimbang nantinya hubungannya berlanjut hingga menjadi simpanan si pelanggan. Pelaku juga menuturkan sulit untuk meninggalkan kehidupan yang serba enak dari penghasilannya sebagai “ayam kampus”. Ia melakukan profesi ini untuk memenuhi *lifestyle* dan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian proses praktik prostitusi mahasiswa di Kota Malang tersebut, selanjutnya dapat dibuat bagan alur sebagai berikut:

Bagan: Alur Proses Praktik Prostitusi Mahasiswa di Kota Malang



3.2. Faktor pendorong Praktik Prostitusi Mahasiswa di Kota Malang

Dari informasi yang telah digali dan dikumpulkan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi mahasiswa melakukan praktik prostitusi ‘Ayam Kampus’ di Kota Malang, yakni:

Pertama, Faktor lingkungan sosial pertemanan. Salah satu faktor yang melatarbelakangi mahasiswa menjadi prostitusi yaitu lingkungan pertemanan mereka. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan para subjek atau pelaku kegiatan prostitusi dalam penelitian ini, dimana para pelaku prostitusi melakukan aksinya dengan jaringan-jaringan pertemanan yang ada. Beberapa subjek juga mengaku bahwa pertama kali terjun dalam dunia prostitusi dikarenakan ajakan dan paksaan teman dekatnya. Pelaku juga menuturkan awal mula dirinya terjun kedalam prostitusi yaitu karena coba-coba dan tidak ada niatan, namun karena ajakan dari temannya untuk berkenalan dengan Om-Om saat di club malam iapun terpengaruh dengan teman sepermainnya yang notabennya juga menjadi ayam kampus, hal ini dikuatkan dengan penuturan subjek Nuriza:

“...ya itu sih aku kenal sama Kak Pupah kebetulan dia kakak panitia aku waktu ospek. Awalnya ya diajak dugem. Waktu itu ada event Ladies Night di salah satu club di Malang. Jadi eventnya itu 5 cewek gratis 1 botol minuman alkohol. Kak Pupah ngajak aku sama dua temennya lagi, tapi kurang satu *kan ya aku ngajak si Tiara dia temen SMA aku dulu. Dari situ kita jadi sering dugem bareng. Aku senang sih banyak kenalan nambah temen pas dugem. Gak langsung dikenalin ke om-om sih. Beberapa kali aku liat Kak Pupah nemenin om-om minum waktu dugem terus aku disuruh nemenin juga. Liat temen-temenku dikasih duit ya aku kepengen juga. Aku nyoba-nyoba aja awalnya eh lama-lama nggak cuma nemenin minum doang*”

Dari penuturan Nuriza dikuatkan juga dengan penuturan Tiara yang juga diajak oleh Nuriza ketempat hiburan malam lalu tergiur dengan iming-iming mendapat uang dengan mudah.

Singkatnya, pelaku mengaku bahwa awalnya dia masuk ke dunia prostitusi karena ajakan teman bukan murni dari keinginan sendiri. Hal ini juga dikuatkan dengan pengakuan oleh salah satu subjek bernama Pupah:

“...ada beb grup isinya aku, Nuriza, Tiara, Vika sama ada temenku 3 lagi jadi 7 orang itu. Grup wa biasa sih buat kabar-kabaran kalau mau dugem tapi kadang ya bahas BO-an kalo misalnya ada job tapi lagi gak bisa jadinya ngomong di grup siapa yang mau gantiin gitu beb”

Subjek menjelaskan bahwa dirinya dalam kegiatan prostitusi ini tidak sendiri melainkan bersama teman yang tergabung dalam Grup obrolan whatsapp. Dimana dalam grup obrolan ini berisi Pupah dan beberapa teman Pupah yang lain termasuk Tiara, Vika, dan Nuriza yang juga melakukan kegiatan prostitusi. Grup tersebut digunakan untuk berkomunikasi antar satu sama lain misalnya ada job, atau hanya sekedar untuk berkumpul.

Lingkungan sosial pertemanan sangat mempengaruhi kegiatan prostitusi di kalangan mahasiswa ini. Tak jarang banyak remaja atau mahasiswa terjerumus ke dalam dunia prostitusi karena pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Remaja saat ini khususnya mahasiswa menganggap prostitusi merupakan sebuah trend masa kini yang harus dilakukan agar dirinya tidak dianggap ketinggalan jaman. Ketika dalam sekelompok pertemanan, salah satu melakukan sesuatu hal maka yang lain akan mengikutinya dengan dalih setia kawan, tidak mau kehilangan teman.

Menurut Erikson (Gunarsa, 2004), masa remaja adalah masa pencarian identitas diri, dimana identitas diri ini dibentuk dari hubungan psikososial remaja dengan individu lain yaitu dengan teman dan sahabat. Hubungan psikososial sesama remaja dalam mengidentifikasi diri dan merasa nyaman disebut dengan istilah kelompok teman sebaya Larson & Richard (Papalia, 2005).

Ikatan secara emosional dalam kelompok teman sebaya akan mendatangkan berbagai pengaruh besar bagi individu dalam kelompok. Karakter seseorang yang dijadikan teman pun akan sangat berpengaruh pada perkembangan remaja. Hubungan kelompok teman sebaya yang positif akan memberi hasil pada prestasi akademik dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Aspek perkembangan kognitif dilihat dari sudut pandang pendekatan konstruktivis sosial. Sedangkan hubungan kelompok teman sebaya yang negatif akan menimbulkan masalah perilaku dan perkembangan moral. Masalah perilaku yang muncul pada remaja seperti terlibat dalam perkelahian, tawuran, penggunaan obat-obatan, seks bebas sampai pada kenakalan remaja Laursen (Gunarsa, 2004).

Kedua, Faktor gaya hidup (Perilaku hedonisme dan glamour). Belakangan ini gaya hidup hedonisme sangat melekat erat dengan kehidupan. Gaya hidup hedonisme ini bisa dikatakan virus karena dapat menyerang dari anak-anak hingga golongan orang tua. Generasi yang paling dekat dengan perilaku hedonisme adalah remaja termasuk mahasiswa. Remaja sangat menyukai hal-hal baru. Gaya hidup hedonisme sangat menarik bagi mereka sebagai mana mereka ingin terlihat dalam golongan berduit dan selalu ingin tampil bergaya mengikuti mode. Mereka yang termasuk orang kaya sangat beruntung sehingga dapat memenuhi standar ini, tetapi bagi mereka yang kurang mampu harus mengambil jalan pintas yang cepat. Tak jarang pula seseorang masuk ke dunia prostitusi, didorong oleh gaya hidup hedonisme yang mengabaikan nilai agama, asas kepatutan dan kesusilaan.

Sifat hedonisme yang tumbuh dikalangan mahasiswa ini yang seringkali menjadi pemicu bagi mereka untuk melakukan segala cara agar bisa memuaskan keinginannya termasuk memasuki dunia prostitusi. Agar dapat mengikuti standar orang "kaya" dan tidak ingin kalah saing di lingkungannya sosialnya, terkadang mereka rela memasuki bisnis haram ini dan memperoleh uang dalam jumlah besar dengan cara yang relatif "mudah". Hal tersebut dikuatkan oleh pengakuan dari subjek Zilla:

“... ya, selagi muda, pengen nikmatin hidup aja seneng-senang, belanja, nyalon, foya-foya. Apalagi kalo udah ketemu temen satu geng rasanya gak afdol gitu kalo gak happy-happy ngeluarin duit. Itu juga yang dipake duit dari om-om. Kalo jatah bulanan dari orang tua paling jatohnya buat kebutuhan pribadi aja”

Singkatnya, dari penuturan subjek diatas mahasiswa menjadi prostitusi karena alasan ingin menikmati masa muda dengan mengikuti gaya hidup hedonisme. Dengan masuk ke dunia prostitusi, hasil yang didapat digunakan untuk berfoya-foya. Faktor lain yang diungkapkan salah satu subjek yaitu karena gengsi dan tidak mau kalah dengan teman-teman yang bisa dikatan orang dengan ekonomi atas. Sehingga ia melakukan prostitusi untuk mendapat uang dan membeli barang-barang branded agar terlihat fashionable. Gladis menuturkan:

“gimana ya beb, kan aku juga jurusan manajemen, tau sendiri gimana anak FEB itu. Semuanya gayanya high class, style nya keren, rata-rata disini juga bawa mobil. Gengsi tau kalo aku sendiri yang style-nya cupu. Takut dijauhin beb nggak punya temen. Mangkanya kadang BO juga Cuma buat beli barang branded gitu. kalo lagi pengen tas apa gitu misalnya yang harganya jutaan baru aku open BO jadi gak tiap hari gak jadi pekerjaan juga”

Sementara ada pelaku yang mengaku faktor yang melatarbelakangi ia masuk ke dunia prostitusi karena kebiasaan hidup mewah yang dimilikinya. Sejak kecil ia selalu hidup mewah dan dimanja, sehingga apapun yang diinginkannya selalu terpenuhi. Namun 2 tahun terakhir usaha yang dimiliki orang tuanya bangkrut dan ekonominyapun menurun. Karena kebiasaan hidup mewahnya itu kini ia menjadi prostitusi untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah.

Hasil wawancara di atas menjelaskan Pelaku senang dengan gaya hidup hedonisme karena sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga sejak kecil. Hal ini erat kaitannya dengan cara pelaku menjalani hidupnya, yang selalu mengarah pada kesenangan, kenikmatan, atau menghindari perasaan tidak enak atau membosankan. Sejak kecil, kehidupan mereka dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti model pakaian yang beragam, varian kendaraan roda dua dan empat yang selalu tersedia, dan kebiasaan makan yang terkesan mewah dan konsumtif. Menurut pelaku, gaya hidup hedonisme diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, karena situasi sudah berubah, pelaku mencari cara lain untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya.

Ketiga, Faktor latar belakang keluarga dan faktor kondisi ekonomi. Dalam kasus prostitusi di kalangan mahasiswa, motif ekonomi juga merupakan faktor penting terjerumusnnya seseorang kedalam prostitusi. Latar belakangan keluarga dengan ekonomi menengah kebawah membuat seseorang berpikir untuk mendapat penghasilan yang lebih besar namun dengan cara cepat dan mudah. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa subjek mengaku berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu sehingga kehidupannyapun kurang terjamin dalam aspek ekonomi. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Sofia:

“...orang tua aku cuma buruh beb. Bapakku tukang becak, Ibukku bantu-bantu cuci baju, nyetrika, dirumah tetangga. Dulu aku nggak dibolehin kuliah ya karna nggak punya uang. Tapi aku maksa biar boleh kuliah. Aku bilang ke orang tuaku kalo aku biayain kuliahku sendiri. Terus aku beasiswa bidikmisi itu beb alhamdulillah diterima. Jadi ya bisa kuliah nggak usah bayar”

Subjek juga mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta uang kepada orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya keperluan kuliah, ia terpaksa bekerja sebagai pelacur (prostitusi).

Dari hasil wawancara dengan subjek Sofia, penuturan selanjutnya dikuatkan oleh Vika. Dimana Vika merupakan anak broken home sejak ia duduk dibangku SMA, dan kemudian Papa-nya meninggal saat Vika berada di semester 2 di bangku kuliah. Vika mengaku sejak kematian Papa-nya, kehidupannya terasa sulit khususnya di ekonomi. Meskipun kebutuhan pokok Vika ditanggung oleh Paman (adik Papanya), Vika merasa itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Malang. Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang melatarbelakangi Vika untuk menjadi prostitusi sebagaimana penuturan Vika saat hasil wawancara sebagai berikut:

“...berat banget setelah Papa meninggal. Merasa aku gak punya pegangan hidup lagi. Soalnya aku juga nggak deket sama Mama. Waktu itu sempet deperesi pengen berhenti kuliah juga. Tapi dukungan dari teman, keluarga, dan pacar aku akhirnya bisa lewatin masa itu.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan latar belakang keluarga dan faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam menjadikan seseorang menjadi prostotusi. Kemiskinan dan pemerataan pendapatan masih merupakan alasan klasik yang selalu dipakai untuk menjawab semua permasalahan mengenai penyebab pelacuran. Menurut Koentjoro (2004), tindakan pelacuran atau prostitusi lahir disebabkan karena tingginya aspirasi material dan dukungan budaya serta peranan kemiskinan. ginan mereka termasuk melakukan tindakan pelacuran atau prostitusi.

4. Pembahasan

Praktik prostitusi di kalangan mahasiswa bukanlah merupakan fenomena yang baru. Praktik prostitusi yang dilakukan mahasiswa sudah terjadi sejak lama. Muncul berbagai sebutan atau istilah yang ditujukan bagi mahasiswa pelaku praktik prostitusi, antara lain seperti ayam kampus (mahasiswa yang bekerja sebagai pekerja seks komersial).

Penelitian ini memfokuskan pada mengungkap dua hal, yakni terkait proses terjadinya praktik prostitusi Ayam Kampus di kota Malang, dan factor-faktor apa saja yang mendorong mahasiswa melibatkan diri dalam praktik prostitusi ayam kampus di kota Malang. Penelitian ini mengungkap bahwa proses terjadinya praktik prostitusi ayam kampus melalui tiga fase, yakni fase pendekatan, fase perkenalan, fase transaksi, dan fase akhir.

Selanjutnya berkaitan dengan factor-faktor yang mendorong mahasiswa terlibat dalam praktik prostitusi ayam kampus, terungkap bahwa factor-faktor yang mendorongnya meliputi: faktor lingkungan pertemanan (pengaruh teman), faktor gaya hidup dan perilaku hedonism pada mahasiswa, faktor latarbelakang keluarga, dan faktor ekonomi. Secara umum terdapat factor pendorong yang relative sama yang antara praktik prostitusi mahasiswa ayam kampus dengan praktik prostitusi sebagaimana hasil berbagai penelitian lainnya. Misalnya, mengacu kepada hasil studi Bachtar dan Purnomo (Ambarwati et al., 2020) yang menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yakni: faktor ekonomi, faktor kemalasan, faktor rendahnya tingkat pendidikan, factor niat lahir batin, faktor persaingan hidup terutama di perkotaan, faktor sakit hati, seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, dan sebagainya, factor tuntutan tanggungan keluarga.

Sedangkan hasil penelitian Andana dan Faozi (Andana & Faozi, 2022) menyebutkan bahwa praktik prostitusi di Indonesia disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut Pertama, Faktor eksploitasi, disebabkan oleh para mucikari yang menipu dan merayu perempuan, bahkan anak-anak di bawah umur, sehingga mereka menjadi pekerja seks komersil; Kedua, faktor ekonomi, yang menyebabkan pekerja seks komersil terlibat dalam dunia prostitusi karena terlalu cepat dan terpaksa; dan ketiga, faktor keterpaksaan, yang terjadi karena pekerja seks komersil dipaksa dan diperbudak oleh individu atau kelompok tertentu. Keempat, faktor lingkungan, yang mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang secara signifikan, menyebabkan banyak orang terjerumus ke prostitusi. Kelima, faktor gaya hidup, yang menyebabkan banyak orang menjalani gaya hidup yang berlebihan, dan mereka yang terjerumus ke prostitusi mengabaikan nilai agama, kepatutan, dan kesusilaan. Keenam, faktor frustasi, yang menyebabkan banyak orang terjerumus ke prostitusi. Banyak dari mereka yang tidak dapat menyelesaikan masalah mereka.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik prostitusi mahasiswa Ayam Kampus di Kota Malang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, dalam proses praktik prostitusi ayam kampus yang dilakukan mahasiswa di Kota Malang dapat diklasifikasikan kedalam terdapat tiga fase, yakni: Fase awal atau fase pendekatan, dimana pada fase ini ada beberapa tahapan penting dalam proses praktik prostitusi mahasiswa yaitu mencari konsumen. Pelaku prostitusi mahasiswa mendapat konsumen melalui tiga cara yaitu dikenalkan teman, melalui media sosial, dan melalui makelar; Fase berkenalan dan menjalin kesepakatan, dimana dalam tahap ini pelaku dan konsumen melakukan pendekatan seperti bertukar foto dan menjalin kesepakatan mengenai harga, waktu dan lama transaksi, tempat transaksi, dan

*Fitara Grasella, Oman Sukmana, Eko Rizki Purwo Widodo
Proses Praktik Prostitusi Mahasiswa "Ayam Kampus" di Kota Malang*

peraturan-peraturan yang dimiliki masing-masing pelaku prostitusi terhadap konsumen saat proses transaksi; Fase transaksi, dimana pada fase ini merupakan dilakukannya transaksi dalam praktik prostitusi. Biasanya transaksi dilakukan di hotel-hotel berbintang yang berada di Kota Malang; dan Fase akhir, dimana pada fase ini merupakan kepuasan dari konsumen terhadap pelayanan pelaku, dimana apabila konsumen merasa puas dan senang dengan pelayanan yang diberikan pelaku maka tak jarang akan dilakukan atau menjadi langganan; dan

Kedua, Faktor pendorong mahasiswa melakukan praktik prostitusi ayam kampus, meliputi: Faktor pertama, yaitu karena pengaruh lingkungan pertemanan dimana dalam hal ini berkaitan dengan mahasiswa yang masuk ke dalam dunia prostitusi ayam kampus karena ajakan temannya; Faktor kedua, sekaligus menjadi faktor yang paling dominan yaitu gaya hidup dan perilaku hedonism pada mahasiswi, dimana gaya hidup mewah dan perilaku hedonisme yang dilakukan oleh mahasiswi ini yang seringkali menjadi pemicu bagi mereka untuk melakukan segala cara agar dapat memuaskan keinginannya termasuk dengan melakukan praktik prostitusi; Faktor ketiga, yaitu faktor latarbelakang keluarga dan faktor ekonomi, dimana kondisi keluarga seperti perceraian dan motif ekonomi merupakan faktor kuat yang mendorong mahasiswa terlibat dalam praktik prostitusi ayam kampus.

6. Saran

Selanjutnya mengacu kepada hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjaga diri dari pengaruh buruk disekitar lingkungan sosialnya atau lingkungan pertemanan, dengan begitu dapat menjadi seorang mahasiswa yang berintelektual tinggi, berakhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia;

Kedua, Untuk pemilik tempat penginapan atau hotel-hotel di Kota Malang yang selama ini seringkali digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung diharapkan bisa membuat peraturan bagi setiap penyewa atau pengunjung hotel atau penginapan di Kota Malang dengan melarang membawa masuk tamu yang bukan muhrimnya kedalam tempat penginapan; dan

Ketiga, untuk Pemerintah Kota Malang dapat melakukan tindakan terutama pada tindakan preventif (pencegahan) seperti menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan prostitusi atau larangan maksiat yang ditempat hiburan malam di Kota Malang.

Ucapan terimakasih: Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Daftar Pustaka

- Ambarwati, D. A., Eskasasnanda, I. D. P., & Purnomo, A. (2020). Dampak Ekonomi Penutupan Lokalisasi Bagi Masyarakat Semampir Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 162. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.17537>
- Andana, A. ., & Faozi, S. (2022). Penyebab Terjadinya Masalah Prostitusi Online Di Kota Semarang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8, 905–919. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/59556>
- Bahrudin, E., & Amanda, S. (2022). *Fenomena Ayam Kampus Melalui Layanan Media Online : Kecerdasan Baru Dunia Prostitusi Di Kalangan*. 2(2), 111–118.
- Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial*. Bumi Aksara.
- Eddyono, S. W., Hendra, R., & Budiman, A. A. (2017). Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya. *Paper: Institute for Criminal Justice Reform*, 1–38.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). Qualitative Data Analysis A Review of Theory and Practice. In *Analisa Data Kualitatif* (p. 148). https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Data_Kualitatif_Sebuah_Tinjauan/1f7ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Ichsan, M.N., Waluyo, A., Lestari, A. (2023). *Media Sosial Undercover*. 2(3), 113–119.

- Khumaerah, N. (2017). Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Khitabah*, III(1), 62–73.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinoOzspLveAhWJ6Y8KHfvcBw8QFjADegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.uin-alauddin.ac.id%2Findex.php%2FAl-Khitabah%2Farticle%2Fdownload%2F2922%2F2798&usg=AOvVaw3_asDIKmO0i
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Negoro, P. A., & Atmadja, I. G. O. (2014). Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia. *Recidive*, 3(1), 68–79. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40483>
- Nurgiansah, T. H. (2020). Fenomena Prostitusi Online di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 27. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.14208>
- Putri, A. H. ., & Lestari, M. P. (2023). *Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi*. Mazda Media.
- Putri, R. (2015). Fenomena Kehidupan “Ayam Kampus” (Studi Kasus Mahasiswi Di Surabaya). *Jurnal of Nonformasl Education*, 1(1).
- Sukmana, O. (2017). Jaringan sosial praktek prostitusi terselubung di kawasan wisata kota batu. *SOSIO KONSEPSIA*, 6, 33–44.
- Suryani, I. (2016). Prostitusi Terselubung (Studi Kasus Terhadap Prilaku Ayam Kampus Di Kawasan Kampus Panam). *Jom Fisip*, 3(2), 1–15.
- T. Soseco. (2021). Pusat Pertumbuhan di Kota Malang: Potensi dan Permasalahan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 3(1).
- Vallen, N., & Puspita, I. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Sebagai Pekerja Seks Komersial Di Kota Semarang. *Zahra: Journal of Health and Medical Research*, 2(3), 179–184.
- Wahab, Z. A., Kurnaasih, E., & Multazam, A. (2020). Prostitusi Pada Mahasiswi Melalui Layanan Media Online Di Kota Makassar Tahun 2020. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 1(1), 9–18. <https://doi.org/10.52103/jahr.v1i1.91>
- Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Pelayanan Sosial Lanjut Usia Masa Krisis di Kabupaten Lumajang

Setyo Sumarno ^{1*} , Achmadi Jayaputra ¹ 

¹ Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konkretivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta

* Korespondensi: setyosumarno2020@gmail.com ; Tel: +62 8128000828

Diterima : 12 Januari 2023; Direvisi: 4 Oktober 2023; Disetujui : 27 Desember 2023

Abstrak Tahun 2021 terjadi perubahan kebijakan sosial dikenalkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ASISTENSILU) dengan penambahan jangkauan pelayanan yang dilakukan lembaga yang dibentuk Kementerian Sosial. Penelitian layanan sosial terhadap lanjut usia di masa krisis belum pernah dilakukan, sehingga permasalahannya bagaimana peran lembaga pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pelayanan sosial pada masa krisis. Tujuannya untuk menemukan data dan keterangan pelayanan sosial yang dilakukan lembaga pemerintah dan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap pemangku kebijakan dan pelaksana kegiatan, serta pengamatan di lokasi. Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, Griya Lanjut Usia Gerbang Mas tidak terkait langsung dengan bencana alam letusan Gunung Semeru. Pelayanan langsung dilakukan terhadap seluruh lanjut usia penghuni panti sosial dan pelaksana. Terutama dalam mencegah penyebaran Covid-19, sehingga tidak ada yang terjangkit virus tersebut. Kedua, pelayanan sosial terhadap lanjut usia di wilayah bencana alam letusan Gunung Semeru telah dilakukan berbagai lembaga sosial dan masyarakat setempat sesuai dengan kearifan lokal setempat. rekomendasi, pemerintah dan masyarakat perlu menyusun pedoman untuk pelayanan sosial terhadap lanjut usia di masa krisis.

Kata kunci: pelayanan sosial, perawatan, lanjut usia, masa krisis

Abstract In 2021 there will be a change in social policy with the introduction of assistance for elderly social rehabilitation (Assistenlu) with the addition of the range of service carried out by institutions formed by the ministry of social affairs. Research on social services for the elderly during a crisis has never been carried out, so the problem is what is the role of government agencies and the community in providing social services during a crisis. The aim is to identify data and information on social services carried out by government agencies and the community. The study used a qualitative approach by conducting interviews with policy makers and activity implementers, as well as site observations. Research results show. First, griya elders gate mas is not directly related to the natural disaster of the eruption of Mount Semeru. Direct services are carried out for all elderly resident of social instructions and implementers. Especially in prevending the spread of COVID-19, so that no one gets infected with the virus. Secondly, social services for the elderly in the area of the mount Semeru eruption natural disaster have been carried out by various social instructions and the local wisdom. Recommendations, the government and social need to develop guidelines for social services for the elderly in time of crisis.

Key word: social service, nursery, elderly, crisis period

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998, bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Secara umum di Indonesia penduduk lanjut usia mengalami peningkatan usia harapan hidup. Walaupun demikian, secara alamiah yang terjadi pada lanjut usia akan mengalami penurunan fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Kondisi ini tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Seyogyanya di masa tuanya para Lanjut usia berhak menikmati masa tuanya bersama keluarga. Kondisi lansia dari segi ekonomi jelas mengalami penurunan produktifitas karena lemahnya fisik dan mental, namun dalam kehidupan sehari-hari tidak seluruhnya berlaku bagi lansia, bahkan sampai usia 70 tahun. Lanjut usia sebagai janda karena cerai hidup atau suaminya meninggal banyak yang tetap bertahan dalam memenuhi aspek ekonomi. Ada juga yang tidak terlalu terganggu oleh proses penuaan dan ancaman berbagai penyakit.

Usia lanjut dapat dikatakan usia “emas” yang telah membuka dan memberi banyak kesempatan kepada individu. Terutama perempuan untuk menjadi diri sendiri agar dapat mengembangkan minat dan bakat yang belum sempat dikembangkan. Ada lanjut usia potensial atau produktif dapat melaksanakan perannya, tetapi ada yang non potensial yang ketergantungan dan membutuhkan bantuan orang lain. Peran lingkungan yang harusnya dapat membantu memenuhi kebutuhan lansia yang mengalami ketergantungan. Peran keluarga, masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat menjadikan lanjut usia bahagia menjalani masa tuanya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membahagiakan para lanjut usia melalui program dan berbagai kegiatannya.

Tahun 2000 usia harapan masyarakat Indonesia 65,4 tahun, tahun 2021 usia harapan hidup masyarakat Indonesia mencapai 71,5 tahun. Seiring meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk, akan berpengaruh pada peningkatan umur harapan hidup di Indonesia. Pada tahun 2045 di prediksi usia harapan hidup akan meningkat menjadi 77,6 tahun dengan persentase populasi lanjut usia sekitar 28,68 persen. Penduduk Indonesia berusia lanjut, tahun 2010 tercatat 18 juta jiwa, tahun 2019 tercatat 25,9 juta jiwa, dan tahun 2025 diperkirakan mencapai 33,69 juta jiwa. Peningkatan membawa dampak positif apabila dalam keadaan sehat, aktif dan produktif. Dampak negatif menjadi beban apabila memiliki masalah kesehatan dan sosial. Diperoleh keterangan banyak lanjut usia yang belum sepenuhnya mendapat pelayanan sosial dan kesehatan karena baru 11,13 %. (Kementerian Kesehatan; 2017; BPS; 2020, Kementerian Dalam Negeri; 2012).

Di Provinsi Jawa Timur terdapat 5.376.672 jiwa lanjut usia, diantaranya 2.345.388 jiwa lanjut usia termasuk dalam kategori kurang mampu dan rentan. Penduduk Kabupaten Lumajang berjumlah 1.053.425 jiwa, diantaranya terdapat 360.324 jiwa (34,20%) sebagai lanjut usia. Berdasarkan laporan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang hanya sebagian yang menerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan, Asuransi Sosial Lanjut Usia, dan bantuan sosial permakanan. Masih banyak lanjut usia yang belum mendapat bantuan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang melalui Program Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lansia) hanya bisa membina 115.303 jiwa lanjut usia, dan sisanya belum dibina (DSPPPA Kabupaten Lumajang; 2021; Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang; 2021).

1.1. Kerangka Konsep

Pelayanan Sosial. secara kelembagaan pelayanan sosial lanjut usia dengan dua cara. Pertama, melalui keluarga. Perhatian keluarga di perkotaan sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tidak mempunyai waktu melayani dan merawat orang tuanya. Tetapi kondisi keluarga tertentu masih berperan dalam melayani orang tua karena terkait dengan tuntunan agama dan aspek budayanya. Anak dan anggota keluarga lain tetap memperhatikan kesejahteraan orang tuanya. Kedua, melalui lembaga. Dilakukan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Khusus pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk panti sosial menggunakan dana rutin tahunan. Hal ini menjadi pilihan terakhir bagi keluarga yang sibuk dengan pekerjaannya atau lanjut usia telantar. Banyak juga masyarakat membentuk lembaga sosial atau organisasi sosial melakukan kegiatan pelayanan sosial terhadap lanjut usia. Pelayanan sosial melalui lembaga sosial juga sebagai peluang bagi masyarakat yang ikut serta dalam melayani dan merawat lanjut usia.

Setyo Sumarno dan Achmadi Jayaputra

Pelayanan Sosial Lanjut Usia Masa Krisis di Kabupaten Lumajang

Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kebijakan sosial (Midgley; 2000) diwujudkan dalam tiga kategori; perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan sosial secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang mampu (Edi Suharto; 2007; 10 -12). Lanjut usia termasuk kelompok rentan dan masih banyak yang kurang mampu, serta sebagian besar masih tergantung dengan orang lain. Walaupun keberadaannya di lingkungan keluarga, sehingga harus ada lembaga yang berperan serta agar lanjut usia melaksanakan fungsi sosialnya.

Empat aspek kehidupan lanjut usia yang mengalami perubahan. Pertama, aspek sosial ditandai semakin berkurangnya interaksi sosial lanjut usia dengan orang lain dan semakin terbatasnya kesempatan lanjut usia untuk mengaktualisasi diri. Kedua, aspek ekonomi ditandai dengan hilangnya pekerjaan atau menurunnya penghasilan lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia. Namun bagi lanjut usia yang masih produktif masih mampu dan merasa dihargai ketika masih diperkenankan untuk mengembangkan kemampuannya.

BPS (2022), tahun 2021 terdapat 49,46 % lanjut usia bekerja di sektor informal diartikan sebagai kondisi fungsional lanjut usia yang berada pada kondisi optimal, sehingga memungkinkan lanjut usia menikmati masa tua dengan penuh makna, membahagiakan, berguna dan berkualitas. Namun bagi lanjut usia yang ketergantungan atau lanjut usia yang tidak produktif membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hasil penelitian yang dilakukan Phadli Hasyim Harahap dkk (2020), lebih dari 60 % dari jumlah responden lanjut usia mengeluh mengalami masalah kesehatan. Terutama penyalit krosis, dan hampir 70 % lanjut usia tidak lagi memiliki penghasilan karena tidak lagi memiliki sumber pendapatan yang pasti. Kelompok ini terutama yang pada awalnya bekerja pada sektor informal, lain halnya bagi lanjut usia yang dulunya bekerja pada sektor formal yang jumlah mencapai kurang dari 5 %.

Ketiga, aspek fisik dengan kondisi lanjut usia secara nyata ditandai dengan kulit keriput, kesehatan menurun, rambut memutih, gigi banyak yang tanggal, semakin berkurangnya kemampuan dan keberfungsian fisik yang berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Keempat, aspek mental ditandai menurunnya daya ingat, proses berfikir, emosi yang tidak terkendali dan menurunnya rasa percaya diri. Menurunnya kondisi fisik mental lanjut usia, berpengaruh pada peran lanjut usia dalam pembangunan sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat. Sebaliknya bagi lanjut usia yang masih potensial perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap melakukan tugas dan dapat berkontribusi dalam keluarga dan lingkungan.

Aktivitas para lanjut usia dapat memperoleh kepuasan dan kebahagiaan, maka dengan demikian kepuasan dan kebahagiaan lanjut usia tergantung bagaimana keluarga dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia. Merupakan suatu penghargaan bagi lanjut usia yang masih produktif, ketika memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ia miliki. Baik di segi ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan. Justru akan memberi kekuatan mental kepada lansia yang diberi kesempatan. Kondisi tersebut diperkuat dengan proses beralihnya fungsi-fungsi keluarga, sehingga secara perlahan-lahan keluarga akan mengalami degradasi peran sebagai wadah dan wahana pembinaan kualitas anggota keluarganya. Hal ini akan berdampak pada kurang atau tidak harmonisnya hubungan antar keluarga termasuk di dalamnya hubungan dengan keluarga yang telah berusia lanjut.

Faktor yang mempengaruhi pelayanan sosial terhadap lanjut usia:

- 1) Makin menguatnya tipologi keluarga inti atau keluarga batih, akibatnya pada pergeseran nilai dan pandangan keluarga terhadap lanjut usia.
- 2) Terjadinya perubahan fungsi dan peran keluarga, akibatnya makin sulitnya lingkungan untuk mampu memberikan pelayanan terbaik demi pemenuhan kebutuhan lanjut usia.
- 3) Menguatnya kebutuhan lanjut usia sebagai akibat dari pengaruh perubahan fisik dan psikologis yang terus mengalami penurunan.

- 4) Munculnya daya dobrak bagi lanjut usia untuk menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh perwujudan karier kedua.

Pelayanan kepada lanjut usia dilakukan untuk merespon berbagai permasalahan lanjut usia yang disebabkan menurunnya fungsi tubuh yang berdampak pada berkurangnya kemampuan lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga hidupnya bergantung kepada orang lain. Nilai budaya masyarakat yang bergeser dari keluarga besar (*extended family*) menjadi keluarga kecil atau keluarga inti (*nuclear family*). Era globalisasi pada umumnya setiap anggota keluarga memiliki kegiatan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga tidak memiliki waktu bersama lanjut usia yang ada dalam keluarganya, sementara lanjut usia yang memiliki berbagai kekurangan baik sosial, mental, fisik maupun ekonomi, membutuhkan keluarga mendampinginya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia perlu lembaga yang merupakan alternatif terakhir untuk memberikan pelayanan kepada lanjut usia.

Masa krisis atau peristiwa darurat atau kemelut adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang memengaruhi individu, kelompok, komunitas atau seluruh masyarakat. Krisis membawa perubahan negatif dalam urusan keamanan, sosial atau lingkungan. Ketika krisis terjadi tiba-tiba, maka terjadi tekanan psikologis dan harus diambil tindakan atas penyebabnya. Segu, Sellnow, and Ulmer (1990) ada empat karakteristik krisis; spesifik, tidak terduga, tidak rutin, peristiwa ketidakpastian, dan ancaman yang tinggi. Ada empat tahap krisis (Stevin Fink); Prodromal, gejala krisis, potensi krisis diabaikan; Akut, muncul kerusakan, reaksi, dan isu-isu; Kronis, terjadinya tidak dapat diprediksi kapan berakhir, dan Resolusi, masa penyembuhan (Siti Qona'ah, 2020).

Lembaga. Lembaga yang dimaksud lembaga pemerintah, masyarakat dunia usaha ataupun perguruan tinggi. Peran yang dapat dilakukan pekerja sosial adalah sebagai manajer yang dapat melakukan restrukturisasi ini semata-mata untuk penanganan masalah sosial. Bidang praktik pekerja sosial (Syarif Muhidin Abdurahman; 2018: 18) dapat ditemui pada pelayanan sosial yang meliputi antara lain; pelayanan sosial lanjut usia pada lembaga asuhan dan perawatan lanjut usia, pekerja sosial pada masalah-masalah kependudukan dan Keluarga Berencana.

Keikutsertaan atau peran serta masyarakat secara swadaya dan gotong royong merupakan modal utama dan potensi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat perdesaan. Swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Peran serta aktif masyarakat dalam program pembangunan memerlukan kesadaran masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama (Isbandi Rukminto Adi; 2001: 206 - 207).

Penelitian tentang Edukasi dan Skrining Kesehatan pada Lanjut Usia di Era Pandemi Covid-19. Disimpulkan (Tomi Jepisa, dkk; 2022), setelah kegiatan; a) Terjadi peningkatan pengetahuan para lanjut usia tentang penyakit yang dialami di era Covid-19; b) Adanya perubahan perilaku menjadi lebih baik dan ke depan seluruh lanjut usia menjaga kesehatan; c) Meningkatnya pengetahuan keluarga dan masyarakat dalam mengatasi kesehatan lanjut usia, terjadinya peningkatan jangkauan pelayanan lanjut usia. Data dan keterangan hasil penelitian tersebut menunjukkan, bahwa pada masa pandemi Covid-19 atau masa krisis bencana non alam masih ada pemilihan pelayanan sosial terhadap lanjut usia. Terutama di lembaga sosial masyarakat, sehingga pelaksanaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan dana masing-masing.

2. Metodologi

Tahun 2022 Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas melakukan penelitian di Kabupaten Lumajang. Pelayanan sosial yang dilakukan dalam panti dan luar panti terhadap lanjut usia di masa krisis. Permasalahannya; bagaimana peran lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan sosial terhadap lanjut usia di masa krisis? Tujuannya; menemukan data dan keterangan pelayanan sosial lanjut usia yang dilakukan lembaga dan masyarakat, dan teridentifikasinya berbagai kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi masa krisis.

Pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono: 2017: 207 – 208) digunakan pada setiap komponen dalam proses kebijakan antara lain untuk; menggali dan menemukan permasalahan dan potensi kebijakan, memilih kebijakan yang perlu dirumuskan, evaluasi dan *out put* kebijakan. Prosedur kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, serta dari perilaku yang diamati. Metode ini menekankan pada fenomena yang diamati dan konteks makna yang melingkupi suatu realitas, menggambarkan situasi atau objek yang diteliti, lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, pendamping sosial, dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan pengamatan terhadap objek penelitian. Wawancara disusun dalam pedoman wawancara yang dilakukan terhadap tiga sasaran penelitian ini. Pertama, dua orang pemangku kebijakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Kedua, pelaksana kegiatan terdiri dari Koordinator, dua Pekerja Sosial, dan dua Perawat. Ketiga, serta pengurus lembaga sosial yang melakukan kegiatan terhadap lanjut usia.

Pedoman wawancara dalam bentuk pertanyaan menggunakan pendekatan analisa; Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) atau SWOT. Analisis SWOT sebagai teknik perencanaan strategi dalam penyelesaian masalah yang menekankan pentingnya peran faktor internal dan eksternal. Selain itu analisis Pestel dalam prinsip manajemen strategis sebagai alat untuk memantau lingkungan organisasi dalam memberikan pelayanan, atau untuk mengantisipasi situasi makro yang memengaruhi situasi organisasi di masa mendatang. Pengertian faktor-faktor Pestel terdiri; politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legal (Fadli Ilyas; 2021; Alanzi; 2018).

3. Hasil Penelitian

Kebijakan Kementerian Sosial (2002) terkait dengan pelayanan sosial terhadap lanjut usia telantar menetapkan dua model pelayanan lanjut usia. Pertama, Pelayanan Sosial dalam Panti yaitu sistem pelayanan sosial terhadap lanjut usia dilakukan dalam panti atau asrama. Panti milik pemerintah dengan sebutan Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW), dan milik masyarakat dengan berbagai sebutan. Seperti panti, pondok, dan lain-lain. Jenis pelayanan; penampungan, jaminan hidup, pakaian, pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu luang, bimbingan sosial dan bimbingan agama, serta permakaman. Panti lanjut usia yang didirikan Kementerian Sosial merupakan percontohan bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Kedua, Pelayanan Sosial luar Panti sistem pelayanan sosial terhadap lanjut usia melalui penyantunan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Model pelayanan sosial di keluarga sendiri (*home care services*), pelayanan sosial keluarga pengganti (*foster care services*), bantuan paket usaha, perlindungan sosial, dan aksesibilitas.

Hakekatnya pelayanan sosial lanjut usia bertumpu pada pekerjaan sosial, hak asasi, keterpaduan, aksesibilitas, dan peran serta. Prinsip pelayanan sosial merupakan nilai-nilai dasar sebagai suatu kegiatan dengan memberikan pelayanan terbaik bagi lanjut usia. Secara fisik tidak atau kurang berdaya, sehingga memerlukan pertolongan orang lain yang bersifat material dan spiritual. Jika tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan masalah baru.

Tahun 2021 Kementerian Sosial mengenalkan kegiatan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSILU) merupakan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial, Aksesibilitas dan asistensi sosial.

Tujuan umum yaitu meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan khusus antara lain :

- 1) Meningkatnya lanjut usia yang dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi: mampu melakukan perawatan diri, mampu menghadapi masalah sosial psikologis, mampu melakukan aktualisasi diri sesuai potensi yang dimiliki, dan mampu kembali ke keluarga,
- 2) Meningkatnya keluarga lanjut usia yang mampu melaksanakan perawatan/pengasuhan/perlindungan sosial,

- 3) Meningkatnya komunitas/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mampu melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial,
- 4) Meningkatnya sumber daya manusia yang mampu melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial.

Khusus di Kabupaten Lumajang, belum ada sentuhan Asistensi Rehabilitasi Lanjut Usia. Selama ini hanya melakukan pelayanan sosial terhadap usia yang berada dalam Griya Lanjut Usia. Menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas pada pemberian makanan secara rutin dan bantuan lainnya. Sedangkan kegiatan dalam penanggulangan bencana alam langsung dilakukan Kementerian Sosial dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBD) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan kegiatan langsung dilakukan di pos komando yang didirikan secara tetap dan di titik-titik lokasi pengungsian yang berada di desa tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelayanan sosial terhadap lanjut usia sebagai berikut.

3.1. *Bencana*

Masa Krisis. Gunung Semeru merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa. Termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung Semeru tingginya 3.676 meter diatas permukaan laut, tempat tertinggi dengan sebutan Puncak Mahameru. Cakupan Gunung Semeru terluas dalam wilayah Kabupaten Lumajang, sebagian lagi masuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo. Melansir laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG; 2021), ada catatan letusan tahun 1818 dan secara mulai tahun 1945 saat ini meletus dalam skala kecil atau besar dan erupsi dua sampai tiga atau empat kali dalam setahun. Terakhir dalam tahun 2020 dan 2021 Gunung Semeru sering terjadi gempa dalam skala besar dan kecil yang menimbulkan erupsi. Erupsi merupakan suatu proses pelepasan material gunung berapi berupa lava, gas, abu, lahar panas dan lahar dingin. Wilayah terparah di tenggara dan selatan Kabupaten Lumajang yaitu ke arah Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Banjir terjadi di tiga wilayah; Kecamatan Rowokangkung, Kecamatan Jatoroto, dan Kecamatan Josowilangun., sehingga masyarakat harus menjauh 7 – 13 Kilometer untuk menghindari bahaya dari lahar dingin atau awan panas.

Bencana alam menimbulkan korban manusia, korban hewan, dan lain-lain. Sebagian harus mengungsi ke tempat yang lebih aman sebagai tempat pengungsian. Seperti ke masjid, mushola, gedung sekolah, dan kantor pemerintah lainnya. Tercatat pengungsi mencapai 1.969 orang sampai 2.000 orang. Situasi darurat dalam penanggulan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang, dan lembaga lain terkait dengan kebencanaan. Situasi darurat dialami, sehingga ada penanganan khusus bagi pengungsi. Secara sepihak keluarga mencoba melindungi seluruh anggota keluarganya dan khususnya lanjut usia diperhatikan secara baik dalam pemenuhan kebutuhan dengan kondisi seadanya. Akhir-akhir ini di pengungsian sudah ada perhatian khusus atau suatu tempat diisi kaum perempuan, anak-anak, dan lanjut usia. Semua kebutuhan disesuaikan dengan keperluan kelompok usia tersebut, khusus lanjut usia diperhatikan dari aspek kesehatan dan permakanan.

Bersamaan dengan bencana alam tersebut, muncul bencana non alam atau bencana non sosial ditandai dengan munyebarnya Covid-19 diikuti dengan masa pandemi Covid-19. Semua kelompok masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Dimulai dengan pencegahan penyebaran virus tersebut. Antara lain pemberian vaksin, menjaga kesehatan, pemberian obat-obatan, dan sebagainya. Bagi yang terkena mendapat perawatan sesuai waktunya, isolasi, dan sebagainya.

3.2. *Griya Lanjut Usia*

Griya Lanjut Usia berdiri pada tanggal 28 Desember 2006 yang diawali dari banyaknya peserta pengajian ibu-ibu yang aktif di Masjid Agung Anas Mahfudz, Lumajang. Kebanyakan peserta pengajian terdiri dari para lanjut usia perempuan dari keluarga kurang mampu dan tidak memiliki tempat tinggal. Sebagian besar mereka memilih untuk tinggal di dalam masjid agar bisa mengikuti pengajian secara rutin. Lambat laun kehadiran mereka dirasa mengganggu para peserta lain yang ikut

pengajian. Menyikapi hal tersebut Ibu Fauzia selaku pembina dan penggerak pengajian memiliki ide membuat rumah tinggal yang berdekatan dengan lingkungan masjid. Atas persetujuan Bupati Lumajang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mendirikan Griya Lanjut Usia Gerbang Mas. Lokasinya di atas tanah milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di Jalan Jenderal DI Panjaitan Nomor 4, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Nomor 460/319/427.48/2007 Tentang Penetapan Petugas Pendamping Lanjut usia Panti Sosial Gerbang Mas. Struktur organisasi terdiri dari seorang koordinator, dibantu seorang petugas admistrasi, seorang petugas panti, seorang petugas jaga malam, dua pekerja sosial dan dua perawat. Sarana dan prasarana, berdiri di atas tanah seluas 964 m², bangunan memadai, ada kamar dan kamar mandinya, serta aula. Bangunan tersebut masih milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang. Ruang yang dikhususkan untuk ditempati lanjut usia jumlah penghuninya tidak sama karena tergantung dari luas ruangan. Tiap kamar tersebut terdapat dua ruangan yang dihuni masing-masing satu orang. Mereka yang tinggal di kamar sendiri karena tidak bisa berkumpul dengan lanjut usia yang lain. Satu kamar lagi karena mereka terjangkit HIV/AIDS.

Penghuni Griya Lanjut Usia Gerbang Mas berjumlah 15 orang lanjut usia. Diantaranya 9 orang terus menerus berada di tempat tidur (*bedridden*), sehingga harus dibantu pekerja sosial dan perawat. Perawatan mulai dari memandikan, menyisir, memotong kuku, berpakaian, menyuapkan makanan sampai dengan buang air kecil dan buang air besar. Lanjut usia yang tidak berdaya tersebut ditempatkan di ruangan tersendiri. Disediakan kursi roda yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Bagi yang masih sehat dan dapat melakukan kegiatan secara mandiri, serta tetap dalam pengawasan pekerja sosial dan perawat. Misalnya ikut ngaji, sholat, bercengkerama dengan sesama lanjut usia, nonton televisi, dan lain-lain.

Khusus yang tinggal di Griya Lanjut Usia Gerbang Mas, para lanjut usia mendapatkan vaksin dua kali dari Puskesmas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar kesehatannya tetap terjaga, sehingga tidak mudah tertular oleh virus tersebut. Vaksin booster belum diberikan kepada lanjut usia karena ada kekhawatiran dengan kondisi lanjut usia. Kemudian terkait dengan situasi tertentu. Misalnya apabila ada lanjut usia yang meninggal, biasanya Griya Lanjut Usia Gerbang Mas bekerjasama dengan RSUD Lumajang untuk penanganan mulai memandikan sampai pemakaman.

Mulai tahun 2018 kebutuhan lanjut usia ditanggung melalui Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Operasional awal Griya Lanjut Usia dilakukan oleh 6 orang petugas dengan melayani lanjut usia (klien) sebanyak 15 orang. Penghuni seluruhnya kaum perempuan dan usianya bervariasi dari berumur 56 tahun sampai usia paling tua 113 tahun. Lanjut usia yang dirawat 15 orang, diantaranya 9 orang sudah tidak bisa apa-apa dan memerlukan bantuan perawat. Perawatan mulai dari memandikan, menyisir, memotong kuku, berpakaian, menyuapkan makanan sampai dengan buang air kecil dan buang air besar. Lanjut usia yang tidak berdaya tersebut ditempatkan di ruangan tersendiri dan disiapkan kursi roda yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Bagi mereka yang masih sehat dan dapat beraktivitas sendiri diawasi pekerja sosial dan perawat. Misalnya ikut ngaji, sholat, bercengkerama dengan sesama lanjut usia, nonton televisi, dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat. Catatan yang perlu diketahui. Pertama, Pasal 1 ayat 10, bahwa Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat adalah Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat. Pasal 2 (1), Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Lanjut Usia adalah unsur pelayanan sosial di bawah pembinaan Dinas Sosial.

Kedua, Pasal 4, bahwa Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat mempunyai fungsi.

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pengelolaan kesejahteraan sosial lanjut usia dalam Griya Lanjut Usia.
- 2) Penyelenggaraan pelayanan sandang, pangan, kesehatan, bimbingan sosial dan pengembangan kesejahteraan lanjut usia dalam Griya Lanjut Usia,

- 3) Evaluasi dan pelaporan pengelolaan kesejahteraan lanjut usia dalam Griya Lanjut Usia,
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas ketatalaksanaan.

Tentunya dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang dalam bentuk pelayanan sosial langsung dalam panti. Pelaksanaannya mencakup pelayanan luar panti yang disebut Griya Lanjut Usia atau Griya Lansia. Walaupun demikian kegiatannya mencakup luar panti.

3.3. *Pelayanan Sosial terhadap Lanjut Usia lainnya*

Kearifan lokal. Kondisi pelayanan Griya Lanjut Usia serba terbatas baik dari kepemilikan sarana prasarana maupun pelayanan yang lainnya. Namun kearifan lokal yang ada di masyarakat masih terpelihara dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia. Khususnya dalam pemenuhan kebutuhan makan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya. Dapat dilihat dari kesehariannya dalam memberikan kebutuhan tambahan makanan silih berganti baik secara perorangan, keluarga maupun kelompok peduli lanjut usia. Secara sukarela mereka memberikan makanan, olah raga atau senam untuk menjaga kesehatan, pengajian ataupun kegiatan lainnya. Masyarakat juga masih memegang teguh falsafah yang dianut secara turun temurun dengan istilah *mangan ora mangan kumpul* artinya makan tidak makan kumpul. Makna didalam falsafah ini tinggi, bahwa nilai kebersamaan, kegotongroyongan, saling memperhatikan, menghargai satu sama tetap dipegang teguh. Bahkan perawatan, pelayanan terhadap orang tua atau lanjut usia sangat dijunjung tinggi. Walaupun kondisi ekonomi anak-anaknya tidak berlebihan. Masyarakat punya prinsip jangan sampai orang tua atau lanjut usia jauh dari mereka. Apalagi tinggal di panti. Menurut mereka panti alternatif terakhir apabila lanjut usia tidak mempunyai keluarga, sanak saudara atau tetangga yang bersedia untuk merawatnya.

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pelayanan sosial terhadap lanjut usia memperhatikan dan mendukung beberapa kegiatan yang dilakukan antar lembaga pemerintah, dan lembaga sosial lainnya. Lembaga sosial antara lain; Persatuan Wredatama Republik Indonesia, Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga, Lembaga Lanjut Usia Indonesia Abiyoso, Komisi Daerah Lanjut Usia, Kelompok Kerja Lanjut usia, dan Sekolah Lanjut Usia Tangguh. Kegiatan yang dilakukan umumnya langsung terhadap anggotanya. Hanya saat tertentu memberikan sumbangan atau santunan terhadap lanjut usia di Griya Lanjut Usia atau daerah tertentu. Diketahui pula beberapa diantaranya tidak lagi melakukan kegiatan karena alasan tertentu dan Pandemi Covid – 19.

4. Pembahasan

Keberadaan Griya Lanjut Usia Gerbang Mas di Kota Lumajang telah berperan dalam menampung lanjut usia telantar dan memerlukan bantuan orang lain. Hanya tiga lanjut usia yang mempunyai anggota keluarga dengan kondisi kurang mampu.

Tabel 1. Analisis SWOT Griya Lanjut Usia Gerbang Mas

Strengths (S)	Weaknesses (W)
- Adanya perundang-undangan berlaku secara nasional sampai ke daerah. - Keberadaan Lembaga Griya Lanjut Usia Gerbang Mas. - Ekonomi masyarakat berpengaruh, sehingga klien yang diterima lanjut usia telantar dan tidak mampu. - Sulit mengembangkan klien karena sebagian besar berada di tempat tidur. Hanya empat	- Pemerintah Kabupaten Lumajang belum menindaklanjuti tugasnya dalam pendirian panti - Secara politik belum bergerak karena masih mengandalkan kerjasama dengan Kementerian Sosial - Pelayan dan perawatan dalam panti berurang. Saat ini hanya untuk 15 lanjut usia - Pembiaran dilakukan anggota keluarga karena faktor ekonomi keluarga

Setyo Sumarno dan Achmadi Jayaputra

Pelayanan Sosial Lanjut Usia Masa Krisis di Kabupaten Lumajang

- nenek-nenek yang dapat melakukan kegiatan mandiri. - Tidak ada kearifan lokal. Pelayanan keluarga mampu terhadap lanjut usia. - Dukungan teknologi untuk keperluan terbatas. - Data dan informasi sudah menyesuaikan kebutuhan teknologi yang dilakukan Pekerja Sosial dan fungsional lainnya - Sampah organik dibuang pada tempat sampah akhir yang ada di lingkungan panti karena lahan masih luas - Limbah non organik dikumpulkan akan diangkut Dinas Kebersihan Kabupaten Lumajang - Panti sudah menerapkan pelayanan minimal bagi lanjut usia.	- Peralatan hanya terkait dengan keperluan individu - Terbatasnya kebijakan pemerintah kabupaten dalam pelayanan lanjut usia
Opportunities (O)	Threats (T)
- Meluaskan sarana dengan manambah kamar baru - Pemanfaatan ruangan yang jarang dipakai - Kesempatan masyarakat untuk ikut serta merawat lanjut usia - Data tunggal lanjut usia yang tinggal di Griya Lanjut Usia Gerbang Mas.	- Kurangnya perhatian dalam program pelayanan dan perawatan terhadap lanjut usia - Belum maksimal dalam pelayanan dan masih mengandalkan bantuan dari Kementerian Sosial

Faktor Politik. Kekuatan; adanya perundang-undangan berlaku secara nasional sampai ke daerah yang dibentuk semacam peraturan daerah, peraturan gubernur, bupati dan walikota. Kelemahan; tidak berkembang karena anggaran tersedia hanya untuk 15 lanjut usia hanya untuk perempuan atau nenek-nenek, tidak ada dukungan politik untuk menambah lebih banyak lagi padahal masih tersedia ruangan yang memadai. Kondisi politik lokal yang tidak mendukung pelayanan terhadap lanjut usia dan hanya bisa memberikan permakanan untuk 15 orang nenek-nenek. Kapasitas tampung bisa 20 orang, namun mengingat yang mendapatkan anggaran untuk permakanan setiap tahunnya hanya 15 orang, maka hanya yang mendapatkan santunan permakanan. Belum adanya pengaruh perubahan secara nasional di Kementerian Sosial yang merubah balai selama ini menjadi Sentra Pelayanan Rehabilitasi Sosial, dibawahnya ada panti yang dimiliki Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Faktor Ekonomi; kelemahannya; ekonomi masyarakat berpengaruh sehingga yang diterima sebagai klien lanjut usia terdiri dari orang-orang telantar dan tidak mampu, sehingga bergantung pada kemampuan lembaga, sulit mengembangkan klien karena hampir semuanya berada ditempat tidur. Hanya empat nenek-nenek yang lincah, dapat jalan-jalan, sholat dan lain sebagainya. Peluang dilihat dari kegiatan penanaman palawija di lingkungan griya.

Faktor Sosial; hanya religi yang membuat nenek-nenek bertahan dalam keseharian dan membungkus kesepian karena saat usia tua baru belajar agama. Kedatangan ustad atau ustazah membuat mereka bergairah dalam mengarungi kehidupan. Kelemahan; banyak keluarga yang tidak mampu menghidupi lanjut usia dirumahnya, perawatan lanjut usia lebih baik di Griya Lanjut Usia Gerbang Mas. Peluang dengan melihat adanya kesempatan masyarakat sangat luas untuk ikut serta merawat lanjut usia.

Faktor Teknologi: kelemahannya, tidak ada dukungan teknologi, semua mengandalkan dan memanfaatkan situasi yang ada. Seperti alat kebersihan memenuhi syarat minimal, sehingga dapat digunakan dalam keperluan sehari-hari. Peralatan elektronik yang ada hanya televisi yang digunakan sebagai sarana hiburan para nenek-nenek. Komputer untuk menyusun laporan kegiatan di Griya Lanjut Usia Gerbang Mas. Peluang berupa, data lanjut usia berupa data tunggal. Seperti, nama, NIK, tempat dan tanggal lahir yang semuanya terpampang di papan penghuni Griya Lanjut Usia Gerbang Mas. Kecuali bagi yang sudah meninggal nama yang terpampang di papan segera dicopot dan beberapa hari kemudian berdasarkan verifikasi calon penghuni dapat dimasukkan.

Faktor Environmental; kekuatan dari lingkungan Griya Lanjut Usia Gerbang Mas letaknya cukup strategis karena posisinya di tengah kota dan gedung memadai. Kelemahannya; perbaikan ruangan perlu dilakukan tetapi tidak ada anggaran untuk pendukungnya, pengelolaan sampah masih dilakukan secara sederhana sampah dikumpulkan dalam tong sampah.

Faktor Legal; kekuatan yang bisa diandalkan antara lain; sebagai peluang dalam memperbaiki lingkungan dan gedung yang memadai walau bentuknya bangunan lama, banyak kebijakan yang diterbitkan terkait dengan permukiman. Kelemahan; tidak adanya kebijakan yang mendukung perbaikan Griya Lanjut Usia Gerbang Mas, maka dibiarkan seadanya. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang tidak mempunyai dana untuk keperluan lain.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kesimpulan. Pertama, pelayanan sosial terhadap lanjut usia di Griya Lanjut Usia Gerbang Mas tidak ada hubungannya dengan bencana alam akibat letusan Gunung Semeru karena lokasinya jauh dari Kota Lumajang. Pelayanan sosial secara langsung di lokasi bencana sudah dilakukan antara lain; pemisahan pengungsi dalam satu lokal terdiri dari kaum perempuan, anak-anak, dan lanjut usia, serta memberikan kebutuhan dasar kepada lanjut usia. Sedangkan pelayanan di Griya Lanjut Usia Gerbang Mas hanya untuk lanjut usia telantar. Kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan dasar lanjut usia, dan penerapan protokol kesehatan dalam mencegah terjangkitnya Covid-19. Selama ini tidak ada yang menderita virus tersebut.

Kedua, semua Pekerja Sosial dan Perawat kedudukannya masih honorer dengan masa kerja lebih dari lima tahun, kecuali koordinator Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan dalam panti dan luar panti belum tersentuh Atensi Lanjut Usia yang dicanangkan Kementerian Sosial. Selama ini bantuan permukiman masih mengendalkan anggaran Pemerintah Kabupaten Lumajang. Ada juga bantuan sosial bersifat kadangkala atau spontanitas dari kelompok pengajian, lembaga sosial, perguruan tinggi, dan perorangan.

Ketiga, berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut. Kekuatan; adanya perundang-undangan yang berlaku secara nasional, kuatnya perhatian masyarakat dan keluarga terhadap lanjut usia, dan banyak lembaga masyarakat yang melakukan pelayanan terhadap lanjut usia. Kelemahan; pemerintah daerah belum menindaklanjuti pembagian tugas pelayanan lanjut usia yang menjadi wewenang, pelayanan terhadap lanjut usia dalam panti semakin berkurang, dan terbatasnya aspek teknologi dalam pelayanan terhadap lanjut usia. Peluang; terjalinnya kerjasama pemerintah dengan masyarakat, keluarga menjadi tumpuan dalam melayani lanjut usia. Ancaman; masyarakat dan keluarga masih mengandalkan bantuan pemerintah, menurunnya ekonomi keluarga, dan terbatasnya aspek teknologi terhadap kebutuhan lanjut usia.

6. Saran

Program dan kegiatan Atensi Lanjut Usia dalam pelaksanaannya memerlukan penajaman agar difahami pemangku kebijakan di daerah. Adanya Griya Lanjut Usia Gerbang Mas, perlu mendapat perhatian serius untuk pengembangan dan penjangkauan.

Sesuai dengan fungsi lembaga sosial di daerah memerlukan pedoman pelayanan lanjut usia di masa krisis. Diharapkan peran timbal balik pemerintah terhadap masyarakat. Diantaranya membentuk

Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSU) yang dapat membantu kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta; LPFEUI.
- Amalia, Ayudiah. (2012). "Lanjut Usia: Teori, Masalah, dan Kebutuhan Perawatan" dalam *Anak dan Lanjut Usia dalam Bingkai Kesejahteraan Sosial*, hal 97 – 104.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Penduduk Indonesia Lanjut Usia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chu C.H., Amanda V.L., & Vivian S. (2022). "It's the worst thing I've ever been put through in my life": the trauma experienced by essential family caregivers of loved ones in long-term care during the COVID-19 pandemic in Canada. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*. Vol. 17, 2075532, pp. 1-17.
- Kabupaten Lumajang, 2021. *Laporan Pelaksanaan Posyandu Lansia 2021*. Lumajang; Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
-, 2021. *Laporan Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial*. Lumajang; Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- Doron, I.I. (2021). "Care and Support for Older Persons: Post Covid-19." *Expert Group Meeting on Building Forward Better for Older Persons post COVID-19 Virtual meeting*, Center for Research & Study of Aging University of Haifa, Haifa.
- Elman, A., Daniel B., Elaine G., Michael E.S., Mary R.M., Amy S., Morgan P., Michelle S., Sunday C., Timothy F.P.-M., Rahul S., Tony R. (2021). "Unmet Needs and Social Challenges for Older Adults During and After the COVID-19 Pandemic: An Opportunity to Improve Care." *Journal of Geriatric Emergency Medicine* Volume 2, Issue 11, pp.1-9.
- Glen, A. (1993). "Methods and Themes in Community Practice". In *Community and Public Policy*. Buther, H. et. all (Eds). London: Pluto
- Hadi, Samsul, dkk. (2011). *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Lakbang Grafika.
- Hindmarch W., Gwen M.G., Kristin. F., Deirdre M.C. (2021). "COVID-19 and Long-Term Care: The Essential Role of Family Caregivers." *Canadian Geriatrics Journal*, Vol. 24 No. 3, pp.195-199. Faculty of Medicine, University of Calgary.
- Jayaputra, Achmadi. (2021). *Masa Depan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Multi Inovasi Mandiri.
- (2022). "Pelayanan Lanjut Usia pada Lembaga Masyarakat", dalam *Pengembangan Pelayanan Sosial Lanjut Usia*, hal 112 – 130.
- Jepisa, Tomi, dkk. (2022). "Eduksi dan Skrining Kesehatan pada Lanjut Usia di Era Pandemi Covid-19", *Jurnal Abdidas*, Vol 3, No 2, hal 246 - 251.
- Kementerian Kesehatan. (2020a). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19*. Jakarta; Departemen Kesehatan.
- (2020b). *Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta; Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- Kementerian Sosial. (2019). *Pedoman Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma*. Bekasi: BRSLU Budhi Dharma.
- (2020). *Perlindungan Sosial Lanjut Usia Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Puslitbangkesos.
-(2021). *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Nuryana, Mu'man, dkk. (2022). *Pengembangan Pelayanan Sosial Lanjut Usia*. Tangerang: Mahara Publishing.
- Pujileksono, Sugeng, dkk. (2018). *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Malang; Intrans Publishing.
- Shamadiyah, Nurasih. (2012). "Pemberdayaan dan Pelayanan Lanjut usia", *Anak dan Lanjut Usia dalam Bingkai Kesejahteraan Sosial*, hal 109 -123.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.
- (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Swaesti, Eista. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus*. Yogyakarta: Javalitera.
- Swaesti, Eista. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus*. Yogyakarta: Javalitera.
- Witono, Toton. (2015). *Spiritual untuk Kesehatan Mental Lanjut Usia dalam Konteks Pelayanan Sosial* (Disertasi Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI).
- Yuniarsih, Sri Mumpuni, dkk. (2021). "Gerakan Sayang Lanjut Usia (Grasia) Masa Pandemi Covid-19 di Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara Pernalang", *Jurnal ABDIMAS*, Vol 2, No 2, Juli, hal 50 – 56
- Daisuke Miyamori, Shuhei Yoshida, "Saori Kashima, Soichi Koike, Shinya Ishii and Masatoshi Matsumoto (2022).

Discontinuation of Long-term Care among Persons Affected by the 2018 Japan Floods: a Longitudinal Study Using the Long-term CareInsurance Comprehensive Database", *BMC Geriatric*. Volume 22, Article Number 168, pp 1-13.

Oxfam Discussion Papers. (2020). *Global Megatrends: Mapping the Forces that Affect Us All*, Oxfam GB for Oxfam International.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Muslim Sabarisman ^{1*} , Muhammad Belanawane Sulubere ² 

¹ Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas (KSDK), Badan Riset dan Inovasi Nasional 1, Jakarta, Indonesia

² Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP), Badan Riset dan Inovasi Nasional 2, Jakarta, Indonesia

* *Korespondensi: musl008@brin.go.id; Tel: (62)+08-1296- 4304-70

Diterima: tanggal 17 April 2023; Direvisi: 20 Desember 2023; tanggal; Diterbitkan: tanggal

Abstrak: Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah standar sesuai usianya. Stunting dapat berdampak buruk pada kesehatan dan produktivitas anak di masa depan. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi stunting melalui berbagai program, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program BPNT. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendampingan PKH dan Program BPNT dalam penanganan stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH dan Program BPNT memiliki peran penting dalam penanganan stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pendamping PKH berperan sebagai fasilitator, motivator, dan edukator dalam memberikan informasi dan edukasi mengenai stunting kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Program BPNT juga berperan penting dalam meningkatkan akses KPM terhadap pangan bergizi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendampingan PKH dan Program BPNT memiliki potensi untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kata kunci: stunting, pendamping PKH, Program BPNT, Penerima Manfaat

Abstract: Stunting is a chronic nutritional problem characterized by children's height below the standard for their age. Stunting can adversely affect children's health and productivity in the future. The Indonesian government has tried to overcome stunting through various programs, one of which is the Family Hope Program (PKH) and the Basic Food Program. This study aims to examine the role of PKH and BPNT Program assistance in handling stunting in North Bolaang Mongondow District. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The results showed that PKH and BPNT Program assistants have an important role in handling stunting in North Bolaang Mongondow District. PKH Facilitators act as facilitators, motivators, and educators in providing information and education about stunting to beneficiary families (KPM). The BPNT program also plays an important role in increasing KPM's access to nutritious food. Based on the research results, it can be concluded that PKH assistance and the Basic Food Program have the potential to reduce stunting rates in North Bolaang Mongondow District.

Keywords: stunting, PKH Facilitator, BPNT Program, Beneficiaries

1. Pendahuluan

Menurut Izwardy (2019), gizi buruk masih menjadi masalah global. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan penurunan angka stunting sebesar 2,8 persen dibandingkan dengan tahun 2021: "Angka stunting tahun 2022 turun dari 24,4 persen [tahun 2021] menjadi 21,6 persen. Jadi turun sebesar 2,8 persen" (Siti Nadia Tarmizi, Kemenkes, 2023). Karena itu, pada point kedua dari Sustainable Development Goals (SDGs), yang berjudul "Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan," stunting dimasukkan sebagai salah satu target. Melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah membuat komitmen untuk mencapai SDGs ini (P2PTM Kemenkes, 2018).

Menurut standar WHO (2012), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak karena gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulus psikososial yang tidak cukup. Nilai z-score tinggi badan menurut usia (TB/U) kurang dari 2 standar deviasi. Stunting biasanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi selama 1.000 hari pertama kehidupan, atau dari janin hingga bayi berusia dua tahun. Selain itu, penyebab lain termasuk fasilitas sanitasi yang buruk, kurangnya akses ke air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan. Jika kebersihan tidak terjaga, tubuh harus melawan sumber penyakit lebih lanjut, yang menghambat penyerapan gizi. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, menyebabkan keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko diabetes, hipertensi, dan obesitas.

Kurang gizi kronis menyebabkan stunting. Hal ini menyebabkan gangguan di masa depan, yang menyebabkan anak kesulitan mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang ideal. Anak-anak dengan stunting memiliki Intelligence Quotient (IQ) yang lebih rendah daripada rata-rata IQ anak-anak (Kemenkes RI, 2018). Selain itu, stunting pada anak menjadi salah satu penyebab ketidakseimbangan fungsional, kematian, masalah perkembangan motorik yang rendah, dan kemampuan berbahasa yang rendah (Anwar, Khomsan, Mauludyani, dan Ekawidyani, 2014). Stunting meningkatkan risiko beberapa penyakit, termasuk penurunan prestasi akademik, peningkatan kemungkinan obesitas, peningkatan kemungkinan penyakit tidak menular (Unicef Indonesia, 2013), dan peningkatan risiko penyakit degeneratif (Picauly & Toy, 2013).

Menurut beberapa penelitian, beberapa penyebab stunting termasuk faktor rumah tangga dan keluarga, seperti usia ibu pendek, hamil muda, dan bayi prematur; faktor lingkungan, seperti jamban sehat, air minum, kerawanan pangan, pendidikan orang tua, dan daya beli yang rendah; MP ASI dan infeksi, seperti ASI eksklusif, protein hewani, makanan bayi, dan diare; dan faktor masyarakat dan sosial, seperti akses layanan kesehatan dan tinggal di kota-kota (Izwardy, 2019).

Determinan Sosial Kesehatan mengacu pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan faktor kesehatan ini. Untuk mencegah stunting, penting untuk mempertimbangkan faktor sosial yang berkaitan dengan kesehatan dan kemiskinan. Kawasan tengah dan timur Indonesia, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Papua, memiliki tingkat stunting tertinggi, menurut Siahaan (2019). Hanya Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara yang memiliki tingkat stunting di bawah rata-rata nasional. Sebaran ini menunjukkan bahwa kemiskinan jelas terkait dengan stunting dan masalah kekurangan gizi balita lainnya. Orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga seringkali menyebabkan balita kekurangan gizi di daerah dengan kemiskinan tinggi.

Program Bantuan Beras bagi Keluarga Miskin (Raskin) dilaksanakan oleh pemerintah melalui program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk mengatasi masalah pemenuhan pangan bagi penduduk miskin. Nama program berubah menjadi Beras Sejahtera (Rastra) pada tahun 2016. Kemudian, pada tahun 2017, namanya berubah lagi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan berbagai perbaikan pada mekanisme penyalurannya (Habibullah et al., 2022). Program ini diubah menjadi Program BPNT pada tahun 2020 dengan meningkatkan indeks bantuan menjadi Rp150.000 dan meningkatkan penerima hingga 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Pedoman Umum Program BPNT, 2020).

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere

Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kementerian Sosial sudah tidak lagi memberikan bantuan sosial program BPNT dalam bentuk barang sejak 2021. Pradinantia (2023), menyebutkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, memastikan semua bantuan sosial Program BPNT diberikan berupa uang tunai ke KPM. Tahun 2021 direncanakan kembali kenaikan indeks bantuan menjadi Rp200.000/bulan, menasar hingga 18,8 juta penerima (Jawahir, 2021). Kemudian untuk tahun 2022 tepatnya di bulan Februari, Kementerian Sosial juga sudah menyalurkan Bansos BPNT melalui PT. POS di bulan Januari, Februari dan Maret yang dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga KPM mendapatkan nilai uang sebesar Rp.600.000, yang akan di salurkan sebanyak 18,8 juta penerima manfaat.

Peningkatan ini diikuti dengan persyaratan Bansos BPNT BPNT untuk menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan. Sebaliknya, diharapkan bahwa pengembangan jenis makanan yang didapatkan dari program ini akan mampu meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak usia dini, dan berkontribusi pada penurunan stunting (Pedoman Umum Program BPNT, 2020). Ini dimaksudkan untuk mendukung program prioritas nasional untuk meningkatkan pencegahan dan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi seimbang.

Data tentang prevalensi stunting yang dikumpulkan oleh WHO dan dirilis tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki prevalensi 36,4 persen, yang menjadi negara ketiga tertinggi di wilayah Asia Tenggara Selatan, setelah Timor Leste (50,5 %) dan India (38,4 %). (Pusdatin Kemenkes, 2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di tingkat nasional telah turun sebesar 6,4 persen selama periode 5 tahun, turun dari 37,2 persen (2013) menjadi 30,8 persen (2018). Sementara itu, prevalensi balita berstatus normal meningkat dari 48,6 persen (2013) menjadi 57,8 persen (2018). Adapun sisanya mengalami masalah gizi lainnya, angka prevalensi stunting nasional turun menjadi 27,67 persen pada 2019. Di Indonesia, prevalensi stunting masih di atas 20%, yang tidak mencapai target WHO untuk angka ideal di bawah 20%.

Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, pada akhir 2020 melakukan pemantauan pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi. Di Kabupaten Prioritas, pelaksanaan integrasi pencegahan stunting dievaluasi dan dinilai menggunakan delapan aksi konvergensi: (1) Analisis Situasi; (2) Rencana Kegiatan; (3) Rembuk Stunting; (4) Peraturan Bupati dan Walikota Tentang Peran Desa; (5) Pembinaan KPM; (6) Sistem Manajemen Data; (7) Pengukuran dan Publikasi Stunting; dan (8) Review Kinerja Tahunan. Kegiatan ini menciptakan bidang dengan predikat Inspiratif, Replikatif, dan Inovatif. Menurut aksi.bangda.kemendagri.go.id (2020), beberapa kabupaten menerima predikat tersebut, antara lain Blora (Jawa Tengah), Sumedang (Jawa Barat), Trenggalek (Jawa Timur), Pasaman Barat (Sumatra Barat), Bolaang Mongondow Utara (Sulawesi Utara), Bima (NTB), dan Rote Ndao (NTT).

Kesuksesan suatu daerah harus diangkat ke tingkat nasional agar dapat dicontoh dan direplikasi di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk mencegah stunting terintegrasi di daerah, daerah dapat melakukan terobosan program tertentu, mendapatkan dukungan dari pusat untuk menjalankan program, atau bahkan melakukan terobosan manajemen untuk mengatur program antar sektor dengan lebih baik. Hasil ini akan menjadi bagian dari inovasi daerah, di mana Dinas Sosial diharapkan berpartisipasi aktif dalam program-program Kementerian Sosial. Program-program Kementerian Sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program BPNT, adalah tanggung jawab Kementerian Sosial.

Kelompok masyarakat yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang paling miskin adalah target utama Program BPNT. Menurut pikiran-rakyat.com (2020), diperkirakan hingga 10 juta keluarga akan menerima PKH hingga 2020. Kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial adalah tiga persyaratan untuk penerimaan PKH. Salah satu sasaran utama dalam pencegahan stunting adalah ibu hamil dan anak-anak usia 0–6 tahun yang memiliki masalah kesehatan (Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021). Untuk memastikan kesehatan ibu dan bayinya, dimulai sejak hamil, melahirkan, hingga usia sekolah (usia dini), peserta PKH wajib mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), di mana pendamping PKH memberikan pelatihan, salah satunya modul Kesehatan dan Gizi yang memberikan panduan perilaku pencegahan stunting. Ini dilakukan untuk

mendukung program prioritas nasional untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui perubahan perilaku.

Untuk mencapai target pencegahan dan penurunan stunting, seluruh program harus diintegrasikan di beberapa kementerian. Untuk meningkatkan akses pangan bergizi, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dibuat pada tahun 2018 dan diikuti oleh perumusan strategi pelaksanaannya. Pemerintah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas) pada tahun 2018 untuk melakukan pencegahan stunting. Stranas akan dilanjutkan pada tahun 2021. Dokumen ini mencakup pendekatan yang digunakan pemerintah untuk mengurangi angka stunting di Indonesia. Lima pilar utama dalam penanganan stunting dijelaskan dalam dokumen Stranas ini: (1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan; (2) Kampanye dan Perubahan Perilaku Nasional; (3) Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Desa; (4) Ketahanan Pangan dan Gizi; dan (5) Pemantauan dan Evaluasi (TP2AK Setwapres, 2018).

Dengan menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas) pada tahun 2018, pemerintah berusaha untuk mencegah stunting. Setiap Kementerian atau Lembaga (K/L) yang terlibat diberikan tanggung jawab sesuai dengan output dan target tahun capaian yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Stranas ini. Sehubungan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor Kep 124/M.Ppn/Hk/10/2021, yang menetapkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024, yang disetujui pada tahun 2021.

Dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Stranas ini, tercantum semua Kementerian atau Lembaga (K/L) yang terlibat dan diberi tugas dengan output dan target tahun capaian masing-masing. Intervensi khusus mengatasi penyebab langsung stunting dan intervensi sensitif mengurangi stunting. Kementerian lain membantu melalui intervensi sensitif, sementara Kementerian Kesehatan adalah sektor utama dalam hal intervensi tertentu. Strategi penanganan stunting yang melibatkan intervensi terintegrasi di berbagai sektor.

Salah satu best practice tersebut melibatkan stake-holders daerah, seperti dinas sosial melalui peran Program BPNT dan Pendampingan Sosial PKH. Penurunan prevalensi stunting di berbagai daerah ini erat terkait dengan tingkat integrasi dan konvergensi program antar sektor di masing-masing daerah. Kesuksesan lokal harus diangkat ke tingkat nasional agar dapat dicontoh dan direplikasi di seluruh provinsi. Untuk mencegah stunting terintegrasi di daerah, daerah dapat melakukan terobosan program tertentu, mendapatkan dukungan dari pusat untuk menjalankan program, atau bahkan melakukan terobosan manajemen untuk mengatur program antar sektor dengan lebih baik. Hasil ini akan menjadi bagian dari inovasi daerah, di mana dinas sosial diharapkan berpartisipasi aktif dalam program Kementerian Sosial.

Menurut Rahayu et al. (2018), pencegahan stunting dapat dicapai melalui intervensi sensitif (mengatasi penyebab tidak langsung stunting) dan intervensi spesifik (mengatasi penyebab langsung stunting). Kementerian Kesehatan bertindak sebagai pemimpin dalam tindakan khusus, sementara kementerian lain membantu melalui tindakan sensitif. Kementerian Sosial diberi tugas untuk mencapai target output kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pilar kedua, Kampanye Nasional dan Perubahan Perilaku, dan pilar keempat, Ketahanan Pangan dan Gizi, terutama melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program BPNT (Muhtar et al., 2022). Intervensi sensitif yang mendukung percepatan pencegahan stunting adalah intervensi di luar sektor kesehatan. Faktor-faktor sosial yang tidak terkait dengan intervensi langsung dalam bidang kesehatan ini adalah bagian dari konsep Determinan Sosial Kesehatan. Faktor-faktor nonmedis ini berdampak pada kesehatan. Faktor-faktor ini mencakup kondisi kehidupan sehari-hari dan pekerjaan, tetapi tidak mencakup faktor risiko individual yang mempengaruhi risiko atau kerentanan terhadap penyakit atau cedera. Faktor-faktor ini termasuk faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor politik, dan sosial (Dahlgren, G. & Whitehead, M. 1991).

Faktor sosial kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan seseorang dan masyarakat. Studi telah menunjukkan bahwa faktor sosial memengaruhi kesehatan lebih banyak daripada faktor biologis atau genetik. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere

Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

tumbuh di lingkungan yang miskin dan tidak memiliki akses ke pendidikan yang baik lebih berisiko terkena penyakit jantung, stroke, dan diabetes daripada anak-anak di lingkungan yang lebih baik (Marmot, 2005). Selain itu, determinan sosial kesehatan dapat menyebabkan disparitas kesehatan. Disparitas kesehatan adalah ketidaksetaraan kesehatan yang terjadi antara kelompok masyarakat yang berbeda, seperti antara kelompok kaya dan miskin, atau antara kelompok urban dan rural. Disparitas kesehatan dapat terjadi karena perbedaan dalam kualitas hidup, akses ke layanan kesehatan, dan kesempatan untuk hidup sehat. Untuk mengembangkan kebijakan kesehatan yang efektif, penting untuk memahami determinan sosial kesehatan. Kebijakan kesehatan yang mengabaikan determinan sosial kesehatan akan sulit mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat (World Health Organization, 2008)

Bertolak dari kondisi ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendampingan PKH dan program BPNT dalam pencegahan stunting. Pendampingan PKH dan program BPNT diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan perilaku mencegah stunting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis peran pendampingan PKH dan program BPNT dalam pencegahan stunting. Keberhasilan integrasi pencegahan stunting dapat dilihat dari pemahaman dan pelaksanaan perilaku mencegah stunting oleh peserta PKH.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Penelitian kualitatif juga fokus pada proses dan pemaknaan hasilnya (Basri 2014). Dalam penelitian ini, metode kualitatif diterapkan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan informasi deskriptif yang menjelaskan peran pendampingan program PKH dan program BPNT dalam penanganan stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendampingan PKH dan program BPNT dalam pencegahan stunting. Pendampingan PKH dan program BPNT diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan perilaku mencegah stunting.

Peserta PKH dipilih sebagai representasi kelompok sasaran utama, terutama keluarga miskin di kluster paling bawah. Selain mendapatkan dukungan melalui materi P2K2, seperti modul Kesehatan dan Gizi, fokus penelitian ini melibatkan pendamping PKH, pendamping Bansos BPNT, OPD, dan peserta PKH yang juga menerima Program BPNT (sebagai program pelengkap). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Kabupaten Bolmut), Provinsi Sulawesi Utara, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Bolmut merupakan kabupaten prioritas yang telah sukses menurunkan angka stunting melalui inovasi inspiratif, replikatif, dan inovatif. Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Kabupaten Prioritas Nasional Pencegahan Stunting menunjukkan bahwa Kabupaten Bolmut berhasil mengintegrasikan dan menyatukan program-program pusat, daerah, dan desa. Penilaian dilakukan berdasarkan implementasi 8 tindakan integrasi di Kabupaten Prioritas selama periode 2018 hingga 2020.

Penerapan Metode Kualitatif, berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini: 1) Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan kunci, yaitu pendamping PKH, penerima manfaat, dan stakeholder dari pemerintah daerah. 2) Diskusi kelompok terarah dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dari berbagai pihak terkait. 3) Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan penelitian. 4) Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik. Analisis tematik dilakukan dengan cara mengkategorikan data berdasarkan tema-tema tertentu, kemudian menganalisis tema-tema tersebut

untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Dengan menerapkan metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai peran pendampingan program PKH dan program BPNT dalam penanganan stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3. Hasil dan Pembahasan

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah standar untuk usianya. Stunting dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan pertumbuhan dan perkembangan, daya tahan tubuh, dan kognitif. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2022 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 24,4%. Angka ini masih di atas target Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan sebesar 14% pada tahun 2030. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi stunting adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedua program ini memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan miskin, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi anak.

Pendamping PKH dan pendamping BPNT memiliki peran penting dalam pelaksanaan kedua program tersebut. Pendamping PKH bertugas untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, termasuk dalam hal pemenuhan gizi anak. Pendamping BPNT bertugas untuk menyalurkan bantuan pangan non tunai kepada KPM BPNT, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pangan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pendamping PKH dan BPNT di Bolmut telah menjalankan peran mereka dengan baik dalam penanganan stunting. Pendamping PKH memberikan edukasi kepada KPM PKH tentang pentingnya pemenuhan gizi anak, termasuk pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang tepat, dan pencegahan penyakit infeksi. Pendamping BPNT juga memberikan edukasi kepada KPM BPNT tentang pentingnya pemenuhan gizi anak, termasuk pentingnya mengkonsumsi pangan beranekaragam dan bergizi seimbang.

Pendamping PKH dan BPNT juga melakukan pendampingan langsung kepada KPM PKH dan BPNT dalam pemenuhan gizi anak. Pendamping PKH membantu KPM PKH untuk mengakses pelayanan kesehatan, seperti pemeriksaan kehamilan dan imunisasi anak. Pendamping BPNT juga membantu KPM BPNT untuk mengakses pelayanan pangan, seperti membeli beras bersubsidi di e-warong atau agen penyedia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan PKH dan BPNT dapat menjadi salah satu upaya yang efektif dalam penanganan stunting. Pendamping PKH dan BPNT dapat memberikan edukasi dan pendampingan langsung kepada KPM PKH dan BPNT dalam pemenuhan gizi anak.

3.1. Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Stunting, salah satu masalah kesehatan yang kompleks dan multifaktorial, tidak dapat diatasi secara cepat dan mudah. Membutuhkan waktu, penyesuaian, dukungan, dan kolaborasi dari berbagai pihak. Jadi, berdasarkan pemantauan status gizi tahun 2016, prevalensi Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 43,80%. Kemudian turun menjadi 36,80% pada tahun 2017, dan tren positif juga terjadi pada tahun 2018, turun menjadi 22,40%. Selanjutnya, data riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa prevalensi Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara turun menjadi 15,20% pada tahun 2019. Untuk tahun 2020, prevalensi Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan menjadi 43,80% (Bappeda Bolmut, 2021)

Kemudian berdasarkan sumber dari hasil wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2021, menyebutkan anggaran target prevalensi stunting dari tahun 2018 hingga tahun 2023, sebagai berikut: 9,70 persen (angka capaian) intervensi terhadap 15 desa lokus ditunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.420.480.189,-. melalui 40 prog/keg yang dilaksanakan oleh 14 SKPD, dan dukungan Dana Desa yang mencapai hingga Rp.8.132.882.789. Selanjutnya 8,65 persen (angka target) intervensi terhadap 16 desa lokus ditunjang dengan alokasi

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere

Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

anggaran Rp.14.739.177,627,- melalui 54 prog/keg yang dilaksanakan oleh 14 SKPD, dan dukungan dana desa yang mencapai hingga Rp.10.477.586.626. Kemudian 8,35 persen (angka proyeksi) dengan intervensi terhadap 20 desa lokus ditunjang dengan alokasi anggaran Rp.11.368.663.900,- yakni melalui 32 prog/keg yang dilaksanakan oleh 14 SKPD. Kemudian untuk target di tahun 2023 adalah, 50 persen (target RPJMD). Hingga Tahun 2023 Prevalensi Penurunan Stunting di targetkan turun menjadi 7,50 % yang merupakan akhir periode RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023

Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mempercepat penurunan stunting telah berjalan dengan baik. Ini mencakup integrasi dan koordinasi yang baik antar OPD terkait, dukungan dan komitmen dari Gubernur Sulawesi Utara, Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil dan anak balita, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, ada penurunan tingkat stunting. Namun, penurunan stunting secara nasional harus terus dilakukan. Target prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024 masih harus dicapai.

Untuk mengurangi dan menangani stunting secara terintegrasi, pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) telah melakukan berbagai inovasi dan terobosan. Tim Rembuk penanganan dan pencegahan stunting dipimpin oleh Bappeda Bolmut dan Dinkes sebagai wakil ketua. Dalam konferensi media, Sekertaris Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow Utara menyatakan bahwa penanganan stunting merupakan pencapaian dalam penilaian kinerja kabupaten lokus dalam pelaksanaan konvergensi intervensi penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 (Sekda Kabupaten Bolmut, 2023). Berikut adalah beberapa poin penting dalam pelaksanaan konvergensi intervensi penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Utara. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pelaksanaan konvergensi intervensi penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020: 1) Integrasi dan koordinasi yang baik antar OPD terkait, 2) Dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah dan Masyarakat, 3. Pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil dan anak balita, 4) Peningkatan akses terhadap layanan Kesehatan, 5) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang

Dalam hal penanganan dan pencegahan stunting, 14 OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Bolmut telah melakukan inovasi. Ini termasuk keterlibatan instansi terkait seperti Bapelitbangda, Dinkes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Disperdaginkop dan UKM serta Dinas PMD. Selain itu, ada juga Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil, Dinsos, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Disperdaginkop dan UKM serta Dinas PMD. Dinsos, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kominfo.

Beberapa OPD dipromosikan melalui berbagai program inovasi yang berkolaborasi antar OPD yang terkait untuk menangani dan mencegah stunting. Misalnya, Laporan Pemantauan Balita Stunting, Gerakan Terpadu Cegah Stunting (Getar Cinta), Gerakan Remaja Cerdas Peduli Anemia (Gema Ceria), dan Gerakan Bersama Cegah Stunting (Gemar Cahting). Ada juga program Isi Piringku, yang dibuat oleh Unit Darma Wanita, Persit, dan Ibu-ibu PKK. Selain itu, ada keterlibatan anggota TNI dan Polri yang dikenal sebagai "Kopasus". Pemerintahan, melalui Bappedalitbangda dan Dinkes, secara teratur melakukan kegiatan koordinasi dengan beberapa OPD terkait penanganan stunting setiap bulan dalam rangka koordinasi Rembuk Stunting. Kegiatan koordinasi ini terjadi tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui grup WhatsApp Rembuk Stunting.

Kapala Beppeda Kabupaten Bolmut mengatakan bahwa untuk mengurangi stunting, koordinasi lintas sektor harus diperkuat. Untuk memastikan program penurunan stunting dapat direncanakan dan dianggarkan oleh Bappeda Kabupaten Bolmut, pemerintah daerah harus berkomitmen kuat. Selain itu, diberikan tugas kepada pemerintah Kabupaten Bolmut melalui OPD yang ada untuk berpartisipasi secara aktif dan bekerja sama dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan stunting di

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere

Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

setiap Kecamatan dan Desa, dengan keterlibatan kader pembangunan manusia. dan dukungan dari APBDes. Inovasi Andini: Menunda Pernikahan Kearifan lokal ditunjukkan dengan penggunaan bahasa lokal selama pertemuan. kelas parenting, sertifikat untuk anak yang telah disembuhkan dari stunting, dan hak sipil untuk bayi baru lahir

Selanjutnya, untuk memberikan penguatan tambahan, beberapa OPD, termasuk Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan, serta Dinas BKKBN, melalui Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), untuk melakukan diversifikasi pangan, pasar murah, dan pengawasan ketersediaan bahan pokok, program bantuan sosial Bantuan BPNT dan program keluarga harapan (PKH), dan memberikan bantuan masyarakat yang lebih besar kepada KPM sesuai dengan data penerimaan. Selanjutnya, penguatan secara intervensi spesifik adalah tindakan yang langsung mengatasi penyebab stunting dan biasanya dilakukan oleh sektor kesehatan, seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.

3.2. Peran Pendamping Program PKH Dalam Penanganan Stunting

Integrasi dan konvergensi program antar sektor yang baik di masing-masing daerah berkorelasi erat dengan penurunan prevalensi stunting di daerah-daerah ini. Untuk mengurangi angka stunting di Indonesia, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menerapkan integrasi dan konvergensi program antar sektor. Pemerintah Indonesia berharap angka stunting akan turun menjadi 14% pada tahun 2024.

Pemerintah harus terus meningkatkan integrasi dan konvergensi program antar sektor di berbagai daerah untuk mencapai target tersebut, karena penurunan prevalensi stunting di daerah-daerah ini terkait erat dengan kualitas integrasi dan konvergensi program antar sektor di masing-masing daerah, seperti yang ditunjukkan oleh banyak penelitian dan kajian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi dan konvergensi program antar sektor dapat meningkatkan efektivitas intervensi stunting karena dapat: 1) meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program antar sektor sehingga program-program tersebut dapat saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain; 2) meningkatkan akses masyarakat terhadap intervensi stunting karena program-program tersebut dapat diintegrasikan dan diselaraskan dengan program-program lain yang terkait dengan masalah stunting.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu contoh implementasi integrasi dan konvergensi program antar sektor dalam upaya menurunkan angka stunting. PKH adalah program bantuan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan; program ini juga memberikan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang kesehatan, gizi, dan pendidikan.

Pendekatan PKH dapat meningkatkan hasil intervensi stunting karena dapat: 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada KPM tentang stunting sehingga mereka tahu penyebab dan dampak stunting serta cara mencegahnya, dan 2) mendorong KPM untuk menerapkan pola asuh yang baik sehingga anak-anak mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa PKH dapat menurunkan angka stunting di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adhikari dan Bhandari (2015) di Nepal menunjukkan bahwa PKH dapat menurunkan angka stunting sebesar 5,7%.

Koordinasi dan integrasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk menangani dan mencegah stunting di pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah dengan menunjuk para pendamping program PKH dan pendamping program BPNT untuk lebih aktif dalam memberikan informasi, sosialisasi, dan pendidikan kepada KPM penerima program PKH melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan modul kesehatan dan gizi melalui *Family Devolepment Session (FDS)* yang rutin setiap bulan dilakukan oleh para pendamping PKH.

Tujuan dari sosialisasi dan edukasi dalam kegiatan P2K2 ini adalah agar KPM dapat merubah perilaku ke arah yang lebih baik dalam hal kesehatan, kebersihan, dan asupan gizi seimbang. Bantuan sosial telah memberikan KPM PKH dan non-PKH BPNT sebagai makanan tambahan yang memiliki nilai gizi yang baik untuk pertumbuhan anak dan ibu hamil. Sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere

Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

(2017), pendamping dituntut sebagai seseorang yang membantu individu atau kelompok dalam mengembangkan potensi mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendampingan dapat dilakukan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, usaha ekonomi, dan kesejahteraan sosialnya. Tujuan pendampingan adalah untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencapai potensi maksimal mereka.

Penting dalam penanganan stunting adalah dua program bantuan sosial, PKH dan Bansos BPNT, yang membantu keluarga miskin dan rentan, termasuk keluarga yang memiliki anak balita. Pendampingan PKH dan Bansos BPNT dilakukan oleh pendamping PKH dan pendamping Bansos BPNT. Tugas pendamping PKH dan pendamping Bansos BPNT adalah untuk memberi tahu keluarga penerima manfaat (KPM) tentang pentingnya gizi seimbang dan membantu mereka mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan layanan sosial lainnya.

Apa yang Dilakukan Pendamping PKH dan Pendamping Bansos BPNT untuk Menangani Stunting? Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh pendamping PKH dan pendamping Bansos BPNT dalam penanganan stunting: 1) Melakukan kunjungan rumah untuk memberi tahu KPM tentang pentingnya gizi seimbang; 2) Membantu KPM mendapatkan akses ke layanan kesehatan seperti posyandu dan layanan kesehatan lainnya; dan 3) Membantu KPM mendapatkan akses ke layanan sosial dan kesehatan lainnya.

Salah satu langkah penting untuk mengurangi tingkat stunting di Indonesia adalah pendampingan PKH dan Bansos BPNT. Pendamping PKH dan Bansos BPNT membantu KPM mendapatkan gizi seimbang. Mereka juga membantu mereka mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan layanan sosial lainnya. Untuk mendukung penanganan stunting, berikut adalah beberapa contoh kegiatan pendampingan PKH dan Bansos BPNT yang dapat dilakukan: 1) Sosialisasi tentang gizi seimbang; 2) Pendampingan ibu hamil dan anak balita; dan 3) Pendampingan keluarga untuk meningkatkan pendapatan. Kegiatan-kegiatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi KPM di seluruh daerah.

Menurut Pedoman Program PKH Kementerian Sosial, peserta PKH harus menjalani pemeriksaan kehamilan dan persalinan di fasilitas kesehatan empat kali dalam tiga kali trisemester, melahirkan di fasilitas kesehatan dan menjalani pemeriksaan kesehatan dua kali sebelum bayi berusia satu bulan. Anak-anak dan balita dari usia 0 hingga 11 bulan menerima vaksinasi lengkap dan pemeriksaan berat badan setiap bulan. Pada usia 6-11 bulan, mereka juga menerima suplemen vitamin A. Pada usia 1-5 tahun, mereka menerima vaksinasi tambahan dan pemeriksaan berat badan setiap bulan. Pada usia 5-6 tahun, mereka melakukan pemeriksaan berat badan setiap bulan dan mendapatkan vitamin A dua kali dalam setahun. Pada usia 6-7 tahun, mereka ditimbang di fasilitas kesehatan.

Selain itu, dengan memberikan peningkatan resiliensi pada individu, diharapkan masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi sehingga mereka dapat mengurangi stres, kekawatiran, dan perasaan cemas saat anggota keluarga mengalami gizi buruk atau stunting. Hal ini dapat menyebabkan keresahan atau kecemasan, menyebabkan gangguan psikologis. Ini adalah pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan yang terdiri dari perasaan kecemasan, tegang, dan emosi, (Ghufron dan Risnawati, 2016).

Pendamping PKH mendampingi KPM melalui P2K2 dan FDS, yang menyebarkan sosialisasi, pendidikan, dan informasi tentang pencegahan stunting di wilayah dampingannya. Selain itu, Kepala Dinas meminta pendamping program PKH dan bansos pangan BPNT untuk bekerja sama dengan pendamping lainnya. Pendamping ini termasuk pendamping kesehatan, bidan desa, kader pos yandu, kader dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA), dan kader pemberdayaan masyarakat.

Pendamping Sosial PKH memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan informasi dan pelatihan tentang cara mencegah stunting, dan KPM didorong untuk memanfaatkan semua layanan sosial yang diberikan oleh PKH, seperti kesehatan, pendidikan, gizi, dan akses lain yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Sebagai program pemberdayaan dan perlindungan

masyarakat miskin, PKH harus mensinergikan berbagai pendekatan pemberdayaan dengan mengutamakan kemampuan dan sumber daya lokal (Ariwibowo & Sutiaputri, 2019).

Karena mereka telah menerima pelatihan khusus tentang stunting, pendamping sosial PKH memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan informasi dan pelatihan tentang cara mencegah stunting. Pelatihan ini mencakup pengetahuan tentang: definisi stunting, penyebab stunting, dampak stunting, dan cara mencegah stunting. Pendamping sosial PKH juga dibekali dengan keterampilan untuk memberikan informasi dan pelatihan yang efektif, seperti keterampilan komunikasi dan keterampilan komunikasi yang efektif, seperti: keterampilan komunikasi, keterampilan mengajar, keterampilan empati.

Semua pendamping sosial PKH telah mengikuti diklat P2K2, dengan materi utama tentang kesehatan. Para pendamping sosial PKH harus mendapatkan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan stunting. Para pendamping sosial PKH juga telah mengikuti Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan edukasi yang ada di Modul Kesehatan dan Gizi. Pada peserta PKH, sasaran utama intervensi pencegahan stunting adalah ibu hamil, baduta, dan balita. Data BNBA yang relevan dapat dipilih dan dipilah dari data BNBA keseluruhan KPM PKH.

Seorang informan dari Dinas Sosial mengatakan bahwa pendampingan sosial yang biasa dilakukan oleh pendamping PKH untuk mencegah stunting adalah melakukan kegiatan P2K2 setiap bulan, yang biasanya dilakukan bersama dengan kegiatan posyandu di setiap desa. Kami akan berusaha untuk mewujudkan beberapa inisiatif ini di seluruh kabupaten, meskipun ada beberapa yang tidak dapat dilakukan. Beberapa contoh kegiatan pendampingan PKH dalam penanganan stunting adalah kunjungan rumah untuk memberi tahu KPM tentang pentingnya gizi seimbang. Dalam kegiatan ini, pendamping PKH akan mengunjungi rumah KPM untuk memberi tahu mereka tentang gizi seimbang, seperti apa itu gizi seimbang, mengapa itu penting untuk mencegah stunting, dan bagaimana menerapkannya.

Kemudian periode emas adalah memahami 1000 hari pertama kehidupan. Kementerian Kesehatan (2018) menyatakan bahwa 1000 hari pertama kehidupan (HPK) adalah periode emas pertumbuhan dan perkembangan, di mana proses pematangan dan diferensiasi sel-sel tubuh berjalan sangat cepat, dan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis adalah ciri khas periode ini. Selama periode ini, otak, tulang, otot, dan organ lainnya berkembang dengan sangat cepat.

Selama seribu hari pertama kehidupan, kekurangan gizi jangka panjang dapat menyebabkan gagal tumbuh pada anak balita. Gagal tumbuh adalah ketika seorang anak tidak dapat memaksimalkan potensi pertumbuhannya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kekurangan asupan gizi, infeksi, dan penyakit kronis. Kekurangan gizi kronis pada 1.000 hari pertama kehidupan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada anak balita, seperti perkembangan fisik yang terhambat, perkembangan kognitif yang terhambat, dan risiko penyakit kronis di masa dewasa. Akibatnya, sangat penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan asupan gizi yang cukup selama seribu hari pertamanya. Untuk mencapai hal ini, anak harus diberikan ASI sepenuhnya selama enam bulan pertama, dan kemudian diberi makanan pendamping ASI yang sehat dan menjaga agar anak tidak terinfeksi.

Sosialisasi gizi seimbang dapat dilakukan di posyandu, sekolah, atau tempat umum lainnya. Dalam kegiatan ini, pendamping PKH akan memberi tahu masyarakat luas tentang pentingnya gizi seimbang dan membantu ibu hamil dan anak balita memastikan mereka mendapatkan gizi yang cukup. Pendampingan ini dapat mencakup: 1) membantu ibu hamil memenuhi kebutuhan nutrisi mereka, 2) membantu ibu hamil menyusui secara eksklusif selama enam bulan pertama, dan 3) membantu ibu hamil dan anak balita mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang tepat.

Kegiatan pendampingan keluarga untuk meningkatkan pendapatan pendamping PKH akan mendampingi keluarga untuk meningkatkan pendapatannya, hal ini penting untuk meningkatkan akses keluarga terhadap makanan bergizi. Kegiatan pendampingan PKH ini juga dapat membantu masyarakat memahami pentingnya gizi seimbang dan membantu keluarga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bidang Penangan Fakir Miskin menyatakan bahwa "*kendalanya adalah bisa dari*

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere

Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

korkab apabila tidak sungguh-sungguh memonitoring para pendamping PKH di dalam pelaksanaan P2K2 dan FDS", menyatakan bahwa mewujudkannya memang sulit. Selain itu, KPM tidak selalu hadir di pertemuan P2K2. Untuk mengatasi masalah ini, mereka harus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mencegah stunting, berusaha keras untuk membantu pendamping melakukan P2K2, dan mensosialisasikan ruang lingkup pencegahan stunting kepada KPM yang harus selalu hadir di pertemuan P2K2 untuk menambah pengetahuan tentang stunting.

Untuk itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolmut mengatakan, *"Kiranya perlu dukungan yang dibutuhkan untuk memperkuat pendampingan sosial PKH dalam pencegahan stunting yaitu "Kebijakan dana sharing harus ditingkatkan, ini dapat berimplikasi pada dana operasional PKH."* Selain itu, pemerintah daerah dapat membuat pedoman atau acuan pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting yang lebih mudah dipahami dan diterapkan. Untuk menyatukan program unggulan untuk percepatan pencegahan stunting, tidak cukup hanya dengan analisis dan teori. Dalam langkah-langkah berikutnya, dengan bantuan atau koordinasi dengan OPD yang terkait, harus ada upaya untuk mensosialisasikan pengetahuan ini kepada masyarakat sehingga dapat mengubah cara orang berpikir dan berperilaku tentang bagaimana mempercepat penurunan stunting.

3.3. Peran Pendamping Program Bansos BPNT Dalam Penanganan Stunting

Dari hasil temuan penelitian ini, dikatakan oleh Pendamping Program BPNT belum melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Pendamping hanya menyampaikan informasi kepada penyalur dan penyedia program, serta pendamping sosial kecamatan. Hal ini dikarenakan menurut pendamping BPNT bahwa "stunting" masih dianggap hal baru. Akan tetapi pendamping program BPNT sudah diberikan mandat dari Kepala Dinas Sosial untuk melayani serta dituntut untuk memberikan dukungan dalam mengakses layanan kesehatan dan gizi, terutama ketersediaan pangan bergizi bagi KPM. Dengan pemenuhan pangan bergizi diharapkan dapat meningkatkan status gizi masyarakat penerima manfaat dan mencegah stunting.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Kabid PFM di Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, pendamping Program Bansos BPNT telah melakukan berbagai upaya di awal tahun 2021 untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat penerima manfaat tentang stunting. Upaya-upaya ini telah menghasilkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat penerima manfaat tentang masalah tersebut. Namun, pendamping Program Bansos BPNT masih perlu meningkatkan upaya mereka untuk membantu penerima manfaat mendapatkan layanan kesehatan dan gizi yang lebih baik.

Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat penerima manfaat yang belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan gizi. Beberapa peran yang harus ditingkatkan dalam Program Bansos BPNT dalam penanganan stunting di Bolaang Mangondow Utara, seperti pendamping program bansos BPNT perlu meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat mengenai stunting. Untuk mendukung akses masyarakat penerima manfaat ke layanan kesehatan dan gizi, pendamping Program Bansos BPNT harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan lintas sektor terkait. Diharapkan penanganan stunting di Kabupaten Bolaang Mangondow Utara akan lebih efektif dan efisien dengan meningkatkan peran pendamping Program Bansos BPNT. Pendamping program bansos BPNT memiliki peran penting dalam penanganan stunting dalam hal pemenuhan gizi yang seimbang. Peran tersebut meliputi:

- a. Melakukan edukasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) tentang pentingnya gizi seimbang. Pendamping dapat memberikan informasi tentang jenis makanan yang bergizi, cara memasak makanan yang sehat, dan tips untuk meningkatkan asupan gizi anak.
- b. Membantu KPM untuk menyusun menu makanan yang bergizi. Pendamping dapat membantu KPM untuk memilih bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak, serta menyusun menu makanan yang beragam dan menarik.
- c. Memantau asupan gizi anak. Pendamping dapat melakukan pemantauan berat badan dan tinggi badan anak secara rutin untuk memastikan bahwa anak mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere

Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh pendamping program bansos BPNT dalam pemenuhan gizi yang seimbang:

- Melakukan kunjungan rumah kepada KPM untuk memberikan edukasi tentang gizi seimbang.
- Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang gizi seimbang di tingkat desa atau kelurahan.
- Membuat poster atau leaflet tentang gizi seimbang yang dapat dibagikan kepada KPM.
- Membantu KPM untuk berlatih memasak makanan yang sehat.
- Membantu KPM untuk mendapatkan akses ke bahan makanan yang bergizi.

Diharapkan dengan peran aktif dari pendamping program bansos BPNT, KPM dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak secara seimbang dan mencegah stunting. Untuk memastikan bahwa edukasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan efektif, pendamping program bansos BPNT harus memahami kondisi dan kebutuhan KPM. Karena sebagian besar KPM saat ini meminta bantuan BPNT sesuai dengan kebutuhan mereka, pengelola program sudah mencatat permintaan KPM untuk program BPNT sebelum tanggal penyaluran. Ketika agen Bansos BPNT tidak dapat memenuhi permintaan KPM, dinas sosial akan memberikan sangsi, dengan laporan dari KPM kepada pendamping Bansos.

Keluarga penerima manfaat bansos BPNT dapat membelanjakan dan menentukan sendiri jenis dan jumlah bahan pangan yang mereka miliki terutama bahan pangan yang mengandung gizi dan nutrisi, sesuai dengan jumlah nominal yang ada di kartu gesek KKS sebesar Rp.200.000. Pendamping bansos juga selalu turun lapangan untuk memastikan bantuan yang diberikan kepada KPM sesuai dengan permintaan KPM yang sudah ditentukan oleh KPM itu sendiri, dan para pendamping juga selalu melakukan evaluasi kepada agen BPNT yang menyalurkan bansos. Karena program BPNT sudah diatur dalam pedoman umum dan juknis, dukungan dari pemerintah daerah harus diperkuat untuk memungkinkan KPM memenuhi kebutuhan mereka untuk mencegah stunting di kabupaten Bolmut. Untuk mengurangi angka stunting, pemerintah dan seluruh masyarakat harus bekerja sama. Ini akan melibatkan promosi edukasi kesehatan dan asupan gizi yang cukup, termasuk memberikan ASI eksklusif kepada balita. Selain itu, produk susu atau produk susu yang digunakan sebagai makanan pelengkap. Untuk mencegah stunting, dinas terkait harus membuat program pencegahan stunting, terutama meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

3.4. Faktor Penghambat Dalam Penanganan Stunting

Salah satu upaya penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia adalah pencegahan stunting. Salah satu upaya untuk mencegah stunting adalah dengan pendampingan keluarga (Bappenas, 2020). Tujuan pendampingan keluarga adalah untuk memberi tahu keluarga tentang pentingnya gizi seimbang dan cara merawat anak dengan baik. Menurut informasi yang dikumpulkan dari beberapa KPM yang diwawancarai, banyak orang tahu dan mengetahui tentang stunting dan bahayanya bagi masa depan anak. Namun, beberapa faktor mencegah mereka mengambil pengetahuan yang mereka pelajari dengan serius dan menerapkannya; salah satunya adalah tradisi turun temurun yang masih ada dan sangat mereka percayai. Metode pengasuh yang tidak sesuai telah diwariskan dari generasi sebelumnya dan terus diterapkan untuk anak-anak dan lingkungan mereka (Sari & Triaswati, 2019), menurut beberapa KPM yang melaporkan bahwa tradisi atau kebiasaan ini masih ada di beberapa desa di Kabupaten Bolmut.

Hal ini juga disebabkan oleh latar belakang pendidikan orang tua yang bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, mindset suami/bapak yang masih kaku tentang pengasuhan anak dan pola hidup ikut-ikutan yang mereka jalani sehingga meskipun salah akan mereka anggap sesuatu yang wajar dalam kesehariannya. Pola asuh yang salah yang di wariskan orang tua secara turun-temurun ini menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan anak. Seperti pada salah satu responden, beliau mengakui lebih percaya dan peduli untuk membawa barang penangkal seperti bawang putih, jeruk, cengkih, atau peniti yang sudah di bacakan doa-doa dari orang pintar atau dukun, *"Dari pada harus percaya dan peduli pada petugas kesehatan yang menyarankan untuk minum air 8-12 gelas sehari dan makan makanan bergizi bagi ibu hamil itu sangat penting untuk keselamatan"*

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere

Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

dan kesehatan ibu hamil dan bayi”. Adapula tradisi peginjakan kaki pertama kali pada bayi di tanah tanpa memakai sandal lebih mereka percayai, karena dengan kebiasaan tradisi ini, dikatakan oleh sebagian masyarakat akan memberikan kekuatan pada anak bayi dapat cepat berjalan daripada memperhatikan asupan nutrisi yang baik pada anak bayi.

Pola asuh yang salah dapat menjadi faktor penghambat dalam pencegahan stunting. Pola asuh yang salah dapat berupa pemberian makanan yang tidak bergizi, kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan anak, serta pola pengasuhan yang kasar. Kebiasaan turun temurun yang ada di masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pencegahan stunting. Kebiasaan turun temurun yang dapat menyebabkan stunting antara lain: pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang terlalu dini atau terlalu terlambat, pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang tidak bergizi, pemberian ASI yang tidak eksklusif, perilaku pernikahan dini, dan perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

Berikut adalah beberapa contoh faktor penghambat dalam pendampingan pencegahan stunting yang terkait dengan pola asuh yang salah dan kebiasaan turun temurun: 1) Pada masyarakat pedesaan, masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak yang kurus adalah anak yang sehat. Akibatnya, anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, 2) Di beberapa desa, masih banyak orang tua yang memberikan makanan pendamping ASI (MPASI) yang tidak bergizi, seperti nasi tim dengan gula merah, 3) Di beberapa desa, masih banyak orang tua yang memberikan ASI yang tidak eksklusif, misalnya karena harus bekerja atau karena mengikuti tradisi, 4) Di beberapa desa, masih banyak orang tua yang menikahkan anak mereka di usia dini. Hal ini dapat menyebabkan anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui.

Solusi untuk mengatasi kebiasaan turun temurun yang dapat menyebabkan stunting perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan cara pengasuhan anak yang baik. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Melakukan perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam hal pola asuh dan kebiasaan turun temurun. Perubahan perilaku masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal. Meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan yang bergizi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan pertanian atau tanaman dalam pot sekitar rumah dan peternakan lokal, serta penyediaan makanan bergizi yang terjangkau bagi masyarakat. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Meski ada responden yang mengaku dan mempunyai pemikiran dari kebiasaan yang salah, yaitu dengan mengatakan dan meyakini bahwa *“Tidak masalah dengan kebiasaan anak bermain kotor, mandi di sungai, atau melakukan kegiatan lain yang kurang higienis, mereka percaya bahwa kekebalan tubuh anak akan terbentuk dari lingkungan dan kebiasaan yang ada. Sebaliknya, mereka justru khawatir anak yang terlalu bersih akan mudah sakit”*. Tidak hanya dari sisi ibu, dari sang ayah juga bisa jadi penghambat dukungan pencegahan stunting. Mindset ayah yang tertanam sejak dulu bahwa tugasnya mencari nafkah dan ibu yang harus mengasuh anak menjadikan ayah kaku dengan pengasuhan dan perawatan anak sejak dalam kandungan sampai dewasa. Ayah tidak terbiasa untuk mengingatkan ibu makan makanan bergizi, mengontrol dan mengingatkan ibu untuk minum tablet tambah darah, mengantar ibu ke posyandu atau memberikan stimulasi pada anak sejak dalam kandungan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sebenarnya sangat memerlukan peran seorang ayah.

Ditambah lagi dengan pola hidup yang kurang tepat sangat menambah hambatan dalam pencegahan stunting. Ada beberapa KPM yang sudah dibuatkan jamban sehat oleh pemerintah tetapi masih saja BAB di sungai. Kemenkes menjelaskan bahwa BAB sembarangan juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kotoran manusia yang dibuang sembarangan dapat mencemari air, tanah, dan udara. Pencemaran ini dapat mengancam kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan. Mereka mengaku ikut-ikutan dan karena sudah menjadi kebiasaan jadi tidak mudah untuk di hilangkan dan sering terjadi secara spontan. Begitu juga dengan anak balita mereka. Jika ibunya sibuk dan anak yang main di pekarangan ingin BAB, sesekali mereka BAB di tanah yang di gali padahal ada jamban sehat di sekitar lingkungan rumahnya.

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere

Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dapat disimpulkan bahwa pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program BPNT memiliki peran penting dalam penanganan stunting. Pendamping PKH berperan penting dalam memberikan edukasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) tentang pentingnya gizi seimbang dan cara pengasuhan anak yang baik. Edukasi tersebut meliputi pemberian informasi tentang jenis makanan yang bergizi, cara memasak makanan yang sehat, dan tips untuk meningkatkan asupan gizi anak. Selain itu, pendamping PKH juga berperan dalam memantau asupan gizi anak secara rutin. Pemantauan ini dilakukan dengan cara mengukur berat badan dan tinggi badan anak secara berkala. Jika ditemukan adanya tanda-tanda stunting, pendamping PKH akan memberikan intervensi yang tepat, seperti pemberian makanan tambahan atau rujukan ke fasilitas kesehatan.

Program BPNT juga berperan penting dalam penanganan stunting, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi anak. Program BPNT memberikan bantuan berupa bahan makanan pokok, seperti beras, gula, dan minyak goreng. Bahan makanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, terutama protein dan zat besi. Namun, dalam pelaksanaannya, pendampingan PKH dan Program BPNT masih menemui beberapa hambatan, antara lain: pola asuh yang salah, kebiasaan turun temurun, kurang meratanya akses terhadap layanan kesehatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan cara pengasuhan anak yang baik, melakukan perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam hal pola asuh dan kebiasaan turun temurun. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan swasta.

5. Saran

Kemudian rekomendasi sesuai kebijakan yang di buat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (2023), bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah daerah terutama oleh Dinas Sosial, maka perlunya Penguatan pendampingan PKH dan program bansos sembako dalam pencegahan stunting terintegrasi, seperti :

- a. *Penggunaan data BNBA peserta PKH sebagai sasaran prioritas khusus pencegahan stunting.* Pendekatan pencegahan dan penanganan stunting berfokus pada kelompok umur sasaran prioritas, tetapi juga pada keluarga miskin yang berasal dari data BNBA dari DTKS. Data yang difilter dari komponen PKH ibu hamil dan anak usia dini menjadi kelompok sasaran prioritas khusus (1000 HPK), yang terdiri dari keluarga miskin. Prioritas utama untuk data ini adalah keluarga miskin.
- b. *Kelompok sasaran prioritas akan menerima makanan tambahan dan sembako tambahan untuk peserta PKH.* Selama 1000 HPK, kelompok sasaran prioritas khusus yang terdiri dari keluarga miskin harus menerima asupan nutrisi yang memadai. Program sembako yang selama ini berjalan harus memberi perhatian khusus pada kelompok sasaran 1000 HPK dengan memberikan sembako tambahan, seperti beras terfortifikasi atau bahan makanan lain yang cukup nutrisi.
- c. *Pelibatan tenaga lapangan lintas sektor dalam penyebaran materi FDS dan P2K2.* Pendamping PKH memiliki keterbatasan dalam penguasaan materi FDS dan P2K2, seperti kesehatan dan gizi. Jika yang menyampaikan adalah bidan desa atau petugas pemantau gizi, akan lebih otoritatif dan sesuai kapasitasnya. Dengan cara yang sama, orang-orang yang bekerja sebagai penyuluh KB (perencanaan keluarga) atau orang-orang yang bekerja di Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga (perlindungan anak) dapat terlibat dalam topik lainnya. Untuk mengarahkan para petugas lapangan ini untuk bekerja sama, diperlukan komitmen lintas sektor yang berpayung hukum. Misalkan pendamping PKH terlibat atau terlibat dalam kegiatan Pos Yandu dan disediakan tempat atau meja untuk memberikan penyuluhan tentang kesejahteraan sosial, pendidikan kesehatan dan gizi ibu dan anak, serta topik lainnya.

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere

Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

- d. *Pemantauan pemanfaatan makanan dengan gizi seimbang sehari-hari melalui kader posyandu.* Harus dipastikan bahwa kelompok sasaran prioritas benar-benar menerima nutrisi dari program bansos sembako. Diperlukan pemantauan harian dengan alat khusus, dan pendamping PKH bertanggung jawab atasnya. Di lingkungan RT-RW, kader posyandu terdekat harus terlibat dalam memantau peserta PKH sehari-hari karena keterbatasan penjangkauan pendamping PKH. Di sinilah komitmen lintas sektor diperlukan untuk mencegah stunting.
- e. *Dibentuk tim khusus gabungan lintas sektor untuk memantau balita terindikasi stunting terutama dari keluarga miskin.* Sektor kesehatan harus mendukung penanganan balita yang terindikasi stunting. Untuk mencegah stunting, kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi harus terus ditingkatkan. Untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi di berbagai forum publik, tim gabungan melibatkan pengurus lingkungan dan tokoh masyarakat. Stunting tidak boleh dianggap sebagai stigma yang justru membuat keluarga malu dan menyebabkan masalah tidak tertangani. Keluarga miskin yang terindikasi mengalami stunting memerlukan pendekatan yang berbeda.

Ucapan terimakasih:

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua informan dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk berbagi informasi dan data dengan kami. Partisipasi dari pendamping, KPM, dan informan stakeholder dari pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangatlah berharga bagi keberhasilan penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim kami yang telah bekerja keras dalam pengumpulan data dan analisis. Hasil penelitian ini tidak akan terwujud tanpa kerja sama dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Agustini, Aat. (2014). Promosi Kesehatan. Deepublish. Yogyakarta.
- Adhikari, K. R., & Bhandari, S. P. (2015). Stunting in Nepal: A review of the evidence on causes, consequences and interventions. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1347(1), 133-145.
- Anwar, M., Khomsan, A., Mauludyani, E., & Ekawidyani, T. (2014). Pengaruh Stunting pada Perkembangan Kognitif, Motorik, dan Bahasa Anak. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 9(2), 111-116.
- Aribowo, & Sutiaputri, L. F. (2019). Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2) Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Komunitas Adat Kampung Kuta, Desa Karang Paninggal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. *LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan & Pemberdayaan Sosial*, 01.
- Bahar, Saafroedin, (1998), Integrasi Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003.
- Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (2021). Capaian Target dan Kebijakan Penanganan Stunting Bolmut.
- Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm: Institute for Futures Studies.
- Ghufron, & Risnawati. (2016). Teori-teori Psikologi. Ar-Ruzz. Yogyakarta.
- Handoko, (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi Bumi Aksara, Jakarta.
- Habibullah, Jayaputra, A., Pudjianto, B., & Muhtar. (2022). Inclusive Finance in Sembako Program : An Overview From Proper Governance Perspective. *ASEAN Social Work Journal*, 10(2), 24-34
- Iftinavia Pradinantia. (2023). "Kemensos Sudah Setop Beri Bansos Program BPNT Berupa Barang", <https://tirto.id/gS5m>.
- Izwardy, Doddy. (2019). Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Stunting di Indonesia. Jakarta: Direktur Gizi Masyarakat.

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere

Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

- JannusTH, Siahaan. (2019). Urgensi Minimalisasi "Stunting", <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/18055351/urgensi-minimalisasi-stunting>, Jakarta
- Jawahir Gustaf Rizal, (2021). Bansos BPNT Rp 200.000 Per Bulan, Siapa Saja yang Berhak Menerima, Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/142400265/bansos-BPNT-rp-200.000-per-bulan-siapa-saja-yang-berhak-menerima>, Jakarta
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. P2PTM (2018). Perpres Nomor 59 Tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Buku Saku 1000 Hari Pertama Kehidupan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Mengenal Apa Itu Stunting https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting. Jakarta
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2022. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Pedoman Umum Program BPNT: Perubahan I Pada Tahun 2020, Jakarta
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). Pedoman Umum Bantuan Sosial PKH dan BPNT Tahun 2022, Jakarta
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). Strategi Nasional Pencegahan Stunting 2021-2024. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Panduan Teknis Intervensi Gizi dalam Pencegahan Stunting. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Marmot, M. (2005). Social determinants of health inequalities. *The Lancet*, 365(9464), 1099-1104.
- Media Indonesia. (2022). Kemensos Mulai Salurkan Bantuan Program BPNT, Rp600 Ribu Per KPM. Humaniora. Jakarta. <https://mediaindonesia.com/humaniora/472956/kemensos-mulai-salurkan-bantuan-program-BPNT-rp600-ribu-per-kpm>.
- Muhtar, M., Pudjianto, B., & Habibullah, H. (2022). Social approach to stunting prevention in Blora, Central Java, Indonesia. *Simulacra*. <https://doi.org/10.21107/sml.v5i2.15909>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Rahayu, E. S., Sari, M. M., & Hadi, H. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak balita di Indonesia. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 14(1), 27-34.
- Sari, R. P., & Triaswati, E. (2019). Studi etnografi tentang pola asuh keluarga dan penanaman karakter pada anak di Kampung Pulo, Jakarta. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 43(1), 77-89.
- Siahaan, J.T.H, (2019). Urgensi Minimalisasi "Stunting". Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/18055351/urgensi-minimalisasi-stunting>
- Siti Nadia Tarmizi. (2023). Waspada 4 Masalah Gizi Ini Anak Beresiko Anak Jadi Stunting, sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230127/1442287/waspada-4-masalah-gizi-ini-berisiko-anak-jadi-stunting, Jakarta
- World Health Organization (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health ISBN: 978-92-4-156370-3. Organisasi Kesehatan Dunia.
- World Health Organization, (2012). Annual Report. Sumber : <https://corporate.target.com/media/TargetCorp/annualreports/content/download/pdf/Annual-Report.pdf?ext=.pdf>. Diakses 20 Januari 2021
- Yusuf, M. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(3), 359-374.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere

Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Pengaruh Kedekatan Orangtua dan Masyarakat terhadap Persepsi Seks Bebas dan Narkoba Pada Remaja

Alfisyahrina Hapsery¹  Artanti Indrasetianingsih¹  Risca Agustin¹  Natasha Bunga¹ 
Salsa Rifqah Nuraini¹  Ellya Susilowati² 

1 Jurusan Statistika, FST, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

2 Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung: Bandung, Jawa Barat, Indonesia

* Korespondensi: alfisyahrina@unipasby.ac.id ; Tel: 081231073434

Diterima: 16 Juli 2023; Direvisi: 25 November 2023 ; Diterbitkan: 27 Desember 2023

Abstrak: Masa remaja adalah peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Di era digital ini, rasa ingin akan terus meningkat dan menimbulkan remaja dapat berkomunikasi dengan lawan jenis tanpa batas. Jika tidak adanya filter dan pengawasan, remaja dapat terjerumus ke dalam konten dewasa yang berdampak negatif bagi mereka seperti seks bebas dan narkoba. Hubungan positif ataupun negatif orang tua dan remaja akan menciptakan persepsi yang berpengaruh bagi remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kedekatan orang tua dan masyarakat terhadap persepsi seks bebas dan narkoba pada remaja. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dengan instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner online. Populasi dari penelitian ini adalah remaja yang berada di Pulau Jawa yakni seluruh lulusan baru Sekolah Menengah Sederajat (SMA) dan mahasiswa. Teknik analisis data dilakukan dengan metode CB-SEM (*Covariance Based Structural Equation Modeling*) dengan *software* AMOS. Hasil penelitian variabel laten eksogen Tempat Tinggal berpengaruh signifikan terhadap persepsi Seks Bebas dan Narkoba pada Remaja. Diperlukan upaya pencegahan perilaku seks bebas dan Narkoba dengan melaksanakan penyuluhan sosial dan program penguatan keluarga dan konseling bagi remaja pada Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Kata kunci: CB – SEM, Hubungan kedekatan remaja dan orang tua, Perilaku penyimpangan terhadap remaja.

Abstract: Adolescence is a transition from childhood to adulthood. In this digital era, the desire will continue to increase and will enable teenagers to communicate with the opposite sex without limits. If there are no filters and supervision, teenagers can fall into adult content that has a negative impact on them, such as free sex and drugs. Positive or negative relationships between parents and teenagers will create perceptions that influence teenagers. The aim of this research is to determine the influence of closeness between parents and society on perceptions of free sex and drugs in adolescents. The data source in the research is primary data with the research instrument used is an online questionnaire. The population of this research is teenagers on the island of Java, namely all new graduates of secondary schools (SMA) and students. The data analysis technique was carried out using the CB-SEM (Covariance Based Structural Equation Modeling) method with AMOS software. The research results of the exogenous latent variable Place of Residence have a significant effect on the perception of Free Sex and Drugs among Adolescents. Efforts are needed to prevent promiscuous sexual behavior and drugs by implementing social education and family strengthening programs and counseling for teenagers at Social Welfare Institutions.

Keywords: CB – SEM, close relationship between adolescents and parents, deviant behavior towards adolescents.

1. Pendahuluan

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yang mencakup semua perkembangan yang berhubungan dengan persiapan menuju masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikologis dan psikososial (Firdaus & Hidayati, 2019). Perubahan fisik terutama berkaitan dengan pertumbuhan fisik termasuk pertumbuhan organ organ reproduksi (organ seksual) menuju kematangan. Sedangkan perubahan psikologis dan psikososial berkaitan perubahan emosi dan kebiasaan sosial dimana dituntut menghadapi perubahan kebiasaan hidup, relasi dalam kehidupan remaja seperti teman sebaya dan lawan jenis (Giang et al., 2023;). Perubahan terjadi pada manusia karena masa remaja merupakan bagian dari masa perkembangan manusia. Masa remaja merupakan masa perkembangan kritis pada otak dan tubuh. Perubahan perkembangan di otak menyebabkan remaja menunjukkan peningkatan impulsif, yang dapat menyebabkan perilaku berisiko yang mungkin memiliki konsekuensi jangka panjang (Steinfeld & Torregrossa, 2023). Disamping itu, remaja memiliki sifat yang khas yaitu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, menyukai petualangan dan tantangan serta berani menanggung segala macam resiko atas perbuatannya tanpa berpikir panjang. Apabila keputusan yang diambil tidak tepat, mereka akan terjerumus ke dalam perilaku berisiko.

Menurut *World Health Organization* (WHO), remaja ialah penduduk dalam rentang usia 10 – 19 tahun, sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) rentang usia remaja ialah 10 – 24 tahun. Berdasarkan data BKKBN tahun 2020, jumlah remaja di Indonesia sebesar 67 juta jiwa atau 24% dari total penduduk Indonesia. Maka dari itu remaja menjadi fokus perhatian dalam hal pembangunan nasional.

Permasalahan remaja merupakan permasalahan yang sangat kompleks, salah satu permasalahan pada remaja adalah seks bebas. Seks bebas merupakan hubungan yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis tanpa adanya ikatan pernikahan dan dapat dilakukan secara bebas dengan banyak orang. Seks bebas pada remaja dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Lingkungan keluarga yang dimaksud adalah apakah pendidikan agama yang diberikan orang tua kepada anak sudah cukup, apakah anak cukup mendapat kasih sayang dan perhatian dari keluarga, dan apakah anak cukup mendapat keteladanan dari orang tua. Jika tidak, anak akan mencari perlindungan di tempat-tempat yang tidak sehat bagi pertumbuhan jiwanya, dan anak akan tumbuh dalam lingkungan yang tidak bermoral. Namun seks bebas juga dapat terjadi karena pelaku mengalami pelecehan seksual sehingga mengganggu kesehatan mental remaja (Ireni et al., 2022). Hal tersebut sesuai dengan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2021, Lebih dari separuh pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan usia 13-17 tahun pada kejadian terakhir adalah teman/sebaya (Susilowati et al., 2021).

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Demografi Indonesia tahun 2017 (SDKI 2017) mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja, secara nasional terdapat 8% pria dan 2% wanita pernah melakukan hubungan seksual pranikah di usia remaja yakni 15-24 tahun. Dengan fakta ini, kita mengetahui bahwa persentase remaja pria lebih tinggi dibanding wanita. Remaja yang melakukan seks pranikah dapat disebabkan oleh lemahnya pengetahuan tentang norma, kurangnya komunikasi dengan orang tua, keluarga yang kurang harmonis bahkan penggunaan obat-obatan terlarang. Secara khusus, penggunaan obat-obatan terlarang pada masa remaja dapat menimbulkan efek yang akut dan bertahan lama terhadap fungsi dan perilaku otak. Yang menjadi perhatian besar adalah kenyataan bahwa prevalensi gangguan penggunaan narkoba di masa dewasa akan lebih besar jika penggunaan narkoba dimulai pada masa remaja (DuPont et al., 2018), Alkohol, ganja, dan nikotin adalah zat-zat yang paling umum digunakan oleh remaja, sebagian karena ketersediaannya, persepsi kurangnya risiko, dan penggunaannya dalam lingkungan sosial termasuk dalam pelanggaran hukum (Setiawan et al., 2023).

*Alfisyahrina Hapsery, Artanti Indrasietianingsih, Risca Agustin, Natasha Bunga, Salsa Rifqah Nurain,
Ellya Susilowati*

Pengaruh Kedekatan Orangtua dan Masyarakat terhadap Persepsi Seks Bebas dan Narkoba Pada Remaja

Remaja yang melakukan seks pranikah dapat disebabkan oleh lemahnya pengetahuan tentang norma, kurangnya komunikasi dengan orang tua, keluarga yang kurang harmonis bahkan penggunaan obat-obatan terlarang. Usia produktif 16-24 tahun mendominasi ketergantungan narkoba dan perdagangan ilegal. Maraknya penggunaan dan penyebaran narkoba banyak diberitakan di media cetak maupun elektronik. Ada 3 klasifikasi jenis narkoba yaitu narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika dan prekursor psikotropika serta zat adiktif (Sandi Awet & SKM, 2016). Ada beberapa jenis narkoba yang dapat merangsang nafsu seksual seperti ekstasi (Kashani et al., 2022) Temuan tersebut dapat diartikan bahwa para penyalahgunaan jenis narkoba tersebut akan cenderung untuk melampiaskan nafsu seksualnya setelah memakai narkoba. Menurut BNN, dampak dari penggunaan narkoba diantaranya yaitu ketergantungan sel-sel tubuh dan organ-organ vital dalam tubuh, pikiran dan perilaku obsesif kompulsif serta tindakan impulsive bahkan perubahan emosi secara ekstrim.

Emosi yang muncul dalam diri remaja dapat disebabkan adanya hubungan interen yang kurang baik. Hubungan orang tua dan anak yang hangat dan harmonis akan menciptakan lingkungan yang positif bagi anak terutama usia remaja. Begitu sebaliknya, jika hubungan antara orang tua dan anak penuh dengan konflik dan perseteruan maka anak akan merasakan perasaan tidak nyaman, mengalami kebingungan bahkan kegagalan. Secara ekologi, Brafenberner menggambarkan adanya lingkungan yang mempengaruhi anak dimana lingkungan ini dapat menjadi faktor yang *protectif* (melindungi) atau factor berisiko (*risk factor*) bagi anak (Susilowati, E, 2020). Lingkungan ini dapat sebagai mikro sistem, meso sistem atau makro sistem. Micro sistem adalah lingkungan yang paling mempengaruhi perkembangan anak yaitu orangtua, teman sebaya atau komunitas. Meso dan makro sistem adalah lingkungan diluar keluarga sebagai lingkungan sosial namun mempengaruhi terhadap kehidupan anak, seperti masyarakat, sosial budaya (Braufenberner, 1979). Apabila interaksi atau tidak ada kedekatan antara orangtua dengan anak akan berisiko terhadap anak, hal ini juga dikemukakan hasil penelitian Gázquez Linar.es et al., (2023) yang mengemukakan bahwa hubungan keluarga berdampak langsung terhadap pola remaja dalam penggunaan narkoba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kedekatan orang tua dan masyarakat terhadap persepsi seks bebas dan narkoba pada remaja.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan perolehan data bersumber dari data primer dan teknik pengumpulan data *probability sampling*. Populasi Penelitian ini ialah remaja dengan usia 17 – 24 pada remaja yang sedang menempuh SMA ataupun lulus SMA dan menganggur serta mahasiswa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Pulau Jawa dengan memberikan kuisioner online melalui *Google Form*, dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 110 responden. Kuisioner online dinilai mampu menghemat waktu, biaya dan menjangkau yang jaraknya jauh, sehingga kita dapat melakukan penelitian secara daring tanpa harus bertatap muka secara langsung (Habibullah et al., 2022). Salah satu aplikasi survei online yang populer digunakan adalah *Google Form*, dan SurveyMonkey (Habibullah, 2020). Aplikasi SurveyMonkey dapat membantu dalam merancang kuisioner dengan gratis dan fitur pengumpulan data yang humanis. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari variabel laten eksogen dan variabel laten endogen. Terdapat 3 variabel laten eksogen pada penelitian ini, antara lain: kedekatan orang tua sosial budaya tempat tinggal Dan yang menjadi variabel laten endogen ialah edukasi seks bebas dan narkoba. Berikut disajikan definisi operasional variabel pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Skala Data
Tempat Tinggal	Ordinal
Sosial Budaya	Ordinal
Kedekatan Orang Tua	Ordinal

Alfisyahrina Hapsery, Artanti Indrasietianingsih, Risca Agustin, Natasha Bunga, Salsa Rifqah Nurain, Ellya Susilowati

Pengaruh Kedekatan Orangtua dan Masyarakat terhadap Persepsi Seks Bebas dan Narkoba Pada Remaja

Teknik analisis data dilakukan dengan metode *Structural* yaitu CB-SEM dengan *software* AMOS (*Analysys of Moment Structure*) sebagai pendukung. SEM merupakan perkembangan dari analisis jalur (*path analysis*) dan regresi berganda (*multiple regression*) yang merupakan bentuk model dari analisis multivariat. Dibandingkan dengan analisis jalur dan analisis regresi berganda, metode SEM lebih baik karena dapat melakukan analisis data secara komprehensif (S. Haryono, 2014). SEM memiliki dua jenis golongan yaitu CB-SEM (*Covariance Based Structural Equation Modeling*) dan VB-SEM (*Variance atau Component Based Structural Equation Modeling*). Teori memainkan peran yang sangat penting dalam analisis CB-SEM penting Kausalitas model struktural berdasarkan teori dan CB-SEM hanya ingin memastikan apakah model berbasis teori berbeda dengan model empirisnya. CB-SEM memiliki beberapa keterbatasan, antara lain jumlah sampel yang banyak harus besar, data harus berdistribusi normal multivariat, indikator harus reflektif, model harus berdasarkan teori, ada interdeminasi. (H. S. Haryono & Wardoyo, 2016).

Sebelum masuk kedalam metode CB-SEM, instrumen penelitian (kuesioner) perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas jika kuesiuner tersebut tidak valid maka metode CB-SEM juga tidak dapat dilakukan (Siregar, 2017). Pada CB-SEM terdapat variabel laten yang indikator bersifat reflektif. indikator indikator pada variabel laten dipengaruhi oleh konsep yang sama. Perubahan dalam satu item atau indikator akan mempengaruhi perubahan indikator lainnya dengan arah yang sama. (H. S. Haryono & Wardoyo, 2016).

Evaluasi derajat kecocokan (*goodness of fit*) secara umum kita menggunakan Uji kecocokan antara data dengan model. Tidak ada uji statistik terbaik yang dapat digunakan untuk CB-SEM untuk menjelaskan kekuatan model fit, peneliti membuat kombinasi beberapa uji kesesuaian model silang. Ukuran digunakan sebagai kombinasi untuk mengukur Model *fit* dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu, *absolute fit measure*, *incremental fit measures* dan *parsimonious fit measures*. (H. S. Haryono & Wardoyo, 2016)

Absolut Fit Measures

a. *Chi-Square*

Ukuran *fundamental* dari *overall fit* adalah *likelihood-ratio chi-square* (X^2). Nilai *Chi-Square* yang tinggi relative terhadap degree of freedom menunjukkan bahwa matrik kovarian atau korelasi yang diobservasi dengan yang diprediksi berbeda secara nyata dan ini menghasilkan probabilitas (p) lebih kecil dari tingkat signifikansi (α). Sebaliknya nilai *chi-square* yang kecil akan menghasilkan nilai *probabilitas* (p) yang lebih besar dari tingkat signifikansi (α) dan ini menunjukkan bahwa input matrik kovarian antara prediksi dengan observasi sesungguhnya tidak berbeda secara signifikan. karena ini peneliti harus memilih nilai *chi-square* yang tidak signifikan karena mengharapkan bahwa model yang diusulkan cocok atau fit dengan data observasi. Program AMOS akan memberikan nilai *chi-square* dengan perintah \cmin dan nilai probabilitas dengan perintah \p , serta besarnya *degree of freedom* dengan perintah \df.

b. GFI

Nilai GFI tinggi menunjukkan fit yang lebih baik dan berapa nilai GFI yang dapat diterima sebagai nilai yang layak belum ada standarnya, tetapi banyak peneliti menganjurkan nilai di atas 90% sebagai ukuran good fit. Program AMOS akan memberikan nilai GFI dengan perintah \gfi.

c. RMSEA

RMSEA (*Root mean square error of approximation*) ialah ukuran yang mencoba untuk memperbaiki kecenderungan *statistic chi-square* menolak model dengan jumlah sampel yang besar. Nilai RMSEA antara 0.05 sampai 0.08 merupakan ukuran yang dapat diterima. Hasil uji empiris RMSEA cocok untuk menguji model konfirmatori atau *competing model strategy* dengan jumlah sampel besar. Program AMOS akan memberikan nilai RMSEA dengan perintah \rmsea.

Alfisyahrina Hapsery, Artanti Indrasetianingsih, Risca Agustin, Natasha Bunga, Salsa Rifqah Nurain, Elly Susilowati

Pengaruh Kedekatan Orangtua dan Masyarakat terhadap Persepsi Seks Bebas dan Narkoba Pada Remaja

Incremental Fit Measures

a. AGFI

AGFI (*Adjusted goodness-of-fit*) merupakan gabungan dari GFI yang disesuaikan dengan *ratio degree of freedom* untuk proposed model dengan *degree of freedom* untuk null model. Nilai yang direkomendasikan adalah sama >0.90. Program AMOS akan memberikan nilai AGFI dengan perintah \agfi.

b. TLI

TLI (*Tucker-Lewis Index*) atau biasa dikenal dengan *nonnormed fit index* (NNFI). Pertama kali diusulkan sebagai alat untuk mengevaluasi analisis faktor, tetapi sekarang dikembangkan untuk SEM. Ukuran ini menggabungkan ukuran parsimoni kedalam indeks komperasi antara *proposed model* dan *null model* dan nilai TLI berkisar dari 0 sampai 1.0. nilai TLI yang direkomendasikan adalah sama atau >0.90. Program AMOS akan memberikan nilai TLI dengan perintah \tli.

c. NFI

NFI (*Normed Fit Index*) ialah ukuran perbandingan antara *proposed model* dan *null model*. Nilai NFI akan bervariasi dari 0 (*nol fit at all*) sampai 1.0 (*perfect fit*). Seperti halnya TLI tidak ada nilai absolute yang dapat digunakan sebagai standar, tetapi umumnya direkomendasikan sama atau >0.90. Program AMOS akan memberikan nilai NFI dengan perintah \nfi.

Parsimonious Fit Measures

a. PNFI

PNFI (*Parsimonious normal fit index*) merupakan modifikasi dari NFI. PNFI memasukkan jumlah *degree of freedom* yang digunakan untuk mencapai *level fit*. Semakin tinggi nilai PNFI semakin baik. Kegunaan utama dari PNFI adalah untuk membandingkan model dengan *degree of freedom* yang berbeda. Digunakan untuk membandingkan model alternatif, sehingga tidak ada nilai yang direkomendasikan sebagai nilai *fit* yang diterima. Namun demikian jika membandingkan dua model

maka perbedaan PNFI 0.60 sampai 0.90 menunjukkan adanya perbedaan. model yang signifikan. Program AMOS akan menghasilkan nilai PNFI dengan perintah \pnfi.

b. PGFI

PGFI (*Parsimonious goodness-of-fit index*) memodifikasi GFI atas dasar *parsimony estimated model*. Nilai PGFI berkisar antara 0 sampai 1.0 dengan nilai semakin tinggi menunjukkan model lebih *parsimony*. Program AMOS akan memberikan nilai PGFI dengan perintah \pgfi.

Setelah mengevaluasi keseluruhan model *fit*, selanjutnya ialah pengukuran tiap variabel untuk menilai unidimensionalitas dan reliabilitas dari variabel. *Unidimensionalitas* adalah asumsi yang melandasi perhitungan reliabilitas dan ditunjukkan ketika indikator suatu konstruk memiliki *acceptable fit* satu single faktor (*one dimensional*) model. Tingkat reliabilitas yang diterima secara umum adalah > 0.70 sedangkan reliabilitas < 0.70 dapat diterima untuk penelitian yang masih bersifat eksploratori. Ukuran reliabilitas yang lain adalah *variance extracted* sebagai pelengkap ukuran *construct reliability*. Angka yang direkomendasi untuk nilai *variance extracted* > 0.50. untuk mendapat kan nilai *construct reliability* dan *variance extracted* menggunakan rumus berikut ini:

$$Construct = \frac{(\sum std\ loading)^2}{(\sum std\ loading)^2 + \sum \epsilon_j} \quad (1)$$

$$variance\ extracted = \frac{\sum std\ loading^2}{\sum std\ loading^2 + \sum \epsilon_j} \quad (2)$$

Alfisyahrina Hapsery, Artanti Indrasetyaningsih, Risca Agustin, Natasha Bunga, Salsa Rifqah Nurain, Ellya Susilowati

Pengaruh Kedekatan Orangtua dan Masyarakat terhadap Persepsi Seks Bebas dan Narkoba Pada Remaja

untuk evaluasi model secara struktural, SEM memberikan hasil nilai estimasi koefisien, standar *error* dan nilai *critical value* (cr) untuk setiap koefisien. Dengan tingkat signifikansi tertentu (0.05) maka kita dapat menilai signifikansi masing-masing koefisien secara statistik. Pemilihan tingkat signifikansi dipengaruhi oleh justifikasi teoritis untuk hubungan kausalitas yang diusulkan. Jika dihipotesiskan hubungannya negatif atau positif, maka digunakan uji signifikansi *one tail* (satu sisi). Namun demikian jika peneliti tidak dapat memperkirakan arah hubungan maka harus digunakan uji *two tail* (dua sisi). (H. S. Haryono & Wardoyo, 2016).

3. Hasil

Keterbatasan pada penelitian ini adalah peneliti hanya dapat melakukan kuisioner online pada remaja yang memiliki *smart phone*, disisi lainnya tidak dapat menjangkau para remaja yang khususnya tidak atau belum memiliki smart phone. Pada tahap awal pengisian (*screening*) di kuisioner *online*, remaja diminta untuk mengisi kesanggupan dalam kuisioner *online* ini. Terdapat beberapa aspek yaitu variabel aspek kedekatan orang tua, variabel aspek sosial budaya, variabel aspek tempat tinggal serta variabel aspek edukasi seks bebas dan narkoba. Aspek kedekatan orang tua memiliki 8 indikator, aspek sosial budaya memiliki 6 indikator, aspek tempat tinggal memiliki 4 indikator, serta aspek edukasi seks bebas dan narkoba memiliki 14 indikator. Berikut mengenai statistika deskriptif dari karakteristik aspek kedekatan remaja dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indeks Aspek Kedekatan Remaja

Aspek	Persentase Penilaian	Indeks
Kedekatan Orang Tua	80.86%	Sangat Baik
Sosial Budaya	85.33%	Sangat Baik
Tempat Tinggal	87.95%	Sangat Baik
Edukasi Seks Bebas dan Narkoba	78.87%	Sangat Baik

Tabel 2 menunjukkan bahwa penilaian mahasiswa terhadap keempat aspek tersebut dinilai sangat baik, hal ini terlihat pada bobot persentase pada aspek edukasi seks bebas dan narkoba dengan nilai 78.87%, dan aspek tempat tinggal pada bobot persentase paling tinggi dengan nilai 87.95%. Berikut mengenai karakteristik responden dapat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden Persepsi Seks Bebas dan Narkoba pada Remaja

Karakteristik	Jumlah (orang)	Persentase
Usia		
- 17-20	42	38.18%
- 21-24	64	58.18%
- >24	4	3.64%
Jenis Kelamin		
- Laki-laki	30	27.27%
- Perempuan	80	72.73%
Status Pendidikan		
- Sedang tidak menempuh pendidikan	10	9%
- Sedang menempuh pendidikan/lulus S1	100	91%

Alfisyahrina Hapsery, Artanti Indrasetianingsih, Risca Agustin, Natasha Bunga, Salsa Rifqah Nurain,
Elly Susilowati

Pengaruh Kedekatan Orangtua dan Masyarakat terhadap Persepsi Seks Bebas dan Narkoba Pada Remaja

Karakteristik	Jumlah (orang)	Persentase
Tempat tinggal		
- Sendiri/Kos	28	25.45%
- Orang tua	75	69.09%
- Keluarga/Saudara	5	4.55%
- Teman	1	1%
Pendidikan orang tua		
- Tidak tamat SD	0	0%
- Tamat SD atau sederajat	12	11%
- Tamat SMP atau sederajat	11	10%
- Tamat SMA atau sederajat	57	51.82%
- Tamat perguruan tinggi	30	27.27%

Tabel 3 memberikan informasi jumlah responden penelitian ini berkisar pada usia 21 – 24 tahun dan mayoritas di dominasi oleh jenis kelamin perempuan. Status pendidikannya sebagian besar 91% remaja sedang menempuh pendidikan dan sisanya sebesar 9% remaja sedang tidak menempuh pendidikan. Persentase remaja paling tinggi sebesar 69.09% yang bertempat tinggal bersama orang tua. Sebesar 51.82% remaja memiliki latar belakang pendidikan SMA Sederajat, dan sebesar 10% dengan latar belakang pendidikan SMP Sederajat.

Untuk mengetahui indikator yang menjadi faktor dari variable kedekatan orang tua, sosial budaya remaja, tempat tinggal remaja, dan edukasi seks bebas dan narkoba yang telah didapatkan remaja maka dilakukan pengecekan dengan menggunakan loading factor. Suatu indikator dikatakan memiliki pengaruh jika nilai $p\text{-value} \leq \alpha_{(0.05)}$. Hasil uji validitas yang dilakukan pada data penelitian ini menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai $p\text{-value} \alpha \leq (0.05)$.

Tabel 4. Uji Validitas

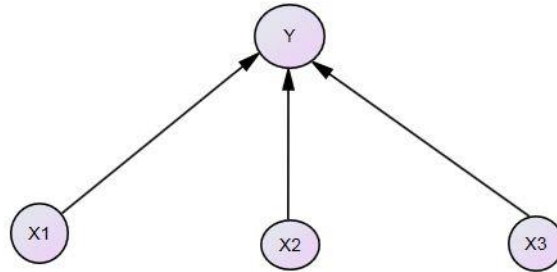
Variabel	Indikator	Keterangan
Kedekatan Orang Tua (X_1)	B1 – B8	Valid
Sosial Budaya (X_2)	C1 – C6	Valid
Tempat Tinggal (X_3)	D1 – D4	Valid
Edukasi Seks Bebas dan Narkoba (Y)	E1 – E14	Valid

Pengujian kedua yaitu reliabilitas yang dilakukan untuk melihat keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Nilai *cronbach alpha* digunakan untuk menilai reliabilitas instrumen penelitian. Kriteria yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah nilai *cronbach* $\alpha \geq 0.60$ maka kuisioner dinyatakan reliabel.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas dengan Nilai *Cronbach's Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kedekatan Orang Tua (X_1)	0.828
Sosial Budaya (X_2)	0.836
Tempat Tinggal (X_3)	0.519
Edukasi Seks Bebas dan Narkoba (Y)	0.762

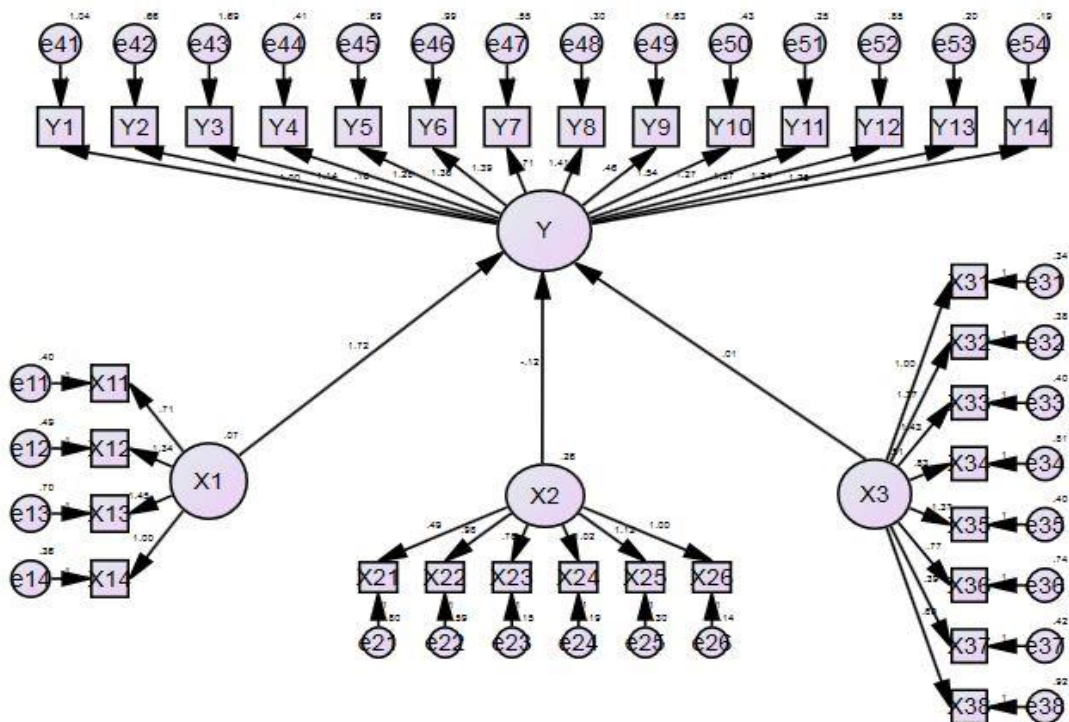
Hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada data penelitian ini menunjukkan bahwa tiga aspek yakni aspek kedekatan orang tua, aspek sosial budaya, dan aspek edukasi seks bebas dan narkoba bernilai tinggi reliabelnya, sedangkan untuk aspek tempat tinggal remaja bernilai cukup reliabel. Kerangka model SEM menggunakan software AMOS dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konsep Model SEM Persepsi Seks Bebas dan Narkoba pada Remaja

Gambar 1 berdasarkan kerangka konsep maka dilanjutkan untuk spesifikasi model. Pada tahap ini berkaitan dengan pembentukan model awal persamaan struktural, sebelum dilakukan estimasi. Spesifikasi model meliputi perancangan model struktural, perancangan model pengukuran, serta konstruksi diagram jalur.

Model struktural menunjukkan hubungan sebab – akibat diantara variabel – variabel laten, yang menjelaskan pengaruh dari penyebab. Model pengukuran menunjukkan cara variabel laten yang di hipotesiskan dan diindikasikan oleh variabel teramati. Konstruksi diagram jalur yaitu membangun hubungan – hubungan antar variabel. Nilai dari parameter – parameter yang ada di dalam model struktural dapat diperoleh menggunakan estimasi. Estimasi yang digunakan pada penelitian ini ialah *maximum likelihood*. Hasil estimasi parameter dengan software AMOS dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Estimasi Parameter Persepsi Seks Bebas dan Narkoba pada Remaja

Alfisyahrina Hapsery, Artanti Indrasetyaningsih, Risca Agustin, Natasha Bunga, Salsa Rifqah Nurain,
Elly Susilowati
Pengaruh Kedekatan Orangtua dan Masyarakat terhadap Persepsi Seks Bebas dan Narkoba Pada Remaja

Gambar 2. perlu dilakukan pengujian kesesuaian model (*Goodness Of Fit*) untuk mengukur seberapa akurat estimasi yang didapat dengan model yang telah dibuat. Nilai kecocokan model dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. *Goodness Of Fit* (GOF)

Kriteria GOF	Jenis Kecocokan Model	Nilai	Keterangan
Absolut	GFI	0.659	Cukup Baik
Inkremental	RMSEA	0.094	Cukup Baik
	AGFI	0.610	Cukup Baik
	TLI	0.686	Cukup Baik
Parsimoni	PNFI	0.512	Cukup Baik
	PGFI	0.577	Cukup Baik

Tabel 4 model secara relatif memiliki kecocokan yang cukup baik dengan data penelitian. Pada langkah selanjutnya ialah evaluasi model struktural untuk melihat variabel laten eksogen yang mempengaruhi variabel laten endogen. Kriteria signifikansi variabel apabila nilai $p\text{-value} \leq \alpha_{(0.05)}$ maka dinyatakan signifikan. Hasil signifikansi tiap variabel laten dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Signifikansi Variabel Laten Eksogen Persepsi Seks Bebas dan Narkoba pada Remaja

Variabel Laten Eksogen	<i>P-value</i>	Keterangan
Tempat Tinggal (ξ_1)	0,002	Signifikan
Sosial Budaya (ξ_2)	0.210	Tidak Signifikan
Kedekatan Orang Tua (ξ_3)	0,804	Tidak Signifikan

Tabel 5, diketahui bahwa variabel laten eksogen Sosial Budaya dan variabel laten eksogen Kedekatan Orang Tua tidak signifikan mempengaruhi variabel laten endogen Edukasi Seks Bebas dan Narkoba, akan tetapi variabel laten eksogen Tempat Tinggal secara signifikan mempengaruhi variabel endogen Edukasi Seks Bebas dan Narkoba. Variabel laten eksogen Tempat Tinggal memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap variabel laten endogen Edukasi Seks Bebas, variabel laten eksogen Sosial Budaya memiliki pengaruh langsung negatif dan tidak signifikan terhadap variabel laten endogen Edukasi Seks Bebas, dan variabel laten eksogen Kedekatan Orang Tua memiliki pengaruh langsung negatif dan tidak signifikan terhadap variabel laten endogen Edukasi Seks Bebas.

4. Pembahasan

Pada penelitian lain mengenai pergaulan remaja mengemukakan hasil bahwa tempat tinggal mempengaruhi perilaku mahasiswa, terutama pada mahasiswa kos mengakui bahwa pernah melakukan hubungan seksual pranikah (Yudia Mega Sharla; Kusumawati Aditya, 2018). Pada penelitian lain pula dikemukakan bahwa budaya kebaratan telah mempengaruhi remaja Indonesia, hal ini dibuktikan dengan mereka lebih menyukai musik dan cara berpakaian budaya luar daripada budaya sendiri, namun tidak semua remaja melakukan demikian. Masih terdapat remaja yang mempertahankan pola perilaku kebudayaan Indonesia, dengan ini diharapkan remaja lebih mengenali mencintai kebudayaan dalam negeri (Artisna et al., 2022). Kedekatan orang tua dengan remaja berpengaruh terhadap tingkat emosional remaja, hal ini dikarenakan jika anak diberikan simpati oleh orang tuanya dan mereka akan memiliki rasa nyaman dengan begitu maka remaja akan terhindar dari pergaulan bebas (Shintia, 2021). Dengan adanya ketiga aspek tempat tinggal, sosial budaya, dan kedekatan dengan orang tua mampu membentuk pola pikir remaja dan pergaulan yang sehat agar mereka memiliki masa depan baik. Kedekatan orangtua yang berpengaruh pada emosional anak juga dapat menjadi factor *protectif* sehingga anak dapat memiliki resiliensi terhindar dari pergaulan bebas.

Gambar 2, maka diperoleh persamaan model struktural dari hasil estimasi sebagai berikut.

$$\eta = 0.99 + 1.72\xi_1 - 0.12\xi_2 + 0.01\xi_3 \quad (3)$$

Persamaan model struktural pada persamaan (3), maka diperoleh informasi pengaruh antara aspek tempat tinggal yaitu sebesar 1.72 yang artinya semakin baik aspek tempat tinggal maka aspek persepsi seks bebas dan narkoba akan meningkat sebesar 1.72 atau 17.2%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi seks bebas dan narkoba tergolong cukup baik, sehingga perlu ditingkatkan lagi agar selalu memperhatikan dimana posisi remaja berada. Pengaruh antara aspek sosial budaya terhadap aspek persepsi seks bebas dan narkoba bernilai negatif yaitu sebesar 0.12, artinya semakin baik aspek sosial budaya maka persepsi edukasi seks bebas dan narkoba akan meningkat sebesar 12%, hal ini menunjukkan bahwa tergolong cukup buruk, sehingga perlu ditingkatkan lagi agar remaja selalu memperhatikan nilai kebudayaan yang ada di masyarakat. Serta pengaruh antara kedekatan orang tua sebesar 0.01, artinya semakin baik aspek kedekatan orang tua maka persepsi edukasi seks bebas dan narkoba akan meningkat sebesar 1%, hal ini menunjukkan bahwa aspek kedekatan orang tua tergolong buruk, sehingga perlu ditingkatkan lagi agar remaja sering melakukan interaksi dengan anggota keluarga.

Penyuluhan sosial (Sugiyanto et al., 2018) terhadap orang tua dan remaja tentang seks bebas dan Narkoba tidak hanya dilaksanakan kepada orang tua atau remaja saja akan tetapi dilakukan kepada orang tua dan remaja serta tidak hanya menyampaikan materi tentang seks bebas dan Narkoba saja tanpa mengupayakan cara untuk mendekatkan hubungan antara orang tua dan remaja. Hal tersebut dimaksudkan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial akan tetapi sebagai upaya untuk pencegahan permasalahan kesejahteraan sosial (Mu'man Nuryana et al., 2020).

Penyelenggaraan penyuluhan sosial yang terdekat dengan upaya membangun kedekatan antara orang tua dan remaja dapat dilakukan melalui kegiatan Family Development Session bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (Irmayani et al., 2020) maupun penyelenggaraan penyuluhan sosial yang dilakukan penyuluh sosial masyarakat yang mampu menjangkau seluruh anggota masyarakat setempat (Habibullah, 2021). Selain kegiatan penyuluhan sosial, program penguatan keluarga dan konseling bagi remaja perlu ditingkatkan termasuk oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (Ramdyanti et al., 2022)

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa hanya variabel laten eksogen Tempat Tinggal (ξ_1) berpengaruh signifikan terhadap persepsi seks bebas dan narkoba pada remaja. Dari hasil penelitian ini, disarankan agar remaja yang akan melanjutkan pendidikan di luar tempat tinggal asal, agar lebih selektif dalam memilih tempat tinggal (kos) dan diarahkan pada lingkungan yang positif (protectif) dengan pengawasan yang ketat dari orang tua mereka untuk menghindari dari dampak pergaulan bebas dan narkoba.

6. Saran

Permasalahan seks bebas dan Narkoba merupakan permasalahan kesejahteraan sosial yang menyebabkan remaja akan hilang masa depannya jika terjerumus pada permasalahan tersebut sehingga diperlukan upaya pencegahan dengan membangun kedekatan antara orang tua dan remaja. Kementerian Sosial RI dalam program dan kebijakan dapat berperan untuk pencegahan permasalahan ini dengan melaksanakan penyuluhan sosial dan pengasuhan yang baik (*good parenting*) akan meningkatkan persepsi yang positif bagi remaja sehingga remaja terhindar dari masalah sosial seperti pergaulan bebas dan narkoba. Program penguatan keluarga dan konseling bagi remaja perlu ditingkatkan termasuk oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Alfisyahrina Hapsery, Artanti Indrasietianingsih, Risca Agustin, Natasha Bunga, Salsa Rifqah Nurain, Elly Susilowati

Pengaruh Kedekatan Orangtua dan Masyarakat terhadap Persepsi Seks Bebas dan Narkoba Pada Remaja

Daftar Pustaka

- Ananda, S. W., & Satwika, Y. W. (2022). Hubungan antara Kelekatan Orang Tua dengan Kecerdasan Emosional pada Remaja. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(4).
- Artisna, P., Naswa, F., & Rohmah, M. (2022). Respon Generasi Milenial Indonesia Di Tengah Masuknya Budaya Asing. *Universitas Negeri Surabaya 2022* |, 695, 695–705.
- Bronfenbrenner, U. (1979). Contexts of child rearing: Problems and prospects. *American psychologist*, 34(10), 844.
- DuPont, R. L., Han, B., Shea, C. L., & Madras, B. K. (2018). Drug use among youth: National survey data support a common liability of all drug use. *Preventive Medicine*, 113, 68–73. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.05.015>
- Gázquez Linares, J. J., Barragán Martín, A. B., Molero Jurado, M. D. M., Simón Márquez, M. D. M., Pérez-Fuentes, M. D. C., Martos Martínez, Á., & Del Pino Salvador, R. M. (2023). Perception of Parental Attitudes and Self-Efficacy in Refusing Alcohol Drinking and Smoking by Spanish Adolescents: A Cross-Sectional Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1), 808. <https://doi.org/10.3390/ijerph20010808>
- Giang, T.-V., Huynh, V.-S., Do, T.-T., & Mai, M.-H. (2023). Factors affecting the social and emotional health of adolescents: A cross-sectional study in Vietnam. *Heliyon*, 9(3), e14717. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14717>
- Firdaus, A. ahargia Y., & Hidayati, E. (2018). Pengetahuan dan Sikap Remaja Terhadap Penggunaan Napza Di Sekolah Menengah Atas Di Kota Semarang. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 6(1), 1–7. DOI: <https://doi.org/10.26714/jkj.6.1.2018.1-7>
- Habibullah. (2020). Penelitian Secara Daring: Metode dan Praktek. In *QUANTUM: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial: Vol. XVI*.
- Habibullah, H. (2021). Dimensi Keterlibatan Relawan Sosial Pada Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v7i1.256>
- Habibullah, H., Pudjianto, B., & Sabarisman, M. (2022). Online Survey During the COVID-19 Pandemic. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4298264>
- Hanifah, S. D., Nurwati, R. N., & Santoso, M. B. (2022). Seksualitas dan Seks Bebas Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.40046>
- Haryono, H. S., & Wardoyo, P. (2016). Structural Equation Modeling Untuk Penelitian Manajemen Menggunakan AMOS 18.00. In *Dictionary of Statistics & Methodology*.
- Haryono, S. (2014). Mengenal Metode Structural Equation Modeling (SEM) untuk penelitian manajemen menggunakan AMOS. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis STIE YPN Vol. VII No. 1 Oktober 2014*, VII(1).
- Ireni Lusianti Gili, Moh Subhan Fajarulloh, Maulivia Idham Choliq, Moch. Iqbal Nasurulloh Al-Amin, & Alfisyahrina Hapsery. (2022). Structural Equation Modeling untuk Memodelkan Pengaruh Pelecehan Seksual terhadap Kesehatan Mental Mahasiswi di Kota Surabaya. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(2). <https://doi.org/10.33007/ska.v11i2.3079>
- Irmayani, N. R., Susantyo, B., Mujiyadi, B. us, Nainggolan, T., Habibullah, & Sugiyanto. (2020). Changes of poor family behavior through family development session. *Annual International Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2020)*, 22–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.200728.006>
- Kashani, F. L., Vaziri, S., & Vaziri, A. (2022). Effects of Methamphetamine and Narcotics on Sexual High-Risk Behaviors. *International Journal of High Risk Behaviors and Addiction*, 11(3). <https://doi.org/10.5812/ijhrba-127007>
- Kholik, S., Mariana, E. R., & Zainab. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Narkoba di Poli Napza RSJ Sambang Lihum. *Jurnal Skala Kesehatan*, 5(1).
- Lambert, S. F., Brown, T. L., Phillips, C. M., & Ialongo, N. S. (2004). The Relationship Between Perceptions of Neighborhood Characteristics and Substance Use Among Urban African American Adolescents. *American Journal of Community Psychology*, 34(3–4), 205–218. <https://doi.org/10.1007/s10464-004-7415-3>
- Mu'man Nuryana, Irmayani, N. R., Susantyo, B., B. Mujiyadi, S., Togiaratua Nainggolan, S., & Habibullah. (2020). Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia Tahun 2020 - 2024. In *Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia Tahun 2020 - 2024* (Issue January 2020). <https://doi.org/10.33007/book.1>
- Ramdyanti, B. D., Susilowati, E., & Rahayuningsih, E. (2022). Praktik Intervensi Krisis Dalam Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi pada Pekerja Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus —BRSAMPK Paramita Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Pekerjaan Sosial*, 21(1). <https://doi.org/10.31595/peksos.v21i1.539>
- Sandi Awet, & SKM. (2016). *Narkoba dari Tapal Batas Negara - Awet Sandi, SKM - Google Books*. Mujahidin Press Bandung.

Alfisyahrina Hapsery, Artanti Indrasietianingsih, Risca Agustin, Natasha Bunga, Salsa Rifqah Nurain, Ellya Susilowati
 Pengaruh Kedekatan Orangtua dan Masyarakat terhadap Persepsi Seks Bebas dan Narkoba Pada Remaja

https://books.google.co.id/books/about/Narkoba_dari_Tapal_Batas_Negara.html?id=t4poDwAAQBAJ&redir_esc=y

- Setiawan, H. H., Wardianti, A., & Irmayani, N. R. (2023). The Practice of Diversion for Perpetrators of Child Crimes in Indonesia. In *Restorative Justice and Practices in the 21st Century* (pp. 205-224). IGI Global.
- Sugiyanto, Suradi, Sitepu, A., B.Mujiyadi, Nainggolan, T., Susantyo, B., Irmayani, & Habibullah. (2018). Efektivitas Penyuluhan Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. P3KS Press.
- Susilowati, E. (2020) Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak. Poltekesos. Bandung
- Susilowati, E., Yuliani, D., Suharna, & Praptoraharjo, I. (2021). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2021*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://repository.poltekesos.ac.id/items/f1e55d47-cfbb-431d-8158-83b515c49cb4>
- Steinfeld, M. R., & Torregrossa, M. M. (2023). Consequences of adolescent drug use. *Translational Psychiatry*, 13(1), 313. <https://doi.org/10.1038/s41398-023-02590-4>
- Siregar, S. (2017). Statistika Deskriptif untuk Penelitian dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. In *Jakarta : PT Raja Grafindo Persada*.
- Taufiqianto Dako, R. (2004). Kenakalan Remaja. *Jurnal Inovasi*.
- Yudia Mega Sharla; Kusumawati Aditya. (2018). Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Kost. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).